



# 2021

## Laporan Keuangan

serta

## Laporan Auditor Independen

Untuk Tahun Yang Berakhir  
31 Desember 2021



### DANA PENSIUN POS INDONESIA

Jl. Tasikmalaya No. 1 Bandung 40271  
Telp. 022-7271367 Fax. 022-7210828  
Email. [Dapenpos\\_indonesia@yahoo.com](mailto:Dapenpos_indonesia@yahoo.com)  
Website : <http://dapenpos.co.id>

Menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja Terbaik dan Terpercaya yang mampu memberikan kesinambungan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta dan menunjang kepentingan Pendiri, Karyawan dan Pemangku Kepentingan

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**

**DAFTAR ISI**

**Laporan Auditor Independen**

**Surat Pernyataan Pengurus**

**Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021 dan 2020**

Laporan Aset Neto	1
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Posisi Keuangan	4
Perhitungan Hasil Usaha	7
Arus Kas	9
Catatan atas Laporan Keuangan	10

**Lampiran**

Laporan Portofolio Investasi	Lampiran I
A. Laporan Perkembangan Portofolio Investasi Tahunan	
B. Laporan Hasil Investasi Tahunan	
C. <i>Checklist</i> Analisis Investasi	
D. Analisis Kesesuaian terhadap Batasan Kuantitatif per Pihak	
E. Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis	
F. Analisis Kesesuaian terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Khusus	
G. Laporan Paket Investasi (Khusus DPLK)	
H. Pengungkapan Penggunaan Penerima Titipan	
I. Pengungkapan Manajer Investasi (Apabila Menggunakan Jasa Manajer Investasi)	
J. Pengungkapan Investasi Tabungan pada Bank	
K. Pengungkapan Investasi Deposito <i>on Call</i> dan Deposito Berjangka pada Bank	
L. Pengungkapan Investasi Sertifikat Deposito pada Bank dan Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
M. Pengungkapan Investasi pada Surat Berharga Negara	
N. Pengungkapan Investasi pada Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
O. Pengungkapan Investasi pada Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
P. Pengungkapan Investasi pada Reksa Dana	
Q. Pengungkapan Investasi pada <i>Medium Term Notes</i>	
R. Pengungkapan Investasi pada Efek Beragun Aset	
S. Pengungkapan Investasi Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
T. Pengungkapan Investasi pada Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia	
U. Pengungkapan Investasi pada REPO	
V. Pengungkapan Investasi pada Penempatan Langsung Saham pada Saham di Dalam Negeri	
W. Pengungkapan Investasi pada Penempatan Langsung Saham pada Saham di Luar Negeri	
X. Pengungkapan Investasi atas Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan	
Y. Analisis Investasi Dana Pensiun	
Penjelasan Piutang Bermasalah - Aset Lain-lain	Lampiran II
Permasalahan Penyertaan Langsung Saham	Lampiran III

No.: 00009/2.0712/AU.6/08/0250-2/1/III/2022

**Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus  
DANA PENSIUN POS INDONESIA  
Program Pensiun Manfaat Pasti**

### **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Pos Indonesia - Program Pensiun Manfaat Pasti ("Dana Pensiun") terlampir, yang terdiri dari laporan aset neto dan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, serta laporan perubahan aset neto, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan penjelasan informasi lainnya. Laporan keuangan terlampir telah disusun oleh Pengurus berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.5/2018 tertanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun ("Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.5/2018").

#### **Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan**

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.5/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material.

#### **Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto dan posisi keuangan Dana Pensiun Pos Indonesia - Program Pensiun Manfaat Pasti pada tanggal 31 Desember 2021, serta perubahan aset neto, hasil usaha dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.5/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

**Basis Akuntansi**

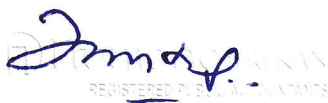
Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan B atas laporan keuangan terlampir, yang menjelaskan tentang basis akuntansi yang digunakan. Laporan Keuangan Dana Pensiun Pos Indonesia - Program Pensiun Manfaat Pasti disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.5/2018. Sebagai akibatnya, laporan keuangan ini belum tentu sesuai untuk tujuan lain.

**Hal Lain**

Dana Pensiun Pos Indonesia - Program Pensiun Manfaat Pasti tidak menyusun laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Dana Pensiun terhadap peraturan perundang-undangan serta evaluasi pengendalian internal. Laporan pengujian kepatuhan Dana Pensiun terhadap peraturan perundang-undangan, dan evaluasi pengendalian intern untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, disajikan dalam laporan kami Nomor: 21/006/07/NR.01/22 tanggal 18 Februari 2022 dan Nomor: 21/007/07/NR.01/22 tanggal 18 Februari 2022.

**Kantor Akuntan Publik****Nugroho & Rekan****Ijin Usaha No.: 364/KM.1/2006**  
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**Zarya Nugroho****Ijin Akuntan Publik: AP. 250****18 Februari 2022**



# dana pensiun pos indonesia

kantor : jl. tasikmalaya no. 1 bandung 40271  
telp. 022-7271367 fax 022-7210828

Website : <http://dapenpos.co.id> E-mail : [dapenpos\\_indonesia@yahoo.com](mailto:dapenpos_indonesia@yahoo.com)

## SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

### DANA PENSIUN POS INDONESIA

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Bestin Anwar  
Alamat Kantor : Jln. Tasikmalaya No. 1 Bandung 40271  
Jabatan : Direktur Utama Dana Pensiun Pos Indonesia

Nama : Hari Edi Purwoko  
Alamat Kantor : Jln. Tasikmalaya No. 1 Bandung 40271  
Jabatan : Direktur Investasi dan Umum Dana Pensiun Pos Indonesia

Untuk dan atas nama Dana Pensiun Pos Indonesia menyatakan bahwa:

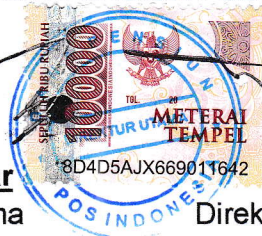
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan keuangan Dana Pensiun Pos Indonesia;
2. Laporan Keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Pos Indonesia tersebut telah disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun Pos Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan Dana Pensiun Pos Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Dana Pensiun Pos Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 18 Februari 2022

**PENGURUS DANA PENSIUN POS INDONESIA**

**Bestin Anwar**  
Direktur Utama



**Hari Edi Purwoko**  
Direktur Investasi dan Umum

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN ASET NETO**  
**PER 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
<b>Aset</b>			
<b>Investasi (Nilai Wajar)</b>			
Tabungan		-	-
Deposito on Call	B3c1b,E1	5.000.000.000	-
Deposito Berjangka	B3c1c,E1	267.559.000.000	371.529.000.000
Sertifikat Deposito		-	-
Sertifikat Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga	B3c1f,E1	529.944.645.005	330.097.479.119
Saham	B3c1g,E1	72.642.434.500	96.616.611.000
Obligasi	B3c1h,E1	751.790.766.761	772.861.527.264
Sukuk		-	-
<b>Unit Penyertaan Reksa Dana</b>			
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	B3c1i,E1	7.480.092.531	10.869.236.885
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks		-	-
- Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas		-	-
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek		-	-
Efek Beragunan Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset		-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		-	-
Kontrak Opsi Saham		-	-
Penempatan Langsung Tanah dan Bangunan	B3c1o,E1 B3c1p, B3c1q,E1	140.133.000.000	139.297.000.000
		127.185.000.000	126.938.000.000
<b>Jumlah Investasi</b>		<b>1.901.734.938.797</b>	<b>1.848.208.854.268</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN ASET NETO**  
**PER 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
<b>Aset Lancar di Luar Investasi</b>			
Kas dan Bank	B3c2,E2	12.944.336.907	60.963.315
Piutang luran	B3c3,E3		
luran Normal Pemberi Kerja		5.369.239.860	6.404.361.541
luran Normal Peserta		8.282.455	7.764.355
luran Tambahan		19.956.022.564	16.630.018.804
Piutang Bunga Keterlambatan luran		-	-
Beban Dibayar di Muka	B3c5,E4	16.667.053.681	15.363.663.515
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	B3c7,E5	18.644.122.943	15.011.512.871
Piutang Lain-lain		-	-
<b>Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi</b>		<b>73.589.058.410</b>	<b>53.478.284.401</b>
<b>Aset Operasional (Nilai Buku)</b>			
Tanah dan Bangunan	B3c9,E6	1.843.490.110	1.975.247.218
Kendaraan	B3c9,E6	209.649.001	284.622.439
Peralatan Komputer	B3c9,E6	74.463.012	50.270.924
Peralatan Kantor	B3c9,E6	37.547.271	45.451.569
Aset Operasional Lain	B3c9,E6	26.632.280	31.594.777
<b>Jumlah Aset Operasional</b>		<b>2.191.781.674</b>	<b>2.387.186.927</b>
<b>Aset Lain-lain</b>	E7	49.943.751	1.500.001
<b>Jumlah Aset Tersedia</b>		<b>1.977.565.722.632</b>	<b>1.904.075.825.597</b>
<b>Liabilitas</b>			
<b>Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		-	-
Utang Investasi		-	-
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Beban Masih Harus Dibayar	B3b2,E8	3.374.789.329	3.753.821.923
Liabilitas Lain	B3b2,E9	2.168.826.725	2.851.067.522
<b>Jumlah Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>		<b>5.543.616.054</b>	<b>6.604.889.445</b>
<b>Aset Neto</b>		<b>1.972.022.106.578</b>	<b>1.897.470.936.152</b>

Bandung, 18 Februari 2022  
Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia

  
  
**Bestin Anwar**  
Direktur Utama

  
**Hari Edi Purwoko**  
Direktur Investasi dan Umum

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
<b>Penambahan</b>			
Pendapatan Investasi			
Bunga/Bagi Hasil	B3b3,E10	119.359.422.129	122.676.555.449
Dividen	B3b3,E10	6.277.727.093	9.097.510.328
Sewa	B3b3,E10	850.000.000	850.000.000
Laba Pelepasan Investasi	B3b3,E10	(5.935.777.153)	5.587.373.482
Pendapatan Investasi Lain	B3b3,E10	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>		<b>120.551.372.069</b>	<b>138.211.439.259</b>
Peningkatan/(Penurunan) Nilai Investasi	E11	5.005.648.983	12.462.289.381
Iuran Jatuh Tempo			
Iuran Normal Pemberi Kerja	E12	34.251.402.201	38.435.382.512
Iuran Normal Peserta	E12	7.301.443.639	7.286.333.034
Iuran Tambahan	E12	119.736.135.384	99.780.112.824
Pendapatan di Luar Investasi	E13	3.045.266.753	18.657.572
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		-	-
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>289.891.269.029</b>	<b>296.194.214.582</b>
<b>Pengurangan</b>			
Beban Investasi	B3b4,E14	1.153.676.360	838.764.869
Beban Operasional	B3b4,E15	15.849.920.769	18.892.953.656
Beban di Luar Investasi dan Operasional	B3b4,E16	178.062.027	24.754.589
Manfaat Pensiun	B3c10,E17	197.142.143.067	178.336.778.690
Pajak Penghasilan	B3c11,E18	1.016.296.380	1.333.002.220
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		-	-
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>215.340.098.603</b>	<b>199.426.254.024</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) Aset Neto</b>		<b>74.551.170.426</b>	<b>96.767.960.558</b>
<b>Aset Neto Awal Tahun</b>		<b>1.897.470.936.152</b>	<b>1.800.702.975.594</b>
<b>Aset Neto Akhir Tahun</b>		<b>1.972.022.106.578</b>	<b>1.897.470.936.152</b>

Bandung, 18 Februari 2022  
Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia

  
  
**Bestin Anwar**  
Direktur Utama

  
**Hari Edi Purwoko**  
Direktur Investasi dan Umum

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
<b>Aset</b>			
<b>Investasi (Nilai Historis)</b>			
Tabungan		-	-
Deposito on Call	B3c1b,E1	5.000.000.000	-
Deposito Berjangka	B3c1c,E1	267.559.000.000	371.529.000.000
Sertifikat Deposito		-	-
Sertifikat Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga	B3c1f,E1	514.213.266.443	312.194.875.759
Saham	B3c1g,E1	135.074.496.977	155.516.702.123
Obligasi	B3c1h,E1	730.977.000.000	760.977.000.000
Sukuk		-	-
Unit Penyertaan Reksa Dana			
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	B3c1i,E1	8.411.627.877	12.211.627.877
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks		-	-
- Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas		-	-
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek		-	-
Efek Beragunan Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset		-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		-	-
Kontrak Opsi Saham		-	-
Penempatan Langsung	B3c1o,E1	89.922.500.000	90.193.500.000
Tanah dan Bangunan	B3c1p,	12.738.790.453	12.738.790.453
Akumulasi Penyusutan Bangunan	B3c1q,E1	(7.728.146.837)	(7.713.396.845)
<b>Jumlah Investasi</b>		<b>1.756.168.534.913</b>	<b>1.707.648.099.367</b>
Selisih Penilaian Investasi	E19	145.566.403.884	140.560.754.901

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
<b>Aset Lancar di Luar Investasi</b>			
Kas dan Bank	B3c2,E2	12.944.336.907	60.963.315
Piutang luran	B3c3,E3		
luran Normal Pemberi Kerja		5.369.239.860	6.404.361.541
luran Normal Peserta		8.282.455	7.764.355
luran Tambahan		19.956.022.564	16.630.018.804
Piutang Bunga Keterlambatan luran		-	-
Beban Dibayar di Muka	B3c5,E4	16.667.053.681	15.363.663.515
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	B3c7,E5	18.644.122.943	15.011.512.871
Piutang Lain-lain			
<b>Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi</b>		<b>73.589.058.410</b>	<b>53.478.284.401</b>
<b>Aset Operasional (Nilai Buku)</b>			
Tanah dan Bangunan	B3c9,E6	3.349.589.155	3.349.589.155
Kendaraan	B3c9,E6	621.375.000	621.375.000
Peralatan Komputer	B3c9,E6	860.960.645	799.090.645
Peralatan Kantor	B3c9,E6	586.115.477	577.487.477
Aset Operasional Lain	B3c9,E6	39.700.000	39.700.000
Akumulasi Penyusutan		(3.265.958.603)	(3.000.055.350)
<b>Jumlah Aset Operasional</b>		<b>2.191.781.674</b>	<b>2.387.186.927</b>
<b>Aset Lain-lain</b>	E7	49.943.751	1.500.001
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1.977.565.722.632</b>	<b>1.904.075.825.597</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2021**  
 (dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
<b>Liabilitas</b>			
<b>Nilai Kini Aktuarial</b>	E20	2.595.524.307.419	2.754.752.093.699
<b>Selisih Nilai Kini Aktuarial</b>	E21	(623.502.200.841)	(857.281.157.547)
<b>Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban Masih Harus Dibayar	B3b2,E8	3.374.789.329	3.753.821.923
Liabilitas Lain	B3b2,E9	2.168.826.725	2.851.067.522
<b>Jumlah Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>		<b>5.543.616.054</b>	<b>6.604.889.445</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>1.977.565.722.632</b>	<b>1.904.075.825.597</b>

Bandung, 18 Februari 2022  
 Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia



**Bestin Anwar**  
 Direktur Utama



**Hari Edi Purwoko**  
 Direktur Investasi dan Umum

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
<b>Pendapatan Investasi</b>			
Bunga/Bagi Hasil	B3b3,E10	119.359.422.129	122.676.555.449
Dividen	B3b3,E10	6.277.727.093	9.097.510.328
Sewa	B3b3,E10	850.000.000	850.000.000
Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi	B3b3,E10	(5.935.777.153)	5.587.373.482
Pendapatan Investasi Lain	B3b3,E10	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Investaasi</b>		<b>120.551.372.069</b>	<b>138.211.439.259</b>
<b>Beban Investasi</b>			
Beban Transaksi	B3b4,E14	37.566.143	9.121.500
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Bangunan	B3b4,E14	14.749.992	14.749.992
Beban Manajer Investasi		-	-
Beban Kustodian	B3b4,E14	435.506.135	386.812.277
Beban Investasi Lain	B3b4,E14	665.854.090	428.081.100
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>1.153.676.360</b>	<b>838.764.869</b>
<b>Hasil Usaha Investasi</b>		<b>119.397.695.709</b>	<b>137.372.674.390</b>
<b>Beban Operasional</b>			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	B3b4,E15	11.411.163.172	14.518.580.239
Beban Kantor	B3b4,E15	998.936.806	1.072.635.797
Beban Pemeliharaan			
Beban Penyusutan	B3b4,E15	265.903.253	275.601.153
Beban Jasa Pihak Ketiga	B3b4,E15	265.175.900	244.651.850
Beban Operasional Lain	B3b4,E15	2.908.741.638	2.781.484.617
<b>Total Beban Operasional</b>		<b>15.849.920.769</b>	<b>18.892.953.656</b>
<b>Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>			
Pendapatan Lain di Luar Investasi	E13	3.045.266.753	18.657.572
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	B3b4,E16	(178.062.027)	(24.754.589)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>		<b>2.867.204.726</b>	<b>(6.097.017)</b>
<b>Hasil Usaha sebelum Pajak</b>		<b>106.414.979.666</b>	<b>118.473.623.717</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	B3c11,E18	<b>1.016.296.380</b>	<b>1.333.002.220</b>
<b>Hasil Usaha setelah Pajak</b>		<b>105.398.683.286</b>	<b>117.140.621.497</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA - Lanjutan**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
<b>Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>			
Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Laba (Rugi) Penjualan			
Aset Operasional	E13	-	-
Laba (Rugi) Penjualan			
Aset Lain-lain		-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	E13	3.045.266.753	18.657.572
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	B3b4,E16	(178.062.027)	(24.754.589)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>		<b>2.867.204.726</b>	<b>(6.097.017)</b>
<b>Hasil Usaha sebelum Pajak</b>		<b>106.414.979.666</b>	<b>118.473.623.717</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	B3c11,E18	<b>1.016.296.380</b>	<b>1.333.002.220</b>
<b>Hasil Usaha setelah Pajak</b>		<b>105.398.683.286</b>	<b>117.140.621.497</b>

Bandung, 18 Februari 2022  
Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia




**Bestin Anwar**  
Direktur Utama



**Hari Edi Purwoko**  
Direktur Investasi dan Umum

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil		119.654.081.052	121.527.512.072
Penerimaan Dividen		5.564.886.720	8.126.947.365
Penerimaan Sewa		565.000.000	910.000.000
Pendapatan Investasi Lain		-	20.125
Pelepasan Investasi		712.004.496.663	360.101.975.510
Penanaman Investasi		(770.173.868.825)	(433.310.317.673)
Pembayaran Beban Investasi		(940.179.156)	(1.051.687.443)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<u>66.674.416.454</u>	<u>56.304.449.956</u>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasional</b>			
Pembayaran Beban Operasional		(13.837.586.829)	(18.667.927.808)
Penjualan Aset Operasional		-	-
Pembelian Aset Operasional		(70.498.000)	(20.245.000)
Penjualan Aset Lain-lain		-	-
Pembelian Aset Lain-lain		(50.550.000)	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi		586.283.811	158.470.258
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional		(104.480.290)	(209.888.910)
Pajak Penghasilan		(651.664.632)	(1.319.756.959)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>		<u>(14.128.495.940)</u>	<u>(20.059.348.419)</u>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja		35.286.523.882	38.536.851.033
Penerimaan Iuran Sukarela Peserta		-	-
Penerimaan Iuran Normal Peserta		7.300.925.539	7.318.730.081
Penerimaan Iuran Tambahan		116.410.131.624	97.008.443.022
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain		(198.660.127.967)	(179.092.675.790)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<u>(39.662.546.922)</u>	<u>(36.228.651.654)</u>
<b>Peningkatan/(penurunan) Kas Bersih</b>		12.883.373.592	16.449.883
<b>Kas dan Setara Kas pada Awal Periode</b>	2c,2r,3	<b>60.963.315</b>	<b>44.513.432</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode</b>	2c,2r,3	<u><b>12.944.336.907</b></u>	<u><b>60.963.315</b></u>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

**A. Umum**

1. Pembentukan Dana Pensiun Pos Indonesia

Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro didirikan berdasarkan Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H. Nomor 212 tanggal 23 Juli 1988 dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.44/KU.101/MPPT-1988 tanggal 12 Juli 1988 tentang Pembentukan dan Pendirian Badan Pengelola Dana Pensiun/Jaminan Hari Tua Perusahaan Umum Pos dan Giro. Pendirian Yayasan Danpenpos tersebut disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Nomor: S-721/MK-13/1988 tanggal 26 September 1988. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro harus menyesuaikan menjadi Dana Pensiun.

Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro disahkan menjadi Dana Pensiun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-397/KM.17/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Pos Indonesia (Persero).

Dana Pensiun PT Pos Indonesia (Persero) diubah menjadi Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/KM.17/2000 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Pos Indonesia, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-044/KM.5/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 28 September 2018 dengan diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-867/NB.11/2018 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia.

2. Nama Dana Pensiun : Dana Pensiun Pos Indonesia  
Alamat Dana Pensiun : Jl. Tasikmalaya Nomor 1 Bandung 40271  
NPWP : 01.476.503.6-441.000

3. Nama Pendiri dan Kategori Industri  
Pendiri dari Dana Pensiun Pos Indonesia adalah PT Pos Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang Pelayanan Jasa Pos.

4. Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia

- a. Susunan Dewan Pengawas Dapenpos per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ketua	: Tonggo Marbun***)	Ihwan Suryadiyanta
Ketua merangkap Sekertaris	: Aris Yusanto	Aris Yusanto
Anggota mewakili Pensiunan	: Amrizal	Amrizal*)
Anggota mewakili Pegawai	: Odik Sodikin	Odik Sodikin**)

\*) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Pos Indonesia (Persero) SK.1648/Dirut/1020 tanggal 27 Oktober 2020 (Periode: 1 November 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023).

\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Pos Indonesia (Persero) SK.1933/Dirut/1220 tanggal 16 Desember 2020 (Periode: 16 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari 2022).

\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Pos Indonesia (Persero) SK.1966/Dirut/0821 tanggal 30 Agustus 2021 (Periode: 1 September 2021 sampai dengan 30 Agustus 2024).

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

b. Susunan Pengurus Dapenpos per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Direktur Utama	: Bestin Anwar	Bestin Anwar*)
Direktur Investasi dan Umum	: Hari Edi Purwoko	Hari Edi Purwoko**)
Direktur Kepesertaan dan SDM	: Bestin Anwar****)	Hari Edi Purwoko***)

- \*) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Pos Indonesia (Persero) SK.1185/Dirut/0820 tanggal 19 Agustus 2020.  
\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Pos Indonesia (Persero) SK.4001/Dirut/1117 tanggal 28 November 2017.  
\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Pos Indonesia (Persero) SK.1647/Dirut/1020 tanggal 27 Oktober 2020.  
\*\*\*\*) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Pos Indonesia (Persero) SK.2435/Dirut/1121 tanggal 29 November 2021.

5. Jenis Program dan Jumlah Peserta

Dana Pensiun Pos Indonesia menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yaitu Program yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana pensiun. Nilai kewajiban Dana Pensiun Pos Indonesia kepada Peserta dan besarnya kewajiban luran Pendiri secara periodik ditetapkan berdasarkan Valuasi Aktuarial, dengan asumsi-asumsi aktuarial yang telah ditentukan.

Peserta Dapenpos adalah setiap pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun Pos Indonesia pasal 23.

Jumlah Peserta Aktif, Peserta Pasif, dan Pensiun Ditunda yang dikelola Dana pensiun Pos Indonesia posisi per 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

<b>2021</b>				
<b>Golongan</b>	<b>Peserta aktif</b>	<b>Peserta Pasif</b>	<b>Pensiun Ditunda</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan I	686	1.194	163	2.043
Golongan II	3.510	8.711	165	12.386
Golongan III	4.568	10.337	30	14.935
Golongan IV	328	873	1	1.202
<b>Jumlah</b>	<b>9.092</b>	<b>21.115</b>	<b>359</b>	<b>30.566</b>

<b>2020</b>				
<b>Golongan</b>	<b>Peserta aktif</b>	<b>Peserta Pasif</b>	<b>Pensiun Ditunda</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan I	704	1.314	179	2.197
Golongan II	3.784	8.862	205	12.851
Golongan III	5.669	9.638	39	15.346
Golongan IV	438	830	1	1.269
<b>Jumlah</b>	<b>10.595</b>	<b>20.644</b>	<b>424</b>	<b>31.663</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

**B. Kebijakan Akuntansi**

1. Pernyataan Kesesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Laporan keuangan bertujuan khusus telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Laporan keuangan bertujuan khusus Dapenpos disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus, serta disusun dengan dasar nilai perolehan, kecuali untuk investasi tertentu yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Laporan keuangan bertujuan khusus disajikan dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan investasi, operasional, dan pendanaan.

Dalam hal pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bertujuan khusus Dapenpos serta format standar berdasarkan Peraturan di atas tidak mengatur secara khusus mengenai penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa tertentu, Peraturan di atas mengharuskan penyusunan laporan Dapenpos sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2021, laporan keuangan bertujuan khusus terdiri atas laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Bertujuan Khusus.

Di dalam laporan posisi keuangan, selisih antara nilai kini aktuarial dengan aset neto disajikan dalam akun "Selisih Nilai Kini Aktuarial".

2. Penyajian Laporan Keuangan

Nilai wajar

1) Laporan Aset Neto

Laporan Aset Neto adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai aset dari Dana Pensiun dikurangi liabilitas selain nilai kini aktuarial atau liabilitas manfaat pensiun pada tanggal pelaporan.

2) Laporan Perubahan Aset Neto

Adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aset neto yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.

3) Laporan Posisi Keuangan

Adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada saat tertentu yang dapat menggambarkan secara jelas aset dan liabilitas Dana Pensiun.

4) Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha Dana Pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan.

5) Laporan Arus Kas

Adalah laporan yang memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aset neto dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan pengeluaran kas.

6) Catatan atas Laporan Keuangan

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

3. Unsur, Pengakuan, dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain dan disusun berdasarkan basis akrual (*accrual basic*), kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung (*direct method*).

a. Unsur Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Aset

Adalah sumber daya yang dikuasai oleh Entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan masuk Entitas.

2) Liabilitas

Merupakan kewajiban Entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya Entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

3) Aset Neto

Adalah hak residual atas aset Entitas setelah dikurangi semua liabilitas.

4) Penghasilan (*income*)

Adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan aset neto, yang tidak berasal dari kontribusi setoran pendiri yang berasal dari iuran (pemberi kerja dan pekerja).

5) Beban (*expense*)

Merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan aset neto, yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

b. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan atas unsur-unsur laporan keuangan memenuhi kriteria pengakuan umum sebagai berikut:

1) Terdapat kemungkinan besar manfaat ekonomis di masa depan terkait dengan pos tersebut akan masuk atau keluar dari Entitas; dan

2) Biaya atau nilai pos tersebut dapat diukur dengan andal.

Mengacu pada kriteria umum tersebut, unsur-unsur laporan keuangan diakui dengan dasar sebagai berikut:

1) Aset diakui di laporan posisi keuangan ketika ada kemungkinan besar manfaat ekonomis di masa depan akan masuk ke entitas dan aset telah mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal.

2) Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan ketika ada kemungkinan besar terjadi arus keluar atas sumber daya yang memiliki manfaat ekonomis sebagai akibat dari penyelesaian kewajiban masa kini dan jumlah penyelesaian yang akan terjadi dapat diukur dengan andal.

3) Penghasilan diakui di laporan perhitungan hasil usaha ketika terdapat kenaikan manfaat ekonomis di masa depan terkait dengan kenaikan atau penurunan liabilitas yang dapat diukur dengan andal.

4) Beban diakui ketika terjadi penurunan manfaat ekonomis di masa depan terkait dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang dapat diukur dengan andal.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

c. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran atas unsur laporan keuangan agar bisa diakui dan dilaporkan pada umumnya mengacu pada dasar pengukuran biaya historis (*historical cost*), yakni: aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan; liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Kombinasi pengukuran menggunakan dasar yang lain juga dapat diterapkan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PSAK. Dasar pengukuran lain yang dimaksud misalnya:

- Biaya kini (*current cost*).  
Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
- Nilai realisasi/penyelesaian (*net realizable/settlement value*).  
Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
- Nilai sekarang (*present value*).  
Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Posisi keuangan pada saat tertentu yang terdiri dari aset yang dimiliki serta liabilitas yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan Dana Pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas pengukuran setiap aset dan kewajiban tersebut:

1) Investasi

Untuk tujuan penyusunan neraca, investasi dalam bentuk deposito berjangka dinyatakan berdasarkan nilai nominal; adapun saham dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, penyertaan pada saham perusahaan lain, surat pengakuan utang berdasarkan biaya perolehan, untuk kepemilikan tanah dan bangunan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan (lihat catatan B3c9 mengenai metode penyusutan dan umur manfaat aset tetap).

Untuk tujuan penyusunan aset neto dan laporan perubahan aset neto, investasi dinilai sebagai berikut:

- a) tabungan pada bank berdasar nilai nominal;
- b) *deposito on call* pada Bank berdasarkan nilai nominal;
- c) deposito berjangka pada bank berdasarkan nilai nominal;
- d) sertifikat deposito pada bank berdasar nilai tunai;
- e) Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan nilai pasar;

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

- f) Surat Berharga Negara berdasar:
  - (1) Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
  - (2) Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal surat berharga negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- g) Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
- h) obligasi korporasi atau obligasi daerah berdasar:
  - (1) Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
  - (2) Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- i) Reksa Dana yang terdiri dari:
  - (1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham berdasar nilai aktiva bersih;
  - (2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks berdasar nilai aktiva bersih;
  - (3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas berdasar nilai aktiva bersih;
  - (4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
- j) MTN berdasar:
  - (1) nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di OJK; atau
  - (2) nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

- k) efek beragun aset berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia, untuk efek utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- l) dana investasi real estat atau infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar:
  - (1) nilai pasar untuk dana investasi real estat atau infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
  - (2) nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat atau infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- m) kontrak opsi saham dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- n) REPO berdasar biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*);
- o) penyertaan langsung di Indonesia dinilai berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar di OJK dan penyertaan langsung di luar negeri dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang mendapat lisensi dari otoritas dimana penempatan tersebut dilakukan;
- p) Tanah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh penilai independen yang terdaftar di OJK;
- q) Bangunan berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh penilai independen yang terdaftar di OJK.

Selisih positif (negatif) antara nilai wajar dan biaya perolehan dicatat dengan mendebet (mengkredit) akun Selisih Penilaian Investasi (SPI) dan mengkredit (mendebet) akun Selisih Nilai Kini Aktuarial. Akun Selisih Penilaian Investasi di *offset* apabila investasi dijual/ditarik/dilepas.

Di dalam laporan posisi keuangan, selisih antara nilai kini aktuarial dengan aset neto disajikan dalam akun "Selisih Nilai Kini Aktuarial".

2) Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari uang tunai (*cash on hand*), rekening giro bank, dan tabungan yang penggunaannya tidak dibatasi. Setara Kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek (yang jatuh temponya di bawah 3 bulan), dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas dan Setara kas diakui pada saat tersedianya dan diukur sebesar nilai nominal.

3) Piutang Iuran

Piutang Iuran merupakan iuran Dana Pensiun Pos Indonesia yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima pada tanggal laporan posisi keuangan. Piutang Iuran harus dipisahkan antara iuran normal dan iuran tambahan, diakui pada saat kewajiban PT Pos Indonesia timbul dan diukur berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

- 4) Piutang Bunga Keterlambatan Iuran  
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran merupakan bunga atas keterlambatan iuran yang telah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal laporan posisi keuangan. Piutang bunga keterlambatan iuran diakui pada saat terjadinya kewajiban PT Pos Indonesia dan diukur berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Beban Dibayar di Muka  
Beban Dibayar di Muka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayarannya. Diakui saat dilakukan pembayaran di muka dan diukur berdasarkan nilai neto dan atau setelah amortisasi beban yang diakui dengan berjalannya waktu.
- 6) Piutang Investasi  
Piutang Investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya. Piutang Investasi diakui pada saat terjadi pelepasan dan diukur berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 7) Piutang Hasil Investasi  
Piutang Hasil Investasi adalah piutang yang timbul dari pendapatan investasi Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya diukur berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 8) Piutang Lain-lain  
Piutang Lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam pos piutang yang telah disebutkan di atas. Diakui saat terjadinya piutang dan diukur berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 9) Aset Tetap Operasional  
Aset Tetap Operasional diakui pada saat terjadinya transaksi dan diukur berdasarkan biaya perolehannya. Biaya perolehannya adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui.

Biaya perolehan aset diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Entitas; dan
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Penyusutan dilakukan secara terpisah terhadap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya.

Aset tetap investasi/operasional kecuali tanah disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama umur manfaatnya. Taksiran umur manfaat aset tetap investasi/operasional adalah sebagai berikut:

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Umur/Tahun</b>	<b>Tarif %</b>
Bukan Bangunan:		
Kelompok I	4	25%
Kelompok II	8	12,50%
Kelompok III	16	6,25%
Kelompok IV	20	5%
Bangunan:		
Permanen	20	5%
Tidak Permanen	10	10%

Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan jika ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Metode penyusutan direviu setiap akhir tahun buku dan jika terjadi perubahan signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Aset penyusutan direviu atas penurunan nilai dan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

- Dilepaskan; atau
- Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

10) Pembayaran Manfaat Pensiun

Pembayaran Manfaat Pensiun kepada pensiun dicatat pada saat jatuh tempo. Atas manfaat yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal neraca dicatat sebagai Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo yang disajikan pada bagian Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial.

11) Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan pada perhitungan hasil usaha ditentukan berdasarkan hasil usaha kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Dana Pensiun Pos Indonesia tidak melakukan penangguhan pajak (*deferred tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK/2009, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan dari penanaman modal berikut, tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan:

- Bunga, diskonto dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan pada bank indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia.
- Bunga, diskonto dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek Indonesia; atau
- Dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari objek Penghasilan.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

**C. Kebijakan Pendanaan**

1. Ikhtisar Demografi Peserta

Persyaratan kepesertaan adalah setiap pegawai dan calon pegawai PT Pos Indonesia (Persero), berhak menjadi peserta Dana Pensiun Pos Indonesia apabila mengisi formulir pendaftaran sebagai peserta yang disediakan khusus untuk itu dan memuat aturan lain, kesediaan untuk membayar iuran pensiun yang dipotong dari gajinya setiap bulan.

2. Perhitungan Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun adalah pembayaran sejumlah uang secara berkala kepada peserta dan keluarga pada saat dan dengan metode/rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus Manfaat Pensiun ditentukan sebagai berikut:

MP :  $f \times MK \times PhDP$   
MP : Manfaat Pensiun  
f : Faktor Penghargaan  
MK : Masa Kerja  
PhDP : Penghasilan Dasar Pensiun

Faktor penghargaan per tahun masa kerja ditetapkan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh perseratus) dengan maksimum manfaat pensiun adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

3. Kebijakan Pendiri dalam Rangka Pendanaan

Kekayaan awal Dana Pensiun Pos Indonesia berasal dari kekayaan program pensiun yang dikelola Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum Pos dan Giro yang selanjutnya pendanaan dihimpun dari:

- a. Iuran Pemberi Kerja terdiri atas iuran normal dan iuran tambahan
- b. Iuran Peserta Pegawai
- c. Hasil Investasi

4. Valuasi Aktuaria Terakhir

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
a. Nama Aktuaria	: KKA Arya Bagiastra	KKA Enny Diah Awal
b. Tanggal Valuasi	: 31 Desember 2021	31 Desember 2020
c. Nomor Laporan	: 0028/DP/KKA.AB/II/22	20125/DAPENPOS/EP/03/2021
d. Tanggal Laporan	: 18 Februari 2022	9 Maret 2021
e. Asumsi Aktuaria		

Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), menganut prinsip nilai sekarang dari jumlah pembayaran di masa mendatang. Nilai Sekarang ini diperoleh dari penggunaan berbagai asumsi yang tidak hanya terdiri dari tingkat bunga dan inflasi, tetapi termasuk tingkat kematian, cacat, pengunduran diri, dan biaya. Gabungan dari semua faktor dimaksud lazim disebut Nilai Tunai Aktuaria.

Dengan menggunakan asumsi dimaksud, diharapkan pendanaan dari program pensiun akan tetap stabil dan stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan-penyimpangan maka asumsi dimaksud perlu ditinjau kembali.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Asumsi yang digunakan dalam valuasi aktuarial:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Metode Perhitungan	<i>Attained Age Normal</i>	<i>Attained Age Normal</i>
Tingkat Bunga Aktuarial	9,00%	9,00%
Tingkat Kenaikan Penghasil Dasar Pensiun	6,00%	6,00%
Tingkat Kenaikan Manfaat Pensiun per 2 tahun	6,00%	6,00%
Usia Pensiun Normal 56 tahun.	56 tahun	56 tahun
Tabel Mortalita	<i>150% Annuity Mortality Table 1949</i>	<i>150% Annuity Mortality Table 1949</i>
Tingkat Cacat	10,00%	10,00%
Tingkat Pengunduran diri Peserta	10,00% per tahun untuk Peserta berusia 20 tahun dan menurun secara proposional sampai 0% pada usia 56 tahun	10,00% per tahun untuk Peserta berusia 20 tahun dan menurun secara proposional sampai 0% pada usia 56 tahun
Biaya pengelolaan	10% dari iuran normal	10% dari iuran normal dan 1% dari kewajiban
Beda Usia Peserta dengan Suami atau Istri	3 Tahun	3 Tahun
Iuran Peserta	5,00%	5,00%
Pajak Manfaat Pensiun	sesuai tarif PPh pasal 21	sesuai tarif PPh pasal 21

f.	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Nilai Kewajiban Solvabilitas sebesar :	2.414.206.171.443	2.349.573.234.524
Nilai Kewajiban Aktuarial sebesar :	2.595.524.307.419	2.754.752.093.699
Nilai Kekayaan Pendanaan sebesar :	1.971.972.162.827	1.897.469.436.151
Defisit/(Surplus) :	623.552.144.592	857.282.657.548
Kekurangan Solvabilitas :	442.234.008.617	452.103.798.373
Defisit Selain Kekurangan Solvabilitas :	181.318.135.975	405.178.859.175
Rasio Pendanaan :	75,98%	68,88%
Rasio Solvabilitas :	81,68%	80,76%
Kualitas Pendanaan :	Tingkat III	Tingkat III

Defisit di atas wajib dipenuhi oleh Pemberi Kerja melalui Iuran Tambahan. Untuk memenuhi pendanaan atas defisit yang terjadi, Pemberi Kerja wajib melakukan pendanaan dan berangsur angsur mencapai dana terpenuhi. Pemenuhan defisit dilakukan dengan pembayaran Iuran Tambahan. Pembayaran Iuran Tambahan dilakukan tidak dengan besaran yang sama untuk setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi keuangan dan rencana bisnis Pemberi Kerja. Jangka waktu pembayaran Iuran Tambahan untuk kekurangan solvabilitas baru, kami jadwalkan dicicil selama 60 bulan. Hal ini melihat dari analisis Laporan Keuangan Perusahaan yang masih mengalami kesulitan keuangan sampai dengan akhir tahun 2021.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

- g. Besar iuran
- 1) Iuran Peserta : 5,00 % x Penghasilan Dasar Pensiun
- 2) Iuran Pemberi Kerja : 23,96% x Penghasilan Dasar Pensiun
- h. Pendanaan program pensiun diperlukan adanya iuran tambahan untuk tahun 2021 sebesar Rp10.828.171.855 dan tahun 2020 sebesar Rp9.978.011.282 per bulan dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2021</b>
1) Kekurangan Solvabilitas	
Bulan ke 1 - 12	9.039.701.559
Bulan ke 13 - 24	9.039.701.559
Bulan ke 25 - 36	9.039.701.559
Bulan ke 37 - 48	9.039.701.559
Bulan ke 49 - 60	9.039.701.559
2) Kekurangan Selain Kekurangan Solvabilitas	
Bulan ke 1 - 12	1.788.470.296
Bulan ke 13 - 24	1.788.470.296
Bulan ke 25 - 36	1.788.470.296
Bulan ke 37 - 48	1.788.470.296
Bulan ke 49 - 60	1.788.470.296
Bulan ke 61 - 72	1.788.470.296
Bulan ke 73 - 84	1.788.470.296
Bulan ke 85 - 96	1.788.470.296
Bulan ke 97 - 108	1.788.470.296
Bulan ke 109 - 120	1.788.470.296
Bulan ke 121 - 132	1.788.470.296
Bulan ke 132 - 144	1.788.470.296
Bulan ke 145 - 156	1.788.470.296
Bulan ke 157 - 168	1.788.470.296
Bulan ke 169 - 180	1.788.470.296
	<b>2020</b>
1) Kekurangan Solvabilitas	
Bulan ke 1 - 12	7.035.806.194
Bulan ke 13 - 24	9.762.222.079
Bulan ke 25 - 36	19.325.618.275
Bulan ke 37 - 48	8.295.272.399
Bulan ke 49 - 60	730.813.629
2) Kekurangan Selain Kekurangan Solvabilitas	
Bulan ke 1 - 12	2.942.205.088
Bulan ke 13 - 24	2.942.205.088
Bulan ke 25 - 36	6.999.225.036
Bulan ke 37 - 48	6.999.255.036
Bulan ke 49 - 60	6.999.255.036
Bulan ke 61 - 72	6.617.292.887
Bulan ke 73 - 84	6.617.292.887
Bulan ke 85 - 96	6.251.772.457
Bulan ke 97 - 108	5.369.365.018
Bulan ke 109 - 120	5.369.365.018
Bulan ke 121 - 132	3.997.614.582

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

5. Posisi Kekayaan dan Kewajiban dari Dana Pensiun Pos Indonesia per 31 Desember 2021

Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Dana Pensiun Pos Indonesia per 31 Desember 2021 Jumlah kekayaan sebesar Rp1.971.972.162.827 sedangkan kewajiban Aktuarial berdasarkan proyeksi untuk akhir periode 31 Desember 2021 sebesar Rp2.595.524.307.419.

Dengan membandingkan jumlah kekayaan dan kewajiban tersebut di atas bahwa posisi pendanaan per 31 Desember 2021 masih terdapat defisit sebesar Rp623.552.144.592 dengan Tingkat Rasio Pendanaan sebesar 75,98% masih berada pada Golongan Tingkat III (Tingkat Ketiga) di mana besarnya kekayaan kurang dari kewajiban solvabilitas dan kewajiban aktuarial.

6. Iuran Tahun 2021 (Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021)

a. Iuran Pemberi Kerja

Tagihan Iuran Normal Pemberi Kerja untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 setiap bulan sudah didasarkan pada data PhDP dari SIM SDM PT Pos Indonesia (Persero) yang sudah terintegrasi dengan SIDPA Dapenpos dan telah terimplementasi 100%.

Sedangkan untuk tagihan Iuran Tambahan berdasarkan hasil valuasi aktuarial per 31 Desember 2021 Rp10.828.171.855 dan 2020 sebesar Rp9.978.011.282.

Penagihan Iuran kepada Pemberi Kerja di atas sudah sesuai dengan Pedoman Pelayanan Kepesertaan tentang Iuran poin h Nomor: 95/SK/DIRUT/0914 tanggal 1 September 2014 yang merupakan perubahan dari Nomor: 09/DIRUT/SK/2008 tanggal 26 Februari 2008.

b. Iuran Peserta

Penerimaan Iuran Peserta setiap bulan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sudah 100% berdasarkan data PhDP dari SIM SDM PT Pos Indonesia (Persero) yang sudah terintegrasi dengan SIDPA Dapenpos dan telah terimplementasi 100%.

**D. Kebijakan Investasi**

1. Jenis, Batasan, dan Target Investasi

Kebijakan Dana Pensiun Pos Indonesia dituangkan dalam Arahkan Investasi Nomor: KD.021/DIRUT/0221 tanggal 1 Februari 2021 yang berlaku terhitung mulai tanggal penetapan tanggal 1 Februari 2021 dan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang investasi Dana Pensiun kecuali Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, dengan isi kebijakan sebagai berikut:

- a. Tabungan pada Bank;
- b. Deposito *on Call* pada Bank;
- c. Deposito berjangka pada Bank;
- d. Sertifikat deposito pada Bank;
- e. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- f. Surat Berharga Negara;

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

- g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- h. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
- i. Reksa Dana yang terdiri dari:
  - 1) Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham;
  - 2) Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;
  - 3) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas; dan/atau
  - 4) Reksa Dana yang Saham atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- j. *Medium Term Notes* (MTN);
- k. Efek Beragun Aset;
- l. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- m. Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- n. *Repurchase Agreement* (REPO);
- o. Penyertaan langsung di Indonesia;
- p. Tanah di Indonesia;
- q. Bangunan di Indonesia;
- r. Obligasi daerah; dan/atau
- s. Dana Investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

Jenis investasi Dapenpos di atas, termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah jika terdapat jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

Lihat catatan B3.c1 mengenai dasar penilaian untuk setiap jenis investasi dana pensiun.

Batasan untuk setiap jenis investasi Dana Pensiun Pos Indonesia dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu:

- 1) Batasan secara kuantitatif untuk setiap jenis investasi Dapenpos diatur sebagai berikut:

JENIS INVESTASI	BATASAN KUANTITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
a. Tabungan pada Bank	a.1.1. Maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos; a.1.2. Per pihak maksimal 4% dari jumlah investasi Dapenpos.	a.2.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dana Pensiun; a.2.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
b. Deposito on call pada Bank	b.1.1. Maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos; b.1.2. Per pihak maksimal 4% dari jumlah investasi Dapenpos.	b.2.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dana Pensiun; b.2.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
c. Deposito Berjangka pada Bank	c.1.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dapenpos;	c.2.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dana Pensiun;
	c.1.2. Per pihak maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos.	c.2.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

JENIS INVESTASI	BATASAN KUANTITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
d. Sertifikat Deposito pada Bank	d.1.1. Maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos; d.1.2. Per pihak maksimal 2% dari jumlah investasi Dapenpos.	d.2.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dana Pensiun; d.2.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	Maksimal 20% dari jumlah investasi Deposito.	e.2.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dana Pensiun; e.2.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
f. Surat Berharga Negara	f.1.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dapenpos; f.1.2. Minimal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan diterbitkan oleh OJK.	Maksimal 100% dari jumlah investasi Dana Pensiun;
g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	g.1.1. Maksimal 25% dari jumlah investasi Dapenpos; g.1.2. Per pihak maksimal 6% dari jumlah investasi Dapenpos.	e.2.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dana Pensiun; e.2.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
h. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	h.1.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dapenpos; h.1.2. Per pihak maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos.	h.2.1. Maksimal 100% dari jumlah investasi Dana Pensiun; h.2.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
i. Reksa Dana yang terdiri dari :  i.1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham;	Penempatan dalam bentuk Reksa Dana jumlah maksimal seluruhnya 20% dari jumlah investasi Dapenpos.  i.1. Per pihak (yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama) maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos.	i.i. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun;  i.ii. Investasi dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas maksimal 10% dari jumlah investasi Dana Pensiun.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

JENIS INVESTASI	BATASAN KUANTITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
i.2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;	i.2. Per pihak (yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama) maksimal 20% dari Jumlah Investasi Dapenpos.	
i.3. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;	i.3. Maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos.	
i.4. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;	i.4. Per pihak (yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama) maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos.	
j. MTN	j.1.1. Maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos; j.1.2. Per jenis maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos; j.1.3. Per pihak maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos; j.1.4. Per MTN maksimal 10% dari jumlah emisi MTN.	j.2.1. Maksimal 10% dari jumlah investasi Dana Pensiun; j.2.2. Per pihak maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos; j.2.3. Per MTN maksimal 10% dari jumlah emisi MTN.
k. Efek Beragun Aset	k.1.1. Maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos; k.1.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos.	Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
l. Dana Investasi Real Estant Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	l.1.1. Maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos; l.1.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos.	Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
m. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	Maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos.	Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

JENIS INVESTASI	BATASAN KUANTITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
n. Repo	n.1.1. Per <i>counterparty</i> maksimal 1% dari jumlah investasi Dapenpos; n.1.2. Jumlah seluruhnya maksimal 2% dari jumlah investasi Dapenpos; n.1.3. Per pihak maksimum 20% dari jumlah investasi Dapenpos.	n.2.1. Per <i>counterparty</i> maksimal 2% dari jumlah investasi Dapenpos; n.2.2. Jumlah seluruhnya maksimal 5% dari jumlah investasi Dapenpos. n.2.3. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
o. Penyertaan Langsung di Indonesia	o.1.1. Untuk Penyertaan Langsung di dalam negeri maksimal sebesar 15% dari jumlah investasi Dapenpos; o.1.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos;	o.2.1. Maksimal 15% dari jumlah investasi Dana Pensiun untuk penyertaan langsung di dalam negeri; o.2.2. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun;
p. Tanah di Indonesia dan/atau Bangunan di Indonesia	Maksimal 15% dari jumlah investasi Deposito.	Maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
q. Obligasi Daerah	q.1.1. Setiap emiten maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos. q.1.2. Jumlah seluruhnya maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos. q.1.3. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos.	q.2.1. Setiap emiten maksimal 10% dari jumlah investasi Dana Pensiun. q.2.2. Jumlah seluruhnya maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun. q.2.3. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
r. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	r.1.1. Untuk setiap Manajer Investasi maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos. r.1.2. Jumlah seluruhnya maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos. r.1.3. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dapenpos.	r.2.1. Untuk setiap Manajer Investasi maksimal 10% dari jumlah investasi Dana Pensiun. r.2.2. Jumlah seluruhnya maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun. r.2.3. Per pihak maksimal 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Realisasi jumlah penempatan investasi Dapenpos pada suatu jenis investasi dilarang melewati/melebihi ketentuan batasan maksimal kuantitatif sebagaimana tersebut pada tabel lajur kolom Pendiri.

Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak/per Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, huruf k, dan huruf l Pasal ini untuk Reksa Dana, Efek Beragun Aset, dan/atau Dana Investasi Real Estat berbentuk kontrak investasi kolektif adalah penyertaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset, dan/atau Dana Investasi Real Estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

- 2) Batasan secara kualitatif untuk setiap jenis investasi Dapenpos diatur sebagai berikut :

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
a. Tabungan pada Bank	Ditempatkan pada kantor cabang Bank berkedudukan sekota dengan tempat kedudukan Dapenpos dan kantor cabang Bank tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri terpisah dengan kantor pusatnya.	
b. Deposito <i>On Call</i> pada Bank	Ditempatkan pada kantor cabang Bank berkedudukan sekota dengan tempat kedudukan Dapenpos dan kantor cabang Bank tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri terpisah dengan kantor pusatnya.	
c. Deposito Berjangka pada Bank	Ditempatkan pada kantor cabang Bank berkedudukan sekota dengan tempat kedudukan Dapenpos dan kantor cabang Bank tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri terpisah dengan kantor pusatnya.	
d. Sertifikat Deposito pada Bank	Ditempatkan pada kantor cabang Bank berkedudukan sekota dengan tempat kedudukan Dapenpos dan kantor cabang Bank tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri terpisah dengan kantor pusatnya.	

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	Tidak diatur	
f. Surat Berharga Negara	Tidak diatur	
g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	Tercatat sebagai konstituante indeks Kompas 100 dan/atau LQ45 yang sedang berlaku.	
h. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	Memiliki <i>rating</i> sekurang-kurangnya satu tingkat diatas peringkat terendah dalam kelompok <i>rating Investment grade</i> yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkatan efek bertalian yang telah mendapat izin usaha dari OJK.	Memiliki peringkat <i>Investment grade</i> yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
i. Reksa Dana yang terdiri dari: a. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham; b. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;	a. <i>Asset Under Management</i> (AUM) Manajer Investasi reksa dana bertalian minimal sebesar Rp2 (dua) triliun; b. Ranking <i>Asset Under Management</i> (AUM) untuk masing-masing jenis reksa dana bertalian masuk dalam kelompok 45 (empat puluh lima) besar nasional selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir; ketentuan ini tidak berlaku untuk investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (RDPT) dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).	Syarat Dana Pensiun untuk investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (RDPT) : a. Dana pensiun dengan jumlah investasi paling sedikit Rp500 miliar. b. Memiliki manajemen risiko yang memadai;

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
<p>c. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas</p> <p>d. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;</p>	<p>c. Proporsi penempatan dana Dapenpos pada suatu produk reksa dana tidak melebihi 20% dari nilai <i>Asset Under Management</i> (AUM) reksa dana bertalian;</p> <p>d. Syarat Dapenpos untuk investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (RDPT), dalam hal ini termasuk dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) :</p> <p>d.1. Jumlah total dana investasi Dapenpos paling sedikit telah mencapai Rp500 miliar,</p> <p>d.2. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah,</p> <p>d.3. Memiliki manajemen risiko yang memadai,</p> <p>d.4. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin OJK.</p>	<p>c. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.</p>
j. MTN	<p><b>Kriteria MTN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;</li> <li>2. Memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;</li> <li>3. Memiliki peringkat investment grade minimal A, peringkat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.</li> </ol>	<p><b>Kriteria MTN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;</li> <li>2. Memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;</li> <li>3. Memiliki peringkat investment grade minimal A, peringkat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.</li> </ol>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
	<p><b>Syarat Dapenpos untuk investasi pada MTN :</b></p> <p>a. Jumlah total dana investasi Dapenpos paling sedikit telah mencapai Rp500 miliar;</p> <p>b. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;</p> <p>c. Memiliki manajemen risiko yang memadai;</p> <p>d. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin OJK.</p>	<p><b>Syarat Dana Pensiun untuk investasi pada MTN :</b></p> <p>a. Dana pensiun dengan jumlah investasi paling sedikit Rp500 miliar;</p> <p>b. Memiliki manajemen risiko yang memadai;</p> <p>c. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.</p>
k. Efek Beragun Aset	<p>1. Tercatat di Bursa Efek di Indonesia;</p> <p>2. Memiliki peringkat investment grade minimal A, peringkat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;</p> <p>3. Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>	<p>1. Tercatat di Bursa Efek di Indonesia;</p> <p>2. Memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;</p> <p>3. Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>
l. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.	Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
m. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.	<p>1. Terlebih dahulu wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi;</p> <p>2. Dilarang untuk tujuan spekulasi;</p> <p>3. Wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang dimiliki Dapenpos.</p>	<p>1. Terlebih dahulu wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi;</p> <p>2. Dilarang untuk tujuan spekulasi;</p> <p>3. Wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang dimiliki Dapenpos.</p>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
n. Repo	<p><b>Kriteria Repo :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;</li> <li>2. Jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade minimal A yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;</li> <li>3. Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;</li> <li>4. Nilai Repo paling banyak 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijamin;</li> <li>5. Transaksi Repo terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4).</li> </ol> <p><b>Syarat Dapenpos untuk investasi pada Repo :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah total dana investasi Dapenpos paling sedikit telah mencapai Rp500 miliar;</li> <li>b. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;</li> <li>c. Memiliki manajemen risiko yang memadai;</li> <li>d. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin OJK.</li> </ol>	<p><b>Kriteria Repo :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;</li> <li>2. Jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade minimal A yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;</li> <li>3. Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;</li> <li>4. Nilai Repo paling banyak 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijamin;</li> <li>5. Transaksi Repo terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4).</li> </ol> <p><b>Syarat Dana Pensiun untuk investasi pada Repo :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dana pensiun dengan jumlah investasi paling sedikit Rp500 miliar;</li> <li>b. Memiliki manajemen risiko yang memadai;</li> <li>c. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.</li> </ol>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>BATASAN KUALITATIF</b>	
	<b>PENDIRI DAPENPOS</b> <b>Nomor: KD.021/DIRUT/0221</b> (% maksimal)	<b>POJK Nomor: 29/POJK.05/2018</b> <b>juncto</b> <b>Nomor: 3/POJK.05/2015</b> (% maksimal)
o. Penyertaan Langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri	<p><b>O.1. Penyertaan Langsung di Indonesia :</b></p> <p>a. Dilakukan pada badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri dengan ketentuan Perusahaan tidak sedang dalam perkara di Pengadilan;</p> <p>b. Diizinkan melebihi 15% dari Jumlah Investasi Dapenpos apabila penyertaan langsung pada perseroan terbatas bergerak di bidang jasa keuangan dan terlebih dahulu disetujui OJK;</p> <p>c. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun yang dapat melakukan penyertaan melebihi 15% diatur dalam Surat Edaran OJK .</p> <p><b>O.2. Penyertaan langsung di luar negeri :</b></p> <p>a. 5% dari Jumlah Investasi Dapenpos;</p> <p>b. Terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;</p> <p>c. Diperhitungkan sebagai kekayaan untuk pendanaan Dapenpos;</p> <p>d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penyertaan langsung diatur dalam Surat Edaran OJK.</p>	<p><b>O.1. Penyertaan Langsung di Indonesia :</b></p> <p>a. Dilakukan pada badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia;</p> <p>b. Diizinkan melebihi 15% dari jumlah investasi Dana Pensiun apabila penyertaan langsung pada perseroan terbatas bergerak di bidang jasa keuangan dan terlebih dahulu disetujui OJK;</p> <p>c. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun yang dapat melakukan penyertaan melebihi 15% diatur dalam Surat Edaran OJK.</p>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>BATASAN KUALITATIF</b>	
	<b>PENDIRI DAPENPOS</b> <b>Nomor: KD.021/DIRUT/0221</b> (% maksimal)	<b>POJK Nomor: 29/POJK.05/2018</b> <b>juncto</b> <b>Nomor: 3/POJK.05/2015</b> (% maksimal)
	<p><b>O.3.</b> Ketentuan mengenai batasan per pihak tidak berlaku bagi penyertaan (di dalam maupun luar negeri) pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan.</p> <p><b>O.4.</b> Apabila sebagai pemegang saham terbesar atau paling sedikit memiliki 25% saham maka Dapenpos wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:</p> <p>a. Menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan;</p> <p>b. Mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.</p> <p><b>O.5.</b> Dalam hal kepemilikan saham Dapenpos tidak melebihi 50%, hak Dapenpos sebagaimana dimaksud Huruf a dan Huruf b butir O.4 wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.</p> <p><b>O.6.</b> Penempatan Langsung Saham hanya dapat dilakukan pada:</p> <p>a. Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan Dapenpos;</p>	<p><b>O.3.</b> Ketentuan mengenai batasan per pihak tidak berlaku bagi penyertaan (di dalam maupun luar negeri) pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan.</p> <p><b>O.4.</b> Apabila sebagai pemegang saham terbesar atau paling sedikit memiliki 25% saham maka Dapenpos wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:</p> <p>a. Menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan;</p> <p>b. Mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.</p> <p><b>O.5.</b> Dalam hal kepemilikan saham Dapenpos tidak melebihi 50%, hak Dapenpos sebagaimana dimaksud Huruf a dan Huruf b butir O.4 wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.</p> <p><b>O.6.</b> Penempatan Langsung Saham hanya dapat dilakukan pada:</p> <p>a. Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan Dapenpos;</p>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>BATASAN KUALITATIF</b>	
	<b>PENDIRI DAPENPOS</b> <b>Nomor: KD.021/DIRUT/0221</b> (% maksimal)	<b>POJK Nomor: 29/POJK.05/2018</b> <b>juncto</b> <b>Nomor: 3/POJK.05/2015</b> (% maksimal)
	b. Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dapenpos.	b. Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dapenpos.
p. Tanah di Indonesia; dan/atau Banguna di Indonesia	<p>1. Dilengkapi sertifikat atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dapenpos; dan</p> <p>2. Memberikan penghasilan ke Danpenpos atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku serta transaksi tersebut didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris atau sekurang-kurangnya pada dokumen perjanjian dilakukan waarmeding oleh notaris;</p> <p>3. Dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa dan/atau diblokir pihak lain.</p>	<p>1. Dilengkapi sertifikat atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan</p> <p>2. Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku serta transaksi tersebut didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris;</p> <p>3. Dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa dan/atau diblokir pihak lain.</p>
q. Obligasi Daerah	<p>q.1.1. Telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;</p> <p>q.1.2. Memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.</p>	<p>q.2.1. Telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;</p> <p>q.2.2. Memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.</p>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS Nomor: KD.021/DIRUT/0221 (% maksimal)	POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 juncto Nomor: 3/POJK.05/2015 (% maksimal)
r. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif		r.2.1. Diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK.  r.2.2. Diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK.  r.2.3. Memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.  r.2.4. Aset Infrastruktur yang telah menghasilkan pendapatan.

Realisasi penempatan investasi Dapenpos pada suatu jenis investasi dilarang melanggar ketentuan batasan secara kualitatif sebagaimana tersebut di atas pada tabel lajur kolom Pendiri.

2. Sasaran Hasil Investasi

Tingkat Hasil Investasi *Return on Investment* (ROI) Dapenpos yang harus dicapai oleh Pengurus selama 1 (satu) tahun buku dalam keadaan normal dan terkendali adalah minimal sebesar 8% dari nilai wajar investasi.

Dalam hal terjadi Risiko Sistematis yang berpengaruh terhadap capaian tingkat hasil investasi sebagaimana dimaksud, Pengurus wajib menyampaikan alasan terhadap kondisi tidak tercapainya sasaran hasil investasi.

Metode perhitungan dalam rangka menghitung tingkat imbal hasil investasi diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Hasil Investasi}}{\text{Nilai wajar rata-rata investasi}}$$

Di mana nilai rata-rata investasi diformulasikan sebagai berikut :

$$G = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$$

dengan keterangan :

G = Rata-rata ukur geometrik

X = Nilai investasi pada akhir bulan

N = Jumlah bulan (maksimal 12 bulan)

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

3. Ketentuan Likuiditas Minimum Portofolio Investasi
  - a. Pengurus wajib menjaga likuiditas minimum portofolio investasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya 2% dari jumlah investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana untuk pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional Dapenpos.
  - b. Jenis investasi yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas minimum adalah Deposito on Call, Deposito Berjangka, Obligasi dan Surat Berharga Negara dengan sisa waktu maksimum 1 (satu) bulan.
4. Lihat catatan B3.c1 untuk dasar Penilaian Jenis Investasi Dana
5. Klasifikasi Surat Berharga Negara dan Obligasi korporat dari *Held to Maturity* (kelompok dimiliki hingga jatuh tempo) menjadi Nilai Penebusan Akhir.

Pada tahun 2012 Dana Pensiun Pos Indonesia telah melakukan perubahan klasifikasi Surat Berharga Negara dan Obligasi korporat dari *Held to Maturity* (kelompok dimiliki hingga jatuh tempo) menjadi Nilai Penebusan Akhir dengan menggunakan perhitungan metode bunga efektif. Perubahan klasifikasi tersebut mengacu pada risalah rapat Komite Investasi Dapenpos tanggal 21 Desember 2012 dan sampai dengan saat ini, sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Regulator bahwa surat berharga yang memiliki nilai penebusan akhir tersebut harus dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun atau bagian spesifik dari program pensiun.

Metode perhitungan bunga efektif menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Coupon} + \frac{\text{Par} - \text{market price}}{\text{maturity}}}{\frac{\text{Par} + \text{market price}}{2}}$$

Coupon	=	Kupon bunga surat berharga pada saat beli
Par	=	Nilai obligasi saat IPO (100%)
Market price	=	Harga pasar surat berharga pada saat beli
Maturity	=	Jatuh tempo surat berharga

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

6. Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi yang dikelompokkan Amortized Cost untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
- a. Perbandingan nilai nominal dan nilai wajar SBN posisi 31 Desember 2021 yang disajikan per tahun jatuh tempo dengan klasifikasi Amortized Cost yang dipadukan dengan pembayaran kewajiban manfaat pensiun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2044, adalah sebagai berikut:

NO	Tahun Jatuh Tempo	Posisi Per 31 Desember 2021 SBN ( <i>Amortized Cost</i> )		Pembayaran Manfaat Pensiun
		Nilai Nominal	Nilai wajar	
1	2021	-	-	197.142.143.067
2	2022	-	-	222.189.991.494
3	2023	-	-	236.047.859.869
4	2024	10.000.000.000	9.953.882.974	264.561.951.276
5	2025	20.000.000.000	20.292.251.366	276.203.038.816
6	2026	10.000.000.000	9.899.593.049	302.466.050.752
7	2027	10.000.000.000	10.264.636.390	383.488.855.476
8	2028	-	-	412.205.489.209
9	2029	15.000.000.000	14.926.737.890	415.505.578.147
10	2030	25.000.000.000	26.146.376.347	442.091.903.088
11	2031	-	-	443.276.067.646
12	2032	-	-	470.948.467.006
13	2033	-	-	472.013.265.316
14	2034	40.000.000.000	39.202.919.792	501.396.996.773
15	2035	-	-	502.008.616.199
16	2036	-	-	532.680.998.985
17	2037	-	-	533.030.865.334
18	2038	5.000.000.000	5.314.347.643	565.262.114.865
19	2039	-	-	565.483.328.066
20	2040	-	-	599.551.270.300
21	2041	-	-	599.629.962.411
22	2042	-	-	635.745.083.616
23	2043	-	-	635.908.624.045
24	2044	4.173.000.000	4.052.704.174	674.165.771.339
	<b>Total</b>	<b>139.173.000.000</b>	<b>140.053.449.625</b>	<b>10.883.004.293.095</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

- b. Perbandingan nilai nominal dan nilai wajar Obligasi posisi 31 Desember 2021 yang disajikan per tahun jatuh tempo dengan klasifikasi Amortized Cost yang dipadukan dengan pembayaran kewajiban manfaat pensiun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2044, adalah sebagai berikut:

NO	Tahun Jatuh Tempo	Posisi Per 31 Desember 2021 Obligasi ( <i>Amortized Cost</i> )		Pembayaran Manfaat Pensiun
		Nilai Nominal	Nilai wajar	
1	2021	-	-	197.142.143.067
2	2022	30.000.000.000	29.975.416.451	222.189.991.494
3	2023	-	-	236.047.859.869
4	2024	28.000.000.000	28.000.000.000	264.561.951.276
5	2025	40.000.000.000	40.000.000.000	276.203.038.816
6	2026	26.000.000.000	26.000.000.000	302.466.050.752
7	2027	20.000.000.000	20.000.000.000	383.488.855.476
8	2028	-	-	412.205.489.209
9	2029	-	-	415.505.578.147
10	2030	40.000.000.000	40.000.000.000	442.091.903.088
11	2031	-	-	443.276.067.646
12	2032	-	-	470.948.467.006
13	2033	-	-	472.013.265.316
14	2034	-	-	501.396.996.773
15	2035	-	-	502.008.616.199
16	2036	-	-	532.680.998.985
17	2037	-	-	533.030.865.334
18	2038	-	-	565.262.114.865
19	2039	-	-	565.483.328.066
20	2040	-	-	599.551.270.300
21	2041	-	-	599.629.962.411
22	2042	-	-	635.745.083.616
23	2043	-	-	635.908.624.045
24	2044	-	-	674.165.771.339
	<b>Total</b>	<b>184.000.000.000</b>	<b>183.975.416.451</b>	<b>10.883.004.293.095</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

- c. Rekapitulasi perbandingan nilai wajar SBN dan Obligasi posisi 31 Desember 2021 yang disajikan per tahun jatuh tempo dengan klasifikasi Amortized Cost yang dipadukan dengan pembayaran kewajiban manfaat pensiun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2044, adalah sebagai berikut:

NO	Tahun Jatuh Tempo	Periode Jatuh Tempo Kelompok Amortized Cost (Nilai Wajar)			Pembayaran Manfaat Pensiun
		SBN	Obligasi	Total	
1	2021	-	-	-	197.142.143.067
2	2022	-	29.975.416.451	29.975.416.451	222.189.991.494
3	2023	-	-	-	236.047.859.869
4	2024	9.953.882.974	28.000.000.000	37.953.882.974	264.561.951.276
5	2025	20.292.251.366	40.000.000.000	60.292.251.366	276.203.038.816
6	2026	9.899.593.049	26.000.000.000	35.899.593.049	302.466.050.752
7	2027	10.264.636.390	20.000.000.000	30.264.636.390	383.488.855.476
8	2028	-	-	-	412.205.489.209
9	2029	14.926.737.890	-	14.926.737.890	415.505.578.147
10	2030	26.146.376.347	40.000.000.000	66.146.376.347	442.091.903.088
11	2031	-	-	-	443.276.067.646
12	2032	-	-	-	470.948.467.006
13	2033	-	-	-	472.013.265.316
14	2034	39.202.919.792	-	39.202.919.792	501.396.996.773
15	2035	-	-	-	502.008.616.199
16	2036	-	-	-	532.680.998.985
17	2037	-	-	-	533.030.865.334
18	2038	5.314.347.643	-	5.314.347.643	565.262.114.865
19	2039	-	-	-	565.483.328.066
20	2040	-	-	-	599.551.270.300
21	2041	-	-	-	599.629.962.411
22	2042	-	-	-	635.745.083.616
23	2043	-	-	-	635.908.624.045
24	2044	4.052.704.174	-	4.052.704.174	674.165.771.339
	<b>Total</b>	<b>140.053.449.625</b>	<b>183.975.416.451</b>	<b>324.028.866.076</b>	<b>10.883.004.293.095</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

- d. Perbandingan nilai nominal SBN dan Obligasi Korporat yang disajikan pada periode jatuh tempo dengan klasifikasi Amortized Cost yang dipadukan dengan pembayaran kewajiban manfaat pensiun periode yang bertalian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2044, adalah sebagai berikut:

NO	Tahun Jatuh Tempo	Periode Jatuh Tempo Kelompok Amortized Cost (Nilai Nominal)			Pembayaran Manfaat Pensiun
		SBN	Obligasi	Total	
1	2021	-	-	-	197.142.143.067
2	2022	-	-	-	222.189.991.494
3	2023	-	-	-	236.047.859.869
4	2024	10.000.000.000	-	10.000.000.000	264.561.951.276
5	2025	20.000.000.000	-	20.000.000.000	276.203.038.816
6	2026	10.000.000.000	-	10.000.000.000	302.466.050.752
7	2027	10.000.000.000	-	10.000.000.000	383.488.855.476
8	2028	-	-	-	412.205.489.209
9	2029	15.000.000.000	-	15.000.000.000	415.505.578.147
10	2030	25.000.000.000	-	25.000.000.000	442.091.903.088
11	2031	-	-	-	443.276.067.646
12	2032	-	-	-	470.948.467.006
13	2033	-	-	-	472.013.265.316
14	2034	40.000.000.000	-	40.000.000.000	501.396.996.773
15	2035	-	-	-	502.008.616.199
16	2036	-	-	-	532.680.998.985
17	2037	-	-	-	533.030.865.334
18	2038	5.000.000.000	-	5.000.000.000	565.262.114.865
19	2039	-	-	-	565.483.328.066
20	2040	-	-	-	599.551.270.300
21	2041	-	-	-	599.629.962.411
22	2042	-	-	-	635.745.083.616
23	2043	-	-	-	635.908.624.045
24	2044	4.173.000.000	-	4.173.000.000	674.165.771.339
	<b>Total</b>	<b>139.173.000.000</b>	<b>-</b>	<b>139.173.000.000</b>	<b>10.883.004.293.095</b>

Dari rincian tabel di atas untuk pembayaran manfaat pensiun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2044 dipenuhi dari total surat berharga yang dimiliki dan diklasifikasikan sebagai Amortized Cost, apabila jumlah surat berharga tersebut nilainya lebih kecil dari kewajiban manfaat pensiun maka kewajiban tersebut akan dipenuhi dari sumber lainnya.

Penempatan investasi pada SBN dan Obligasi yang dikelompokkan sebagai nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (amortized cost) dan memiliki nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) SBN dan Obligasi yang jatuh tempo akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

- 2) Apabila nilai jatuh tempo dari SBN dan Obligasi belum mencukupi untuk menutupi kewajiban manfaat pensiun setiap bulannya maka kekurangan nilai jatuh tempo tersebut akan dipenuhi dari :
  - a) Luran jatuh tempo.
  - b) Jenis investasi yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas minimum yaitu deposito berjangka (breakable) yang disediakan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan operasional Dana Pensiun.
- 3) Penggunaan Bank dan Perusahaan Efek
  - a) Penempatan Investasi pada Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito wajib ditempatkan pada Bank Umum yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti ketentuan CAMEL, yaitu kecukupan modal setor (CAR), Kualitas Aset (A), Kualitas Manajemen/tata kelola prima (M), Ekuitas (E) dan Likuiditas (L).
  - b) Bank Umum sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Bank yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dapat berstatus Bank BUMN/BUMD, Swasta Nasional/Asing atau Bank Syariah dan lebih diutamakan yang sudah menjadi perusahaan terbuka (go public).
  - c) Dalam hal tidak ada Bank yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pengurus diperbolehkan menempatkan Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito pada bank-bank yang paling mendekati persyaratan tersebut dengan prioritas pada Bank-Bank BUMN/BUMD yang berkedudukan di kota Bandung.
- 4) Seluruh Investasi Dapenpos yang ditempatkan pada:
  - a) Semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
  - b) Penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan/atau
  - c) Tanah dan/atau bangunan di Indonesia.Dilarang melebihi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos namun ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Dapenpos memiliki penyertaan langsung di Indonesia pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan.
- 5) Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif kecuali:
  - a) Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
  - b) Instrumen derivatif tersebut diperoleh Dapenpos sebagai instrumen yang melekat pada Surat Berharga Negara, Saham atau Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
  - c) Transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing.
- 6) Kebijakan Dana Pensiun Mengenai Manajemen Risiko Investasi  
Batasan-batasan investasi tertuang dalam Arahan Investasi pada Keputusan Direksi Nomor: KD.163/Dirut/1217 tanggal 22 Desember 2017 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia, yang telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: Per-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 kecuali Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Atas pemberlakuan POJK Nomor: 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Direksi Dapenpos telah mengeluarkan surat pernyataan untuk tetap mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Regulator, sambil menunggu penyesuaian Arahan Investasi dari Pendiri.
- 7) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Manajemen Risiko Investasi  
Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Investasi Dapenpos tahun 2021 telah berpedoman pada Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1992 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Implementasi proses pengidentifikasian terhadap pengukuran dan pengontrolan serta pemantauan atas risiko investasi Dapenpos telah sesuai dengan Arahan Investasi pada Keputusan Direksi Nomor: KD.163/DIRUT/1217 tanggal 22 Desember 2017. Proses pengidentifikasian telah dilakukan melalui penetapan aset alokasi dan proporsi maksimum atas jenis investasi, sedangkan proses pengukuran dan pengontrolan atas investasi telah dilakukan melalui pelaksanaan pengaturan batasan kuantitatif dan kualitatif per jenis investasi, analisis pelaksanaan investasi terhadap batasan menurut peraturan perundangan dan Arahan Investasi per jenis investasi serta pengaturan dan pelaksanaan pencapaian hasil investasi yang dibandingkan dengan sasaran hasil investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi Nomor : KD.163/DIRUT/1217 tanggal 22 Desember 2017 serta Rencana Bisnis Tahun 2021, sedangkan pemantauan atas pengontrolan risiko investasi telah dilaksanakan dengan membandingkan realisasi investasi dengan rencana investasinya.

- 8) Pelaksanaan Investasi yang Tidak Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko  
Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2021 tidak terdapat pelaksanaan penempatan investasi Dana Pensiun Pos Indonesia yang tidak sesuai dengan kebijakan manajemen risiko.
- 9) Tingkat Volatilitas Total Pengembalian Investasi Selama Periode Laporan  
Tingkat imbal hasil investasi (ROI) Tahun 2021 sebesar 8,48% dengan tingkat pencapaian 100,39% dari target Rencana Bisnis 2021 sebesar 8,45%. Tercapainya target ROI tersebut didorong oleh naiknya nilai investasi di Deposito Berjangka dan Surat Berharga Negara.
- Deposito Berjangka terlampaui karena adanya penjualan dari SBN dan Obligasi yang sebagian dananya ditempatkan di Deposito Berjangka, sehingga realisasi penempatan Deposito Berjangka lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan.
  - Surat Berharga Negara terlampaui karena harga pasar SBN kelompok AFS mengalami kenaikan seiring dengan kondusifnya iklim investasi di Indonesia.

Gambaran pencapaian realisasi tingkat imbal hasil investasi (ROI) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Target ROI tahun 2021 %	Realisasi tahun 2021 %	Pencapaian %	Pelampauan %
1	Deposito on Call	4,00	4,95	100,40	0,40
2	Deposito Berjangka	6,04	6,30	104,30	4,30
3	SBN	8,55	7,92	92,63	(7,37)
4	Saham Bursa	14,03	(14,19)	(101,14)	(201,14)
5	Obligasi	8,16	9,84	120,59	20,59
6	Reksadana	13,23	3,36	25,40	(74,60)
7	PLS	4,43	4,27	96,39	(3,61)
8	Tanah dan Bangunan	10,39	0,68	6,54	(93,46)
	<b>Sasaran Hasil Investasi</b>	<b>8,02</b>	<b>6,65</b>	<b>82,92</b>	<b>(17,08)</b>

- 10) Tolok Ukur yang Digunakan dan Alasan Pemilihan Tolok Ukur
- Tolok ukur hasil investasi secara total adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pendiri dalam Arahan Investasi, yaitu minimal sebesar 8% per tahun dalam keadaan normal dan terkendali. Tolok ukur tersebut digunakan mengingat bahwa sebagai target minimal yang ditetapkan oleh Pendiri. Besaran tingkat rasio tersebut telah memperhitungkan kondisi perekonomian yang berkembang saat ini dan dua atau tiga tahun mendatang. Tolok ukur penilaian posisi portofolio investasi dilakukan dengan dasar penilaian untuk masing-masing penempatan investasi yang ditentukan dalam Arahan Investasi.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

- b. Tolok ukur hasil investasi (*realized income*) untuk masing-masing jenis instrumen investasi adalah sesuai dengan *expected return* yang ditetapkan dalam Rencana Investasi Tahunan. Besaran tolok ukur hasil investasi masing-masing instrumen sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2021 adalah sebagai berikut:
- 1) Tingkat pendapatan DOC dan Deposito Berjangka 4,00% dan 6,04%.
  - 2) Tingkat pendapatan dari Surat Berharga Negara 8,55% per tahun.
  - 3) Tingkat pendapatan dari Saham Bursa 14,03% per tahun.
  - 4) Tingkat pendapatan dari Obligasi 8,16% per tahun.
  - 5) Tingkat pendapatan Reksa Dana 13,23% per tahun.
  - 6) Tingkat pendapatan Penempatan Langsung Saham 4,43% per tahun.
  - 7) Tingkat pendapatan dari Tanah dan Bangunan 10,39% per tahun.
  - 8) Sasaran Hasil Investasi sebesar 8,02%.
- c. Posisi realisasi Portofolio Investasi tahun 2021 untuk masing-masing jenis instrumen investasi sebagian besar sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Investasi tahun 2021. Sedangkan untuk realisasi imbal hasil Investasi (ROI) tahun 2021 sebesar 6,65% dari target sebesar 8,02% atau tercapai 82,92%. Dari tidak tercapainya beberapa dari instrument Investasi, namun terdapat instrumen investasi mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- Deposito On Call tercapai karena rate bunga Deposito On Call realisasinya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan.
  - Deposito Berjangka tercapai karena rate bunga Deposito Berjangka realisasinya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan.
  - Obligasi tercapai karena harga pasar Obligasi kelompok AFS mengalami kenaikan sehingga berpengaruh terhadap imbal hasil.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

**E. PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**1. Investasi**

Rincian investasi berdasarkan jenis investasi dan per pihak sebagai berikut:

a. Rincian per jenis investasi

	Persentase terhadap Total Investasi (%)			
	2021	2020	2021	2020
<b>Nilai Historis:</b>				
Deposito <i>on Call</i>	0,28	-	5.000.000.000	-
Deposito Berjangka	15,24	22,85	267.559.000.000	371.529.000.000
Surat Berharga Negara	29,28	22,43	514.213.266.443	312.194.875.759
Saham	7,69	9,42	135.074.496.977	155.516.702.123
Obligasi	41,62	38,75	730.977.000.000	760.977.000.000
Reksadana Pasar Uang	0,48	0,70	8.411.627.877	12.211.627.877
Penempatan Langsung	5,12	5,54	89.922.500.000	90.193.500.000
Tanah dan Bangunan	0,73	0,78	12.738.790.453	12.738.790.453
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(0,44)	(0,47)	(7.728.146.837)	(7.713.396.845)
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.756.168.534.913</b>	<b>1.707.648.099.367</b>

	Persentase terhadap Total Investasi (%)			
	2021	2020	2021	2020
<b>Nilai Wajar:</b>				
Deposito <i>on Call</i>	0,26	-	5.000.000.000	-
Deposito Berjangka	14,07	20,10	267.559.000.000	371.529.000.000
Surat Berharga Negara	27,87	17,86	529.944.645.005	330.097.479.119
Saham	3,82	5,23	72.642.434.500	96.616.611.000
Obligasi	39,53	41,82	751.790.766.761	772.861.527.264
Reksadana Pasar Uang	0,39	0,59	7.480.092.531	10.869.236.885
Penempatan Langsung	7,37	7,54	140.133.000.000	139.297.000.000
Tanah dan Bangunan	6,69	6,87	127.185.000.000	126.938.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.901.734.938.797</b>	<b>1.848.208.854.268</b>

Dapenpos memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, lihat catatan 23 terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

b. Rincian per pihak berdasarkan nilai wajar

Pihak Tempat Berinvestasi	Jenis Investasi	2021		2020	
		Rp	%	Rp	%
Astra Group	Saham	13.627.500.000	0,72	15.433.290.000	0,84
Bakrie Group	Saham	-	-	16.250.000	0,00
Bank Banten	TD	-	-	70.090.000.000	3,79
Bank BTPN	TD	17.285.000.000	0,91	6.440.000.000	0,35
Bank Bukopin	TD	-	-	12.000.000.000	0,65
Bank Syariah Indonesia	TD	21.195.000.000	1,11	-	-
Bank Capital	TD	-	-	3.000.000.000	0,16
Bank Jabar	TD, Obligasi	57.585.885.960	3,03	23.621.065.340	1,28
Bank Kesejahteraan	TD	-	-	39.480.000.000	2,14
Bank Mandiri	Saham, Obligasi	47.648.766.660	2,51	16.897.512.940	0,91
Bank Mayapada	TD	-	-	28.950.000.000	1,57
Bank Muamalat	TD	41.995.000.000	2,21	55.549.000.000	3,01
Bank Nagari	TD, Obl	39.575.000.000	2,08	15.450.000.000	0,84
Bank Nusa Tenggara Timur	Obligasi	-	-	15.359.552.550	0,83
Jumlah dipindahkan		238.912.152.620	12,56	302.286.670.830	16,36

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Pihak Tempat Berinvestasi	Jenis Investasi	2021		2020	
		Rp	%	Rp	%
Jumlah pindahan		238.912.152.620	12,56	302.286.670.830	16,36
Bank Rakyat Indonesia	TD, Saham, Obligasi	50.626.227.100	2,66	-	-
Bank Negara Indonesia	Saham, Reksadana	10.568.721.920	0,56	5.218.915.240	0,28
Bank Sulselbar	Obligasi	33.974.871.830	1,79	54.790.071.450	2,96
Bank Pan Indonesia	Reksadana	-	-	1.240.902.680	0,07
Bank Rakyat Indonesia	TD, Saham, Obligasi	-	-	45.867.527.000	2,48
Bank Sahabat	TD	32.470.000.000	1,71	1.000.000.000	0,05
Bank Tabungan Negara	TD, Saham, Obligasi	79.583.371.330	4,18	71.502.194.550	3,87
Bank UOB	Obligasi	-	-	10.229.055.400	0,55
Dapenpos	PLS, Tanah Bangunan	267.318.000.000	14,06	265.571.000.000	14,37
Henan Putihrai Asset Mgt	Reksadana	-	-	2.074.560.667	0,11
Lippo Karawaci, Tbk	Saham	898.875.000	0,05	1.364.250.000	0,07
Medco Group	Obligasi	5.122.526.750	0,27	5.114.912.300	0,28
Pemerintah	SBN	529.944.645.005	27,87	330.097.479.119	17,86
PT Adhi Karya, Tbk	Saham, Obligasi	64.041.047.300	3,37	66.463.498.300	3,60
PT Alam Sutra Relity	Saham	769.500.000	0,04	1.149.500.000	0,06
PT Aneka Tambang, Tbk	Obligasi	-	-	10.171.131.500	0,55
PT Angkasa Pura	Obligasi	20.000.000.000	1,05	20.000.000.000	1,08
PT Batubara Bukit Asam, Tbk	Saham	4.871.225.000	0,26	5.050.975.000	0,27
PT Berlian Laju Tanker, Tbk	Saham	-	-	47.500.000	0,00
PT Dago Endah	PLS	-	-	139.000.000	0,01
PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk	Saham	5.354.250.000	0,28	6.405.187.500	0,35
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	Saham	2.283.750.000	0,12	3.712.187.500	0,20
PT Indomobil	Obligasi	5.136.886.100	0,27	10.139.999.900	0,55
PT Indopremier	Reksadana	2.985.458.350	0,16	3.057.633.950	0,17
PT Jasa Marga, Tbk	Saham, Obligasi	25.263.342.200	1,33	25.369.776.300	1,37
PT Kereta Api Indonesia	Obligasi	46.981.217.540	2,47	45.272.357.650	2,45
PT Malindo Feedmil, Tbk	Saham	820.951.000	0,04	906.722.000	0,05
PT MNC Internasional	TD	830.000.000	0,04	42.265.000.000	2,29
PT Pefindo	PLS	-	-	525.000.000	0,03
PT Pembangunan Perumahan, Tbk	Obligasi	35.090.686.900	1,85	9.974.565.700	0,54
PT Permodalan Nasional Madani	Obligasi	111.994.011.420	5,89	77.002.078.680	4,17
PT Perusahaan Listrik Negara	Obligasi	146.975.416.451	7,73	151.936.930.314	8,22
PT Pupuk Indonesia	Obligasi	21.642.834.200	1,14	21.198.960.400	1,15
PT Ramayana Lestari S, Tbk	Saham	-	-	344.332.500	0,02
PT Sarana Multi Infrastruktur	Obligasi	15.466.514.550	0,81	25.624.340.400	1,39
PT Sarana Multigriya Finansial, Tbk	Obligasi	6.000.000.000	0,32	-	-
PT Semen Gresik (Persero), Tbk	Obligasi	35.759.607.660	1,88	35.283.378.040	1,91
PT Summarecon Agung, Tbk	Saham	3.350.437.500	0,18	3.230.062.500	0,17
PT Telekomunikasi Ind, Tbk	Saham, Obligasi	9.022.077.360	0,47	11.829.896.410	0,64
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk	Saham	-	-	1.246.245.000	0,07
PT Timah, Tbk	Saham, Obligasi	9.131.958.650	0,48	11.711.282.400	0,63
PT Trimegah	Reksadana	703.630.927	0,04	686.380.059	0,04
PT Unilever	Saham	1.592.625.000	0,08	2.848.125.000	0,15
PT Waskita Karya	Saham, Obligasi	63.394.543.800	3,33	63.133.993.640	3,42
PT Wijaya Karya, Tbk	Saham	6.112.197.000	0,32	10.979.829.000	0,59
PT Wom Finance	Obligasi	-	-	10.061.076.100	0,54
PT Yudha Bhakti	TD	-	-	55.520.000.000	3,00
SAM Indonesia Equity Fund	Reksadana	1.934.781.334	0,10	1.987.094.289	0,11
Sinar Mas Group	Saham	4.806.597.000	0,25	16.577.275.000	0,90
<b>Jumlah</b>		<b>1.901.734.938.797</b>	<b>100,00</b>	<b>1.848.208.854.268</b>	<b>100,00</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Berikut rincian nilai investasi per pihak dan persentase dari total investasi menurut jenis investasi:

**Deposito on Call**

	2021		2020	
	Nilai Wajar	Nilai Historis	Nilai Wajar	Nilai Historis
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Deposito Berjangka**

	2021		2020	
	Nilai Wajar	Nilai Historis	Nilai Wajar	Nilai Historis
PT Bank Banten, Tbk	-	-	70.090.000.000	70.090.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	41.995.000.000	41.995.000.000	55.549.000.000	55.549.000.000
PT Bank Yudha Bakti, Tbk	-	-	55.520.000.000	55.520.000.000
PT Bank MNC Internasional, Tbk	830.000.000	830.000.000	42.265.000.000	42.265.000.000
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, Tbk	-	-	39.480.000.000	39.480.000.000
PT Bank Mayapada, Tbk	-	-	28.950.000.000	28.950.000.000
PT Bank Nagari, Tbk	39.575.000.000	39.575.000.000	15.450.000.000	15.450.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk	-	-	12.350.000.000	12.350.000.000
PT Bank Bukopin Syariah, Tbk	-	-	12.000.000.000	12.000.000.000
PT Bank Sinar Mas Syariah, Tbk	-	-	11.000.000.000	11.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia AGRO, Tbk	-	-	10.685.000.000	10.685.000.000
PT Bank BTN Syariah, Tbk	14.695.000.000	14.695.000.000	7.750.000.000	7.750.000.000
PT Bank BTPN Syariah, Tbk	17.285.000.000	17.285.000.000	6.440.000.000	6.440.000.000
PT Bank Capital, Tbk	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank Sahabat Sampoerna, Tbk	32.470.000.000	32.470.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
PT Bank Panin Syariah, Tbk	-	-	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	39.460.000.000	39.460.000.000	-	-
PT Bank Jabar, Tbk	29.750.000.000	29.750.000.000	-	-
PT Bank Mandiri Taspen, Tbk	30.304.000.000	30.304.000.000	-	-
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	21.195.000.000	21.195.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>267.559.000.000</b>	<b>267.559.000.000</b>	<b>371.529.000.000</b>	<b>371.529.000.000</b>

**Surat Berharga Negara (SBN)**

	2021		2020	
	Nilai Wajar	Nilai Historis	Nilai Wajar	Nilai Historis
Nilai Wajar Berdasarkan <i>Amortized Cost</i>				
Surat Utang Negara	140.053.449.625	137.727.563.333	150.233.792.859	147.453.563.333
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-
Sub Total	140.053.449.625	137.727.563.333	150.233.792.859	147.453.563.333
Nilai Wajar Berdasarkan Nilai Pasar				
Surat Berharga Negara Syariah	145.549.642.579	140.544.588.164	48.363.172.985	44.505.197.480
Surat Utang Negara	244.341.552.801	235.941.114.946	131.500.513.275	120.236.114.946
Sub Total	389.891.195.380	376.485.703.110	179.863.686.260	164.741.312.426
<b>Jumlah</b>	<b>529.944.645.005</b>	<b>514.213.266.443</b>	<b>330.097.479.119</b>	<b>312.194.875.759</b>

**Saham**

	2021		2020	
	Nilai Wajar	Nilai Historis	Nilai Wajar	Nilai Historis
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	6.112.197.000	16.297.915.131	10.979.829.000	16.297.915.131
PT United Tractors, Tbk	7.150.020.000	10.276.943.338	8.586.480.000	10.276.943.338
PT Astra International, Tbk	6.477.480.000	8.480.827.800	6.846.810.000	8.480.827.800
PT Timah (Persero), Tbk	4.088.259.000	5.394.119.623	6.731.802.000	8.526.237.147
PT Indocement Tunggul Perkasa, Tbk	5.354.250.000	10.378.564.636	6.405.187.500	10.378.564.636
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	5.742.216.000	8.724.029.232	5.725.620.000	8.724.029.232
Jumlah dipindahkan	34.924.422.000	59.552.399.760	45.275.728.500	62.684.517.284

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	2021		2020	
	Nilai Wajar	Nilai Historis	Nilai Wajar	Nilai Historis
Jumlah Pindahan	34.924.422.000	59.552.399.760	45.275.728.500	62.684.517.284
PT Adhi Karya, Tbk	3.356.250.000	9.835.232.950	5.756.250.000	9.835.232.950
PT London Sumatera Indonesia, Tbk	4.806.597.000	8.509.709.454	5.577.275.000	8.509.709.454
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	4.558.302.000	7.169.515.879	5.425.434.000	7.169.515.879
PT Bukit Asam, Tbk	4.871.225.000	7.849.918.499	5.050.975.000	7.849.918.499
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	4.215.000.000	4.727.483.672	3.795.000.000	4.727.483.672
PT Summarecon Agung, Tbk	3.350.437.500	7.063.002.105	3.230.062.500	7.063.002.105
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	3.712.500.000	4.614.695.060	3.396.250.000	4.614.695.060
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	1.010.000.000	1.013.120.937	3.972.000.000	4.886.246.684
PT Uniliver Indonesia, Tbk	1.592.625.000	3.360.144.375	2.848.125.000	3.360.144.375
PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	2.283.750.000	3.058.605.000	2.513.437.500	3.058.605.000
PT Bank Rakyat Indonesia	1.027.500.000	1.096.450.906	2.010.774.000	2.114.834.511
PT Lippo Karawaci, Tbk	898.875.000	7.009.052.777	1.364.250.000	7.009.052.777
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	-	-	1.198.750.000	1.379.348.123
PT Alam Sutera Realty, Tbk	769.500.000	4.961.778.749	1.149.500.000	4.961.778.749
PT Waskita Karya	444.500.000	1.867.016.901	1.008.000.000	1.867.016.901
PT Tiga Pilar Sejahtera, Tbk	-	-	1.246.245.000	6.223.038.917
PT Malindo Feedmill, Tbk	820.951.000	3.386.369.953	906.722.000	3.386.369.953
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk	-	-	483.750.000	118.199.269
PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk	-	-	344.332.500	555.125.901
PT Berlian Laju Tanker, Tbk	-	-	47.500.000	2.271.915.625
PT Bakrie and Brothers, Tbk	-	-	16.250.000	1.870.950.435
<b>Jumlah</b>	<b>72.642.434.500</b>	<b>135.074.496.977</b>	<b>96.616.611.000</b>	<b>155.516.702.123</b>

**Obligasi**

	2021		2020	
	Nilai Wajar	Nilai Historis	Nilai Wajar	Nilai Historis
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	146.975.416.451	147.000.000.000	151.936.930.314	152.000.000.000
PT Permodalan Nasional Madani	111.994.011.420	106.000.000.000	77.002.078.680	76.000.000.000
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	62.950.043.800	63.000.000.000	62.125.993.640	63.000.000.000
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	60.684.797.300	60.000.000.000	60.707.248.300	60.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	59.146.155.330	55.000.000.000	58.026.574.550	55.000.000.000
PT BPD Bank Sulsebar	33.974.871.830	34.000.000.000	54.790.071.450	54.000.000.000
PT Kereta Api Indonesia (Persero), Tbk	46.981.217.540	44.000.000.000	45.782.701.600	44.000.000.000
PT Semen Indonesia, Tbk	35.759.607.660	34.000.000.000	35.283.378.040	34.000.000.000
PT Sarana Multi Infrastruktur	15.466.514.550	15.000.000.000	25.624.340.400	25.000.000.000
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	27.835.885.960	27.000.000.000	23.621.065.340	23.000.000.000
PT Pupuk Indonesia, Tbk	21.642.834.200	20.000.000.000	21.198.960.400	20.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	10.138.727.100	10.000.000.000	20.338.003.000	20.000.000.000
PT Angkasa Pura II Thp II/2020 Seri B	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	20.705.040.200	20.000.000.000	19.944.342.300	20.000.000.000
PT BPD Bank Nusa Tenggara Timur	-	-	15.359.552.550	15.000.000.000
PT Bank Mandiri Taspen	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
PT Bank UOB Indonesia	-	-	10.229.055.400	10.000.000.000
PT Aneka Tambang, Tbk	-	-	10.171.131.500	10.000.000.000
PT Wahan Oto Multiartha Finance, Tbk	-	-	10.061.076.100	10.000.000.000
PT Pembangunan Perumahan	35.090.686.900	35.000.000.000	9.974.565.700	10.000.000.000
PT Indomobil Finance, Tbk	5.136.886.100	5.000.000.000	9.629.655.950	10.000.000.000
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	8.012.077.360	7.000.000.000	7.857.896.410	7.000.000.000
<b>Jumlah Dipindahkan</b>	<b>733.494.773.701</b>	<b>713.000.000.000</b>	<b>760.664.621.624</b>	<b>749.000.000.000</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	2021		2020	
	Nilai Wajar	Nilai Historis	Nilai Wajar	Nilai Historis
Jumlah Pindahan	733.494.773.701	713.000.000.000	760.664.621.624	749.000.000.000
PT Medco Group	5.122.526.750	5.000.000.000	5.114.912.300	5.000.000.000
PT Timah, Tbk	5.043.699.650	5.000.000.000	4.979.480.400	5.000.000.000
PT Bank Mandiri, Tbk	2.129.766.660	1.977.000.000	2.102.512.940	1.977.000.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
PT Perum Pegadaian	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>751.790.766.761</b>	<b>730.977.000.000</b>	<b>772.861.527.264</b>	<b>760.977.000.000</b>

**Reksadana**

	2021		2020	
	Nilai Wajar	Nilai Historis	Nilai Wajar	Nilai Historis
PT Indopremier Securities	4.841.680.270	5.011.627.877	4.880.299.190	5.011.627.877
PT Henan Puthirai Aset Management	-	-	2.074.560.667	2.600.000.000
PT Samuel Aset Manajemen	1.934.781.334	2.700.000.000	1.987.094.289	2.700.000.000
PT Panin Asset Management	-	-	1.240.902.681	1.200.000.000
PT Trimegah Asset Management	703.630.927	700.000.000	686.380.058	700.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.480.092.531</b>	<b>8.411.627.877</b>	<b>10.869.236.885</b>	<b>12.211.627.877</b>

**Penempatan langsung**

	2021		2020	
	Nilai Wajar	Nilai Historis	Nilai Wajar	Nilai Historis
PT Dapensi Dwikarya	77.400.000.000	69.942.500.000	70.756.000.000	57.394.000.000
PT Dapensi Trio Usaha	62.733.000.000	19.980.000.000	62.733.000.000	19.980.000.000
PT Dapenta Ekakarya	-	-	5.144.000.000	12.548.500.000
PT Pefindo	-	-	525.000.000	100.000.000
PT Dago Endah	-	-	139.000.000	171.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>140.133.000.000</b>	<b>89.922.500.000</b>	<b>139.297.000.000</b>	<b>90.193.500.000</b>

	Persentase Terhadap Total		Nilai Wajar	
	2021	2020	2021	2020
PT Dapensi Dwi karya	99,996	99,996	77.400.000.000	70.756.000.000
PT Dapensi Trio Usaha	99,850	99,850	62.733.000.000	62.733.000.000
PT Dapenta Eka Karya	0,000	99,762	-	5.144.000.000
PT Pefindo	0,000	0,100	-	525.000.000
PT Dago Endah	0,000	0,627	-	139.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>140.133.000.000</b>	<b>139.297.000.000</b>

PT Dapensi Dwikarya dan PT Dapenta Eka Karya efektif bergabung dengan yang tetap berjalan adalah PT Dapensi Dwikarya. Penggabungan ini merupakan penggabungan di bawah entitas sepengendali yang berdasarkan PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali dapat menerapkan metode penyatuan kepemilikan berdasarkan nilai buku. Oleh karena itu, nilai PT Dapensi Dwikarya per 31 Desember 2021 merupakan nilai penggabungan sebesar Rp69.942.500.000 dan nilai wajar sebesar Rp76.400.000.000 berdasarkan penilaian KJPP.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Nilai wajar penempatan langsung saham per 31 Desember 2021 pada masing-masing Perusahaan tersebut di atas didasarkan pada penilaian per 30 Juni 2021 untuk PT Dapensi Dwikarya serta per 31 Desember 2020 untuk sisanya yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Herman Meirizki & Rekan dengan laporan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Laporan	Tanggal Laporan
1	PT Dapensi Dwikarya	No. 00003/2.0120-01/BS/08/0364/1/I/2022	11 Januari 2022
2	PT Dapensi Trio Usaha	No.00003/2.0120-01/BS/08/0364/1/II/2020	18 Februari 2020
3	PT Dapenta Ekakarya	No.00004/2.0120-01/BS/08/0364/1/II/2020	18 Februari 2020
4	PT Dago Endah	No.00005/2.0120-01/BS/08/0364/1/II/2020	18 Februari 2020
5	PT Pefindo	No.00006/2.0120-01/BS/08/0364/1/II/2020	18 Februari 2020

Penilaian saham terhadap PT Dapensi Dwikarya, PT Dapensi Trio Usaha, dan PT Dapenta Eka Karya ini menggunakan suatu pendekatan penilaian yaitu Pendekatan Pendapatan dengan metode yang digunakan adalah *Discounted Cash Flow*. Pendekatan yang digunakan dalam penilaian saham PT Dago Endah dan PT Perneringkat Efek Indonesia adalah Pendekatan Pasar dengan menggunakan *Guideline Public Trade Company Method (GPTCM)*.

Pengurus telah melakukan analisis terkait dengan nilai wajar penempatan langsung ini, dan Pengurus berpendapat tidak ada perubahan nilai wajar per 31 Desember 2021 yang cukup signifikan, sehingga Pengurus tetap menggunakan nilai wajar yang telah dihitung oleh penilai saham independen sebelumnya.

**Tanah dan Bangunan**

2021				
	Biaya Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Wajar
<b>Tanah</b>				
Jl. PH. Mustafa No.33A	2.392.656.000	-	2.392.656.000	78.980.000.000
Jl. PH. Mustafa No.35	2.422.550.000	-	2.422.550.000	32.690.400.000
	<b>4.815.206.000</b>	<b>-</b>	<b>4.815.206.000</b>	<b>111.670.400.000</b>
<b>Bangunan</b>				
Jl. PH. Mustafa No.33A	6.745.701.939	(6.550.264.411)	195.437.528	12.041.000.000
Jl. PH. Mustafa No.35	1.177.882.514	(1.177.882.426)	88	3.473.600.000
	<b>7.923.584.453</b>	<b>(7.728.146.837)</b>	<b>195.437.616</b>	<b>15.514.600.000</b>
	<b>12.738.790.453</b>	<b>(7.728.146.837)</b>	<b>5.010.643.616</b>	<b>127.185.000.000</b>
2020				
	Biaya Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Wajar
<b>Tanah</b>				
Jl. PH. Mustafa No.33A	2.392.656.000	-	2.392.656.000	78.353.000.000
Jl. PH. Mustafa No.35	2.422.550.000	-	2.422.550.000	32.611.960.000
	<b>4.815.206.000</b>	<b>-</b>	<b>4.815.206.000</b>	<b>110.964.960.000</b>
<b>Bangunan</b>				
Jl. PH. Mustafa No.33A	6.745.701.939	(6.535.514.419)	210.187.520	12.548.000.000
Jl. PH. Mustafa No.35	1.177.882.514	(1.177.882.426)	88	3.425.040.000
	<b>7.923.584.453</b>	<b>(7.713.396.845)</b>	<b>210.187.608</b>	<b>15.973.040.000</b>
	<b>12.738.790.453</b>	<b>(7.713.396.845)</b>	<b>5.025.393.608</b>	<b>126.938.000.000</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Nilai wajar investasi pada Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2021 merupakan hasil valuasi dari appraisal KJPP Herman Meirizki & Rekan per tanggal 30 Juni 2021 Nomor: 00408/2.0120-00/PI/08/0374/1/XII/2021 dan Nomor: 00409/2.0120-00/PI/08/0374/1/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

Pengurus telah melakukan analisis terkait dengan nilai wajar tanah dan bangunan ini, dan Pengurus berpendapat tidak ada perubahan nilai wajar per 31 Desember 2021 yang cukup signifikan, sehingga Pengurus tetap menggunakan nilai wajar yang telah dihitung oleh penilai aset independen sebelumnya.

## 2. Kas dan Bank

Saldo kas dan bank per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kas	4.516.206	9.306.185
Bank:		
Giro BNI Posindo	210.483.727	26.394.253
Giro BNI Custody/Swakelola	2.222.194	3.972.327
Giro Bank Banten	2.473.633	849.198
Giro Iuran Pensiun ( <i>on Line</i> )	2.096.365	18.388.187
Giro Manfaat Pensiun ( <i>on Line</i> )	774.715	2.053.165
Giro Bank Muamalat	955.001	-
Giro Iuran Pensiun (CGS)	12.719.779.466	-
Giro Manfaat Pensiun (CGS)	1.035.600	-
	<u><b>12.944.336.907</b></u>	<u><b>60.963.315</b></u>

Dapenpos memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, lihat catatan 23 terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

## 3. Piutang Iuran

Rincian piutang iuran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Iuran Normal Pemberi Kerja	5.369.239.860	6.404.361.541
Iuran Normal Peserta	8.282.455	7.764.355
Iuran Normal Tambahan	19.956.022.564	16.630.018.804
	<u><b>25.333.544.879</b></u>	<u><b>23.042.144.700</b></u>

Dapenpos memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, lihat catatan 23 terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

**4. Beban Dibayar di Muka**

Rincian beban dibayar di muka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Panjar Pensiun	16.196.851.100	14.678.866.200
PPH Pasal 28	324.591.112	570.709.559
Beban Kantor Dibayar di Muka	102.027.966	100.553.253
Beban Personalia Dibayar di Muka	10.249.998	-
Beban Investasi Dibayar di Muka	6.233.505	13.534.503
Beban Operasional Lain Dibayar Di Muka	27.100.000	-
	<u><b>16.667.053.681</b></u>	<u><b>15.363.663.515</b></u>

Dapenpos memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, lihat catatan 23 terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

**5. Piutang Hasil Investasi**

Rincian piutang hasil investasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bunga Surat Berharga Negara	10.215.981.611	6.489.932.222
Bunga Obligasi	7.785.126.387	7.496.859.720
Sewa Gedung	370.000.000	-
Bunga Deposito Berjangka	271.782.068	1.013.670.929
Bunga Deposito on Call	1.232.877	-
Dividen Penempatan Langsung Saham	-	11.050.000
	<u><b>18.644.122.943</b></u>	<u><b>15.011.512.871</b></u>

Dapenpos memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, lihat catatan 23 terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

**6. Aset Tetap**

Merupakan saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>			
	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan/ Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya Perolehan Tanah	482.000.000	-	-	482.000.000
Bangunan	2.867.589.155	-	-	2.867.589.155
Kendaraan	621.375.000	-	-	621.375.000
Peralatan Komputer	799.090.645	61.870.000	-	860.960.645
Peralatan Kantor	577.487.477	8.628.000	-	586.115.477
Aset Operasional Lainnya	39.700.000	-	-	39.700.000
	<u><b>5.387.242.277</b></u>	<u><b>70.498.000</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>5.457.740.277</b></u>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>2021</b>			
	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan/ Reklasifikasi</b>	<b>Saldo akhir</b>
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.374.341.937	131.757.108	-	1.506.099.045
Kendaraan	336.752.561	74.973.438	-	411.725.999
Peralatan Komputer	748.819.721	37.677.912	-	786.497.633
Peralatan Kantor	532.035.908	16.532.298	-	548.568.206
Aset Operasional Lainnya	8.105.223	4.962.497	-	13.067.720
	<b>3.000.055.350</b>	<b>265.903.253</b>	<b>-</b>	<b>3.265.958.603</b>
Nilai Buku	<b>2.387.186.927</b>			<b>2.191.781.674</b>
	<b>2020</b>			
	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo akhir</b>
Biaya Perolehan				
Tanah	482.000.000	-	-	482.000.000
Bangunan	2.867.589.155	-	-	2.867.589.155
Kendaraan	621.375.000	-	-	621.375.000
Peralatan Komputer	793.090.645	6.000.000	-	799.090.645
Peralatan Kantor	563.242.477	14.245.000	-	577.487.477
Aset Operasional Lainnya	39.700.000	-	-	39.700.000
	<b>5.366.997.277</b>	<b>20.245.000</b>	<b>-</b>	<b>5.387.242.277</b>
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.244.694.943	139.480.322	(9.833.328)	1.374.341.937
Kendaraan	258.840.084	77.912.477	-	336.752.561
Peralatan Komputer	716.567.851	32.251.870	-	748.819.721
Peralatan Kantor	511.041.934	20.993.974	-	532.035.908
Aset Operasional Lainnya	3.142.713	4.962.510	-	8.105.223
	<b>2.734.287.525</b>	<b>275.601.153</b>	<b>(9.833.328)</b>	<b>3.000.055.350</b>
Nilai Buku	<b>2.632.709.752</b>			<b>2.387.186.927</b>

**7. Aset Lain-lain**

Rincian aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>a. Piutang</b>		
<b>Nilai perolehan:</b>		
Piutang PT Jasa Banda Garta	24.039.673.007	24.039.673.007
Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line	10.000.000.000	10.000.000.000
Piutang Bunga Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line	633.887.997	633.887.997
Saham PT Dago Endah	101.000.000	-
Deposit Stockwatch	1.500.000	1.500.000
	<b>34.776.061.004</b>	<b>34.675.061.004</b>
<b>Akumulasi penyisihan piutang:</b>		
Piutang PT Jasa Banda Garta	24.039.673.007	24.039.673.007
Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line	10.000.000.000	10.000.000.000
Piutang Bunga Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line	633.887.997	633.887.997
Saham PT Dago Endah	101.000.000	-
	<b>34.774.561.004</b>	<b>34.673.561.004</b>
Nilai buku piutang	1.500.000	1.500.000

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>b. Aset tak berwujud</b>		
<b>Nilai perolehan:</b>		
Software Program SIDPA	491.092.316	491.092.316
Website Dapenpos	80.850.000	30.300.000
	<u>571.942.316</u>	<u>521.392.316</u>
<b>Amortisasi:</b>		
Software Program SIDPA	491.092.315	491.092.315
Website Dapenpos	32.406.250	30.300.000
	<u>523.498.565</u>	<u>521.392.315</u>
Nilai buku aset tak berwujud	<u>48.443.751</u>	<u>1</u>
	<b><u>49.943.751</u></b>	<b><u>1.500.001</u></b>

Piutang PT Jasa Banda Garta (PT JBG) sebesar Rp24.039.673.007 merupakan nilai klaim Dapenpos kepada PT JBG yang timbul pada tahun 2003 akibat kegagalan PT JBG memenuhi kewajiban mengembalikan aset tunai kepada Dapenpos. PT JBG sejak tahun 2007 tidak tercatat lagi di Bapepam Lembaga Keuangan, sementara itu sejak tahun 2012 peran Bapepam LK telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mana telah dinyatakan bahwa perusahaan yang statusnya sudah dicabut oleh Bapepam LK dan memiliki hutang, maka pihak OJK tidak dapat menyelesaikannya, sehingga kasusnya dianggap sudah ditutup. Atas saldo piutang tersebut telah disisihkan sebesar 100%.

Manajemen Dapenpos mereklasifikasi pencatatan obligasi Arpeni Pratama Ocean Line (APOL) Tahun 2008 Seri II senilai Rp10.000.000.000 dari kelompok aset investasi yang dipadukan dengan kewajiban manfaat pensiun ke kelompok aset lain-lain, sehubungan dengan adanya penurunan nilai obligasi tersebut dan gagal bayar kupon, terkait penurunan kinerja keuangan emiten APOL. Tanggal 1 April 2015 PT Bursa Efek Indonesia telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek saham dan obligasi APOL di seluruh pasar. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, APOL dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sehingga Perusahaan mencatat penurunan nilai obligasi APOL beserta piutang bunganya sebesar 100%.

Berdasarkan Risalah Rapat Pengurus bulan November 2021 ditetapkan untuk Penyertaan Langsung Saham (PLS) PT Dago Endah dilakukan reklas ke aset lain-lain dan dilakukan pencadangan/penyisihan atas PLS tersebut dengan pertimbangan instrumen investasi tersebut beberapa tahun terakhir tidak memberikan dividen karena membukukan rugi.

#### **8. Beban Masih Harus Dibayar**

Merupakan beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Beban Personalia yang Masih Harus Dibayar	2.900.036.395	3.570.719.449
Beban Investasi yang Masih Harus Dibayar	267.521.122	33.101.243
Beban Jasa Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar	200.781.818	144.880.000
Beban Kantor yang Masih Harus Dibayar	6.449.994	5.121.231
	<u>3.374.789.329</u>	<u>3.753.821.923</u>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

**9. Liabilitas Lain**

Merupakan liabilitas lain per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja (PSAK 24)	1.830.673.057	1.627.031.057
Titipan Pajak PPh Pasal 21	252.206.017	1.085.151.000
PPh Pasal 25 yang Masih Harus Dibayar	37.555.851	87.804.456
Titipan Pajak PPh Pasal 23	14.701.985	3.816.950
Utang Lain-lain	16.016.069	65.800
Titipan Lain-lain (PPh dan Potongan Pensiun)	16.005.071	16.005.071
Utang Titipan Iuran	1.668.675	31.193.188
	<u><b>2.168.826.725</b></u>	<u><b>2.851.067.522</b></u>

Dana Pensiun Pos Indonesia telah menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja" yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja. Entitas diwajibkan untuk mengakui liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan dan beban ketika Entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Jumlah Pengurus dan Pegawai yang berhak atas imbalan pasca kerja (tidak diaudit) untuk posisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 25 orang (2020: 21 orang).

Rincian liabilitas imbalan pasca kerja 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pensiun Karyawan	506.931.963	816.638.963
Pensiun Pengurus	907.937.500	570.018.750
Pensiun Dewan Pengawas	395.803.594	221.712.344
Pensiun Karyawan Tugas Karya	20.000.000	18.661.000
	<u><b>1.830.673.057</b></u>	<u><b>1.627.031.057</b></u>

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk pegawai tetap pada tanggal 31 Desember 2021 menggunakan angka yang dihitung oleh aktuaris independen Rinaldi & Zulhamdi melalui laporannya dengan Nomor 168/RAZ-DPPI/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 sedangkan untuk tahun 2020 dihitung oleh aktuaris independen Arya Bagiastra melalui laporannya dengan Nomor 0040/PSAK/KKA.AB/II/21 tanggal 17 Februari 2021.

Manajemen Dapenpos memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan berupa pesangon dan pensiun dengan mengikutsertakan karyawan pada Lembaga Keuangan (DPLK) dengan metode iuran pasti ditambah iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan Undang-undang 11 tahun 1992 pasal 4 butir 1 adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Program Pensiun Iuran Pasti (PIP) yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sementara itu, benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Dana Pensiun melakukan pendanaan program imbalan pasca kerja melalui program iuran pasti pada DPLK Bank BNI. Angka-angka yang disajikan dalam laporan ini hanya mencakup porsi yang tidak didanai, yang mencerminkan kekurangan dari saldo DPLK atas imbalan pasca kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021.

Karakteristik program iuran Pasti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya.
2. Besar iuran ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, ditetapkan di awal dan lebih stabil.
3. Bersifat pemberdayaan: kontrol dan risiko berada di tangan Peserta, termasuk risiko investasi.
4. Pencatatan dana: akun individu.

Besaran dan rumus besar manfaat yang diperoleh karyawan Dapenpos adalah sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Rumus Besar Manfaat	
	2021	2020
Pensiun Normal	$(1,75+1UPMK)$	$(2P+1UPMK)\times 1,15$
Pekerja Meninggal dunia	$(2P+1UPMK)$	$(2P+1UPMK)\times 1,15$
Pekerja Mengundurkan diri	-	$15\% \times (1P+1UPMK)$
Sakit berkepanjangan	$(1,75+1UPMK)$	$(2P+2UPMK)\times 1,15$

Catatan :

- P = Uang Pesagon  
UPMK = Uang Penghargaan Masa Karya

Ketentuan pemberian pesangon pensiun untuk karyawan Dapenpos sebagai berikut:

1. Jika perhitungan pesangon berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 lebih besar dari iuran DPLK ditambah iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, maka pemberi kerja hanya memiliki kewajiban selisih pesangon Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 dengan iuran DPLK yang terkumpul.
2. Jika perhitungan pesangon berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 lebih kecil dari iuran DPLK ditambah iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, maka pemberi kerja tidak memiliki kewajiban tambahan terhadap pesangon karyawan tersebut, karena semua pembayaran diperoleh dari DPLK.

Ketentuan Pesangon untuk Pengurus dan Dewan Pengawas Dapenpos diatur dalam Keputusan Pendiri Dapenpos Nomor: KD.124/DIRUT/1219 tanggal 31 Desember 2019 dengan besaran 25% dari gaji atau honorarium terakhir dikalikan dengan masa kerja (bulan) selama di Dapenpos.

Ketentuan Pesangon untuk Karyawan Tugas Karya diatur dalam Keputusan Pengurus Dapenpos Nomor: 38/SK/DIRUT/0820 dengan besaran:

Masa Kerja	Nilai
≥ 6 bulan s.d 12 bulan	0,5 x gaji Terakhir
>1 tahun s.d 1,5 tahun	1 x Gaji Terakhir
>1,5 tahun s.d 3 tahun	2 x Gaji Terakhir
>3 tahun s.d 4 tahun	3 x Gaji Terakhir
>4 tahun s.d 5 tahun	4 x Gaji Terakhir
>5 tahun lebih	5 x Gaji Terakhir

Imbalan kerja Jangka pendek yang diberikan perusahaan berupa cuti tahunan dan insentif. Sesuai dengan Keputusan Pengurus Dapenpos Nomor: 05A/SK/Dirut/0120 tanggal 13 Januari 2020 bahwa cuti tahunan diberikan kepada karyawan sebesar 1,5 kali gaji pokok terakhir sedangkan besaran insentif diberikan mengacu pada ketentuan Nomor: KD.162/Dirut/1217 tanggal 31 Desember 2017.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Liabilitas/(aset) yang diakui dalam neraca

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Nilai Kewajiban	506.931.963	1.678.258.205
Nilai wajar aset program	-	(861.619.242)
Posisi pendanaan	<u>506.931.963</u>	<u>816.638.963</u>
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui	-	-
Biaya jasa lalu yang belum diakui-non-vested	-	-
	<u><b>506.931.963</b></u>	<u><b>816.638.963</b></u>

Beban/(pendapatan) yang diakui dalam laporan perubahan hasil usaha

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Biaya jasa kini	28.675.000	69.388.367
Bunga neto	80.930.000	61.236.811
Biaya jasa lalu dan (keuntungan)/kerugian atas penyelesaian	(256.331.000)	-
Harapan dari hasil investasi	-	(40.114.419)
Beban/(pendapatan) yang diakui dalam laporan aktivitas	<u><b>(146.726.000)</b></u>	<u><b>90.510.759</b></u>

Perubahan liabilitas/(aset) yang diakui dalam laporan posisi keuangan

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Liabilitas/(aset) pada awal periode	816.638.963	109.948.976
Beban/(pendapatan)	(146.726.000)	90.510.760
Pengukuran kembali liabilitas/(aset) dalam penghasilan komprehensif lain	(879.607.000)	616.179.227
Penyesuaian atas aset program	861.619.000	-
Realisasi pembayaran manfaat	(144.993.000)	-
Liabilitas/(aset) pada akhir periode	<u><b>506.931.963</b></u>	<u><b>816.638.963</b></u>

Perusahaan menggunakan metode *projected unit credit* dalam menetapkan liabilitas imbalan paska kerja berdasarkan Manfaat Pasti, dengan asumsi sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jumlah peserta	25	21
Tingkat diskonto	6,75%	5,04%
Kenaikan gaji tahunan	5%	8%
Usia pensiun	56	56
Tabel mortalita	TMI - IV 2019	TMI - IV 2019
Tingkat cacat	1% TMI - IV	1% TMI - IV
Tingkat pengunduran diri	10% di usia 20 tahun, dan menurun linear sampai dengan 0% di usia pensiun normal	6% di usia 20 tahun, dan menurun linear sampai dengan 0% di usia pensiun normal

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

Estimasi beban imbalan kerja untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah (Rp)</u>
Beban jasa kini	28.675.000
Bunga neto	80.930.000
Biaya jasa lalu dan (keuntungan)/kerugian atas penyelesaian	(256.331.000)
	<u>(146.726.000)</u>

Analisis sensitifitas pada asumsi aktuarial yang signifikan:

	<b>Nilai kini liabilitas imbalan paska kerja</b>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tingkat diskonto		
Kenaikan 1%	447.719.000	1.594.487.912
Penurunan 1%	573.647.000	1.769.931.486
Tingkat kenaikan gaji ke depan		
Kenaikan 1%	574.141.000	1.768.894.942
Penurunan 1%	446.229.000	1.593.799.991

Analisis jatuh tempo pembayaran manfaat:

0 - 2 Tahun	145.233.000	369.755.464
2 - 5 Tahun	237.221.000	159.490.649
5 - 10 Tahun	772.881.000	2.102.734.045
Di atas 10 Tahun	111.601.000	1.467.161.988

## 10. Pendapatan Investasi

Jumlah pendapatan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bunga/Bagi Hasil		
Obligasi	67.602.516.667	61.312.683.333
Surat Berharga Negara	32.935.090.394	31.535.394.722
Deposito Berjangka	18.536.040.230	29.271.865.318
Deposito On Call	285.774.838	313.820.410
Sukuk	-	242.791.666
Sub Total	<u>119.359.422.129</u>	<u>122.676.555.449</u>
Dividen		
PT Dapensi Trio Usaha	4.825.935.821	4.873.511.847
Saham	1.407.991.272	2.665.084.370
PT Dapensi Dwikarya	-	1.510.614.111
Reksadana	31.800.000	35.300.000
PT Perfindo	12.000.000	13.000.000
Sub Total	<u>6.277.727.093</u>	<u>9.097.510.328</u>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Sewa		
Tanah dan Bangunan	850.000.000	850.000.000
Sub Total	<u>850.000.000</u>	<u>850.000.000</u>
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		
Surat Berharga	2.637.711.653	5.381.208.333
Obligasi	240.500.000	-
Unit Penyertaan Reksadana	(76.592.160)	-
Saham	(8.737.396.646)	206.165.149
Sub Total	<u>(5.935.777.153)</u>	<u>5.587.373.482</u>
	<b><u>120.551.372.069</u></b>	<b><u>138.211.439.259</u></b>

Dapenpos memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, lihat catatan 23 terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

#### 11. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi

Merupakan peningkatan (penurunan) nilai wajar investasi awal dan akhir periode pelaporan, dengan jumlah untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Obligasi	8.929.239.497	2.648.921.288
Penyertaan Langsung Saham	1.107.000.000	-
Reksadana	410.855.646	(1.175.090.571)
Tanah dan Bangunan	261.749.992	24.583.320
Surat Berharga Negara	(2.171.224.798)	14.125.412.971
Saham	(3.531.971.354)	(3.161.537.627)
	<b><u>5.005.648.983</u></b>	<b><u>12.462.289.381</u></b>

Dapenpos memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, lihat catatan 23 terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

#### 12. Iuran Jatuh Tempo

Merupakan iuran jatuh tempo per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Iuran Normal Pemberi Kerja	34.251.402.201	38.435.382.512
Iuran Normal Peserta	7.301.443.639	7.286.333.034
Iuran Tambahan	119.736.135.384	99.780.112.824
	<b><u>161.288.981.224</u></b>	<b><u>145.501.828.370</u></b>

Dapenpos memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, lihat catatan 23 terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

**13. Pendapatan di Luar Investasi**

Merupakan pendapatan di Luar Investasi per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jasa Giro BNI Posindo	7.618.637	9.312.054
Jasa Giro BNI Custody	4.893.174	3.549.178
Jasa Giro Bank Banten	2.693.264	73.308
Pendapatan Lainnya	3.030.061.678	5.723.032
	<u><b>3.045.266.753</b></u>	<u><b>18.657.572</b></u>

**14. Beban Investasi**

Jumlah beban investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban Transaksi	37.566.143	9.121.500
Beban Penyusutan	14.749.992	14.749.992
Beban <i>Custodian</i>	435.506.135	386.812.277
Beban Investasi Lain		
Beban Pihak Ketiga	241.691.800	-
Beban Sistem Informasi Investasi	187.507.002	155.334.008
Beban PBB Tanah dan Bangunan	123.771.296	123.771.296
Beban Pengelolaan Tanah dan Bangunan	87.949.996	124.041.800
Beban Asuransi Bangunan	24.933.996	24.933.996
	<u><b>1.153.676.360</b></u>	<u><b>838.764.869</b></u>

**15. Beban Operasional**

Jumlah beban operasional untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**a. Beban Personalia**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Pengawas		
Beban Gaji	4.169.087.486	4.746.423.103
Insentif	2.427.709.164	3.607.585.382
Tunjangan Pajak	1.129.550.347	1.446.346.258
Honorarium	1.064.520.525	1.212.728.062
Jumlah dipindahkan	<u>8.790.867.522</u>	<u>11.013.082.805</u>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Jumlah pindahan	8.790.867.522	11.013.082.805
Tunjangan Transpor	690.768.750	742.296.750
Uang Pesangon	436.685.351	1.066.535.853
Tunjangan Hari Raya	426.087.506	218.014.386
Biaya Kesejahteraan Karyawan	413.259.735	860.385.561
Pemeliharaan Kesehatan	207.401.570	156.142.208
Iuran DPLK dan Jamsostel	204.411.032	186.476.648
Uang Makan	156.484.125	184.626.750
Pakaian Seragam	67.539.800	79.596.000
Uang Lelah, Lembur	17.657.781	11.423.278
	<b>11.411.163.172</b>	<b>14.518.580.239</b>
<b>b. Beban Kantor</b>		
Keamanan dan Ketertiban	289.537.874	280.651.224
Pemeliharaan Kebersihan	162.022.819	161.954.874
Pemeliharaan Aset Operasional	161.104.317	214.442.412
Administrasi Kantor	121.639.167	115.003.001
Alat Tulis Kantor	93.554.834	110.327.619
Langganan Telepon	79.772.107	86.424.818
Langganan Listrik dan Air	59.096.438	60.367.643
PBB	14.830.000	14.830.000
Asuransi Aset Operasional	9.329.250	9.838.299
Langganan Koran dan Majalah	8.050.000	18.795.907
	<b>998.936.806</b>	<b>1.072.635.797</b>
<b>c. Beban Penyusutan Aset Operasional</b>		
Beban Penyusutan Bangunan	131.757.108	139.480.322
Beban Penyusutan Kendaraan	74.973.438	77.912.477
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	37.677.912	32.251.870
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	16.532.298	20.993.974
Beban Penyusutan Aset Operasional Lainnya	4.962.497	4.962.510
	<b>265.903.253</b>	<b>275.601.153</b>
<b>d. Beban Jasa Pihak Ketiga</b>		
Beban Akuntan Publik/Appraisal		
Aktuaris/ <i>Maintenance</i>	265.175.900	244.651.850
	<b>265.175.900</b>	<b>244.651.850</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>e. Beban Operasional Lain</b>		
Administrasi Pensiun	1.131.990.830	1.090.444.500
Iuran Tahunan OJK	899.967.110	897.775.539
Humas	594.463.781	555.019.043
Pendidikan, Penataran, dan Seminar	131.100.000	90.960.000
Perjalanan Dinas	50.705.519	33.350.000
Rapat-rapat	41.742.500	58.270.000
Jamuan Rapat/Tamu	41.226.998	38.128.435
Iuran Asosiasi Dana Pensiun (ADPI)	12.000.000	12.000.000
Administrasi Bank/Giropos	5.544.900	5.537.100
	<u>2.908.741.638</u>	<u>2.781.484.617</u>
	<b><u>15.849.920.769</u></b>	<b><u>18.892.953.656</u></b>

**16. Beban di Luar Investasi dan Operasional**

Jumlah beban di luar investasi dan operasional untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Beban Penyisihan Aset Tidak Tertagih	101.000.000	-
Kegiatan Sosial	73.455.772	23.754.590
Beban Penyusutan Website Dapenpos	2.106.250	-
Beban Denda Administrasi	1.000.000	-
Uang Duka Kemalangan	500.000	1.000.000
Koreksi Pembulatan	5	(1)
	<u>178.062.027</u>	<u>24.754.589</u>

**17. Manfaat Pensiun**

Merupakan manfaat pensiun yang dibayarkan kepada penerima manfaat pensiun yang dicatat pada jatuh tempo, dengan jumlah untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Manfaat Pensiun	197.142.143.067	178.336.778.690
	<b><u>197.142.143.067</u></b>	<b><u>178.336.778.690</u></b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

**18. Pajak Penghasilan**

Perhitungan taksiran pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Penerimaan		
Pendapatan Investasi	120.551.372.069	138.211.439.259
Penerimaan Iuran		
Iuran Normal Pemberi Kerja	34.251.402.201	38.435.382.512
Iuran Normal Peserta	7.301.443.639	7.286.333.034
Iuran Tambahan	119.736.135.384	99.780.112.824
Pendapatan di Luar Investasi	3.045.266.753	18.657.572
Jumlah Penerimaan (a)	<b>284.885.620.046</b>	<b>283.731.925.201</b>
Penerimaan Objek Pajak		
Pendapatan Investasi		
Dividen Penempatan Langsung	4.837.935.821	6.397.125.958
Pendapatan Investasi Lain Penempatan Langsung	-	-
Laba/Rugi Penjualan Aset Operasional	-	-
Lainnya	6.222.200	5.723.032
Total Penerimaan Objek Pajak (b)	<b>4.844.158.021</b>	<b>6.402.848.990</b>
Biaya		
Biaya sebelum Koreksi Fiskal		
Beban Investasi	1.153.676.360	838.764.869
Beban Operasional	15.849.920.769	18.892.953.656
Beban di Luar Investasi dan Operasional	178.062.023	24.754.589
Manfaat Pensiun	197.142.143.067	178.336.778.690
	<b>214.323.802.219</b>	<b>198.093.251.804</b>
Koreksi Fiskal atas Biaya		
Beban Transaksi	37.566.143	9.121.500
Beban Custodian	435.506.135	386.812.277
Beban Penyusutan	14.749.992	14.749.992
Beban Pengelolaan Tanah dan Bangunan	665.854.090	428.081.100
Beban Pesangon (PSAK 24)	436.685.351	1.066.535.853
Tunjangan Pajak	1.129.550.347	1.446.346.258
Beban Akuntan Publik/		
Apraisal dan Konsultan Program	2.465.800	10.151.850
Beban Humas (Sumbangan)	700.000	8.750.000
Jamuan Rapat	41.226.998	38.128.435
Administrasi Pensiun	1.131.990.830	1.090.444.500
Manfaat Pensiun	197.142.143.067	178.336.778.690
Beban Kegiatan Sosial	73.455.772	23.754.590
Tunjangan Duka	500.000	1.000.000
Beban Kekurangan Pajak	1.000.000	-
	<b>201.113.394.525</b>	<b>182.860.655.045</b>
Jumlah Beban setelah Koreksi Fiskal (c)	<b>13.210.407.694</b>	<b>15.232.596.759</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Penghasilan Objek Pajak	4.844.158.021	6.402.848.990
Beban Sebagai Pengurang Pajak ( b ) / ( a ) x ( c )	224.628.053	343.747.065
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	4.619.529.000	6.059.101.000
Pajak Penghasilan Badan	1.016.296.380	1.333.002.220
Kredit Pajak		
PPh Pasal 23	723.890.373	959.578.763
PPh Pasal 25	601.416.027	928.551.924
Jumlah Kredit Pajak	1.325.306.400	1.888.130.687
Kurang (Lebih) Bayar PPh Badan	<b>(309.010.020)</b>	<b>(555.128.467)</b>

**19. Selisih Penilaian Investasi**

Merupakan selisih dasar penilaian investasi antara nilai historis dengan nilai wajar pada periode pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Surat Berharga Negara	15.731.378.562	17.902.603.360
Saham	(62.432.062.477)	(58.900.091.123)
Obligasi	20.813.766.761	11.884.527.264
Unit Penyertaan Reksadana	(931.535.346)	(1.342.390.992)
Penempatan Langsung Saham	50.210.500.000	49.103.500.000
Tanah dan Bangunan	122.174.356.384	121.912.606.392
	<b>145.566.403.884</b>	<b>140.560.754.901</b>

**20. Nilai Kini Aktuarial**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Nilai Kini Aktuarial Awal Tahun	2.754.752.093.699	2.697.655.716.878
Penyesuaian Kewajiban Aktuarial	(159.227.786.280)	57.096.376.821
Selisih Nilai Kini Aktuarial Akhir Tahun	<b>2.595.524.307.419</b>	<b>2.754.752.093.699</b>

Saldo Nilai Kini Aktuarial Per 31 Desember 2021 merupakan Proyeksi Nilai Kini Aktuarial perhitungan valuasi per 31 Desember 2021 berdasarkan Laporan Aktuarial KKA Arya Bagiastra Nomor: 0028/DP/KKA.AB/II/22 tanggal 18 Februari 2022 dan untuk tahun 2020 berdasarkan Laporan Aktuarial KKA Enny Diah Awal Nomor: 20125/DAPENPOS/EP/03/2021 tanggal 9 Maret 2021. Perhitungan ini dilakukan agar laporan Keuangan tidak terlalu bias.

Lihat catatan C4e untuk asumsi aktuarial yang digunakan dalam menghitung nilai kini aktuarial.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

**21. Selisih Nilai Kini Aktuarial**

Akun ini mencatat kelebihan (kekurangan) dana dibandingkan dengan nilai kini aktuarial yang seharusnya tersedia menurut perhitungan aktuarial, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Selisih Nilai Kini Aktuarial Awal Tahun	(857.281.157.547)	(896.952.741.284)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto :		
Hasil Usaha Periode Berjalan	105.398.683.286	117.140.621.497
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	5.005.648.983	12.462.289.381
Iuran Normal	41.552.845.840	45.721.715.546
Iuran Tambahan	119.736.135.384	99.780.112.824
Manfaat Pensiun	(197.142.143.067)	(178.336.778.690)
Penyesuaian Kewajiban Aktuarial	159.227.786.280	(57.096.376.821)
	<u><b>(623.502.200.841)</b></u>	<u><b>(857.281.157.547)</b></u>

**22. Kekayaan Untuk Pendanaan**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun tanggal 30 Mei 2018, bahwa kekayaan untuk pendanaan dihitung dari aset neto dikurangi dengan:

- Iuran, baik sebagian atau seluruhnya yang pada tanggal perhitungan aktuarial belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya.
- Kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang.
- Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aset Neto	1.972.022.106.578	1.897.470.936.152
Kekayaan dalam sengketa/diblokir	-	-
Iuran yang belum disetor lebih dari 3 bulan	-	-
Piutang lain-lain	-	-
Aset lain-lain	49.943.751	1.500.001
Selisih lebih nilai investasi dari batasan per jenis untuk tanah dan bangunan, serta tanah dan bangunan	<u><b>1.971.972.162.827</b></u>	<u><b>1.897.469.436.151</b></u>

a. Aset Neto

Nilai aset neto adalah jumlah kekayaan dana pensiun dikurangi dengan liabilitas manfaat pensiun yang belum jatuh tempo atau liabilitas di luar nilai kini aktuarial per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.972.022.106.578 dan Rp1.897.470.936.152.

b. Kekayaan dalam Sengketa atau Diblokir

Tidak ada kekayaan dalam sengketa atau diblokir dari pihak yang berwenang.

c. Iuran normal dan tambahan yang belum disetor lebih dari 3 bulan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

d. Piutang lain-lain

Terdapat piutang di luar investasi masing – masing sebesar Rp0 per 31 Desember 2021 dan 2020.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

e. Aset lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.943.751 merupakan nilai buku aset tak berwujud berupa website Dapenpos sebesar Rp48.443.751 dan deposit stockwatch sebesar Rp1.500.000 dan per 31 Desember 2020 merupakan deposit stockwatch sebesar Rp1.500.001.

**23. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, DAPENPOS melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau pengurusan, yang terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Investasi Berdasarkan Nilai Wajar</b>		
Pemerintah RI		
Surat Berharga Negara	529.944.645.005	330.097.479.119
PT Adhi Karya (Persero), Tbk		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	60.684.797.300	60.707.248.300
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.356.250.000	5.756.250.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>64.041.047.300</u></b>	<b><u>66.463.498.300</u></b>
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	10.171.131.500
PT Angkasa Pura (Persero), Tbk		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	59.146.155.330	58.026.574.550
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	5.742.216.000	5.725.620.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>64.888.371.330</u></b>	<b><u>63.752.194.550</u></b>
PT Bank Tabungan Negara Syariah, Tbk		
Deposito berjangka pada Bank	-	7.750.000.000
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	2.129.766.660	2.102.512.940
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.215.000.000	3.795.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>6.344.766.660</u></b>	<b><u>5.897.512.940</u></b>
PT Mandiri Taspen		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	11.000.000.000	11.000.000.000
Deposito berjangka pada Bank	30.304.000.000	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>41.304.000.000</u></b>	<b><u>11.000.000.000</u></b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk		
Deposito <i>on call</i> pada Bank	5.000.000.000	-
Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	3.712.500.000	3.396.250.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>8.712.500.000</b>	<b>3.396.250.000</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	10.138.727.100	20.338.003.000
Deposito berjangka pada Bank	39.460.000.000	-
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1.027.500.000	2.010.774.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>11.166.227.100</b>	<b>22.348.777.000</b>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk		
Deposito berjangka pada Bank	-	12.350.000.000
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	483.750.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>12.833.750.000</b>
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk		
Deposito berjangka pada Bank	21.195.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk		
Deposito berjangka pada Bank	-	10.685.000.000
PT Bukit Asam (Persero), Tbk		
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.871.225.000	5.050.975.000
PT Jasa Marga (Persero), Tbk		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20.705.040.200	19.944.342.300
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.558.302.000	5.425.434.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>25.263.342.200</b>	<b>25.369.776.300</b>
PT Kereta Api Indonesia (Persero), Tbk		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	46.981.217.540	45.782.701.600
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	35.090.686.900	9.974.565.700
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)		
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	111.994.011.420	77.002.078.680

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	146.975.416.451	151.936.930.314
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	15.466.514.550	25.624.340.400
PT Pupuk Indonesia (Persero), Tbk Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	21.642.834.200	21.198.960.400
PT Semen Gresik (Persero), Tbk Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	35.759.607.660	35.283.378.040
PT Telekomunikasi Indonesi (Persero), Tbk Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	8.012.077.360	7.857.896.410
Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	1.010.000.000	3.972.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>9.022.077.360</u></b>	<b><u>11.829.896.410</u></b>
PT Timah (Persero), Tbk Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	5.043.699.650	4.979.480.400
Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	4.088.259.000	6.731.802.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>9.131.958.650</u></b>	<b><u>11.711.282.400</u></b>
PT Waskita Karya (Persero), Tbk Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	62.950.043.800	62.125.993.640
Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	444.500.000	1.008.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>63.394.543.800</u></b>	<b><u>63.133.993.640</u></b>
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	6.112.197.000	10.979.829.000
PT Dapensi Dwikarya Penempatan Langsung Saham	77.400.000.000	70.756.000.000
PT Dapensi Trio Usaha Penempatan Langsung Saham	62.733.000.000	62.733.000.000
PT Dapenta Ekakarya Penempatan Langsung Saham	-	5.144.000.000

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Dago Endah		
Penempatan Langsung Saham	-	139.000.000
PT Pefindo		
Penempatan Langsung Saham	-	525.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.439.435.190.126</u></b>	<b><u>1.432.974.664.156</u></b>
<b>Selisih Penilaian Investasi</b>		
Selisih Penilaian Investasi - Surat Berharga Negara Pemerintah Republik Indonesia	15.731.378.562	17.902.603.360
Selisih Penilaian Investasi - Obligasi Korporasi yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia		
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	684.797.300	707.248.300
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk	-	171.131.500
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	152.766.660	125.512.940
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	138.727.100	338.003.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	4.146.155.330	3.026.574.550
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	705.040.200	(55.657.700)
PT Kereta Api Indonesia (Persero), Tbk	2.981.217.540	1.272.357.650
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	90.686.900	(25.434.300)
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	5.994.011.420	1.002.078.680
PT Perum Pegadaian (Persero)	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(24.583.549)	(63.069.686)
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	1.642.834.200	1.198.960.400
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Tbk	466.514.550	624.340.400
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Tbk	-	-
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk	1.759.607.660	1.283.378.040
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	1.012.077.360	857.896.410
PT Timah (Persero), Tbk	43.699.650	(20.519.600)
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	(49.956.200)	(874.006.360)
<b>Sub jumlah</b>	<b><u>19.743.596.121</u></b>	<b><u>9.568.794.224</u></b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Selisih Penilaian Investasi - Saham yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia		
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	(6.478.982.950)	(4.078.982.950)
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	(512.483.672)	(932.483.672)
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	(902.195.060)	(1.218.445.060)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	(68.950.906)	(104.060.511)
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk	-	365.550.731
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	(2.981.813.232)	(2.998.409.232)
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	(2.978.693.499)	(2.798.943.499)
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	(2.611.213.879)	(1.744.081.879)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	(3.120.937)	(914.246.684)
PT Timah (Persero), Tbk	(1.305.860.623)	(1.794.435.147)
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	(1.422.516.901)	(859.016.901)
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	(10.185.718.131)	(5.318.086.131)
<b>Sub jumlah</b>	<b><u>(29.451.549.790)</u></b>	<b><u>(22.395.640.935)</u></b>
Selisih Penilaian Investasi - Penempatan Langsung Saham		
PT Dapensi Dwikarya	7.457.500.000	13.362.000.000
PT Dapensi Trio Usaha	42.753.000.000	42.753.000.000
PT Dapenta Eka Karya	-	(7.404.500.000)
PT Dago Endah	-	(32.000.000)
PT Pefindo	-	425.000.000
<b>Sub jumlah</b>	<b><u>50.210.500.000</u></b>	<b><u>49.103.500.000</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>56.233.924.893</u></b>	<b><u>54.179.256.649</u></b>
<b>Kas dan Bank</b>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	212.705.921	30.366.580
PT POS Indonesia (Persero)	12.723.686.146	20.441.352
	<b><u>12.936.392.067</u></b>	<b><u>50.807.932</u></b>
<b>Piutang luran</b>		
PT POS Indonesia (Persero) dan Peserta	25.333.544.879	23.042.144.700
<b>Beban Dibayar di Muka</b>		
PT POS Indonesia (Persero)	16.196.851.100	14.678.866.200
<b>Piutang Hasil Investasi</b>		
Piutang Hasil Investasi - Surat Berharga Negara Pemerintah Republik Indonesia	10.215.981.611	6.489.932.222
Piutang Hasil Investasi - Deposito Berjangka		
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	-	28.514.658
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	43.670.137	-

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Piutang Hasil Investasi - Deposito <i>on call</i> PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	1.232.877	-
Piutang Hasil Investasi - Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	218.333.333	218.333.333
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk	-	42.736.111
PT Angkasa Pura (Persero), Tbk	226.666.667	226.666.667
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	472.222	472.222
PT Bank Mandiri Taspen	87.694.444	87.694.444
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	184.444.444	336.444.444
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	487.391.667	487.391.667
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	107.652.777	107.652.777
PT Kereta Api Indonesia (Persero), Tbk	307.066.667	307.066.667
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	605.625.000	80.277.778
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1.240.500.000	911.500.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.172.230.554	2.191.327.776
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	377.444.444	377.444.444
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Tbk	145.666.667	243.611.111
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk	201.788.889	201.788.889
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	15.944.444	15.944.444
PT Timah (Persero), Tbk	55.902.778	55.902.778
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	632.583.334	632.583.334
<b>Sub jumlah</b>	<b>7.067.408.331</b>	<b>6.524.838.886</b>
Piutang hasil Investasi - Dividen PT Pefindo	-	11.050.000
Piutang hasil Investasi - Sewa Tanah dan Bangunan PT Dapensi Dwikarya	370.000.004	-
<b>Jumlah</b>	<b>17.698.292.960</b>	<b>13.054.335.766</b>
<b>Pendapatan Investasi</b>		
Pendapatan Investasi - Surat Berharga Negara Pemerintah Republik Indonesia	32.935.090.394	31.535.394.722
Pendapatan Investasi - Deposito Berjangka		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	431.354.209	273.511.315
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	98.747.881	82.055.066
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk	76.054.841	34.290.819
PT Bank Mandiri Taspen	348.897.068	-
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	1.232.877	-
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	25.903.932	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>982.190.808</b>	<b>389.857.200</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pendapatan Investasi - Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	5.700.000.000	4.841.458.333
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk	862.263.889	905.000.000
PT Angkasa Pura (Persero), Tbk	1.700.000.000	651.666.667
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	170.000.000	170.000.000
PT Bank Mandiri Taspen	902.000.000	902.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	918.000.000	1.790.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	4.903.000.000	5.252.155.556
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	1.685.000.000	1.039.776.388
PT Kereta Api Indonesia (Persero), Tbk	3.620.500.000	3.620.500.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	1.906.597.222	970.133.333
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	8.266.500.000	5.037.638.889
PT Perum Pegadaian (Persero)	-	33.250.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	13.176.652.778	12.224.690.277
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	1.720.000.000	1.720.000.000
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Tbk	1.862.055.556	1.960.000.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Tbk	184.533.333	156.566.667
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk	3.004.000.000	3.004.000.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	717.500.000	717.500.000
PT Timah (Persero), Tbk	437.500.000	689.666.667
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	5.580.000.000	6.019.375.000
<b>Sub jumlah</b>	<b>57.316.102.778</b>	<b>51.705.377.777</b>
Dividen - Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	-	69.906.750
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	132.163.060	212.005.026
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	24.212.442	113.432.592
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	24.726.414	81.107.097
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	-	6.558.881
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	134.263.156	586.820.097
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	-	17.817.210
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	210.012.500	184.881.840
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	-	2.418.990
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	-	281.852.487
<b>Sub jumlah</b>	<b>525.377.572</b>	<b>1.556.800.970</b>
Dividen - Penempatan Langsung Saham		
PT Dapensi Dwikarya	-	1.510.614.111
PT Dapensi Trio Usaha	4.825.935.821	4.873.511.847
PT Pefindo	12.000.000	13.000.000
<b>Sub jumlah</b>	<b>4.837.935.821</b>	<b>6.397.125.958</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sewa - Tanah dan Bangunan		
PT Dapenta Eka Karya	-	850.000.000
PT Dapensi Dwikarya	850.000.000	-
<b>Sub jumlah</b>	<b>850.000.000</b>	<b>850.000.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>97.446.697.373</b>	<b>92.434.556.627</b>
<b>Beban Gaji dan Honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas</b>	<b>2.920.919.639</b>	<b>3.145.021.748</b>
<b>Prosentase transaksi pihak-pihak berelasi dengan total akun terkait</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Investasi	75,691%	30,264%
Selisih Penilaian Investasi	38,631%	38,545%
Kas dan Bank	99,939%	83,342%
Piutang luran	100,000%	100,000%
Beban di Bayar di Muka	97,179%	95,543%
Piutang Hasil Investasi	94,927%	86,962%
Pendapatan Investasi	80,834%	66,879%
Beban Gaji dan Honorarium	25,597%	21,662%

Hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak-pihak berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan</u>
PT Pos Indonesia (Persero)	Pendiri
Pengurus, Dewan Pengawas dan Peserta	luran normal Peserta, beban gaji dan honorarium
PT Dago Endah	Penyertaan langsung pada saham
PT Dapensi Trio Usaha	Penyertaan langsung pada saham
PT Dapensi Dwikarya	Penyertaan langsung pada saham dan sewa tanah dan bangunan
PT Pefindo	Penyertaan langsung pada saham
Pemerintah Republik Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Angkasa Pura (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bank BTN Syariah, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bank Mandiri Taspen	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Kereta Api Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

<b>Pihak-pihak berelasi</b>	<b>Sifat Hubungan</b>
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Perum Pegadaian (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Pupuk Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Semen Gresik (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Timah (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia

**24. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

DAPENPOS menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: dikutip (tidak disesuaikan) dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- (ii) Tingkat 2: teknik lain dimana semua input yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar, dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (iii) Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar:

<b>31 Desember 2021</b>				
<b>Investasi</b>	<b>Nilai tercatat</b>	<b>Tingkat 1</b>	<b>Nilai Wajar</b>	
			<b>Tingkat 2</b>	<b>Tingkat 3</b>
Deposito <i>on Call</i>	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Deposito Berjangka	267.559.000.000	267.559.000.000	-	-
Surat Berharga Negara	529.944.645.005	389.891.195.380	140.053.449.625	-
Saham	72.642.434.500	72.642.434.500	-	-
Obligasi	751.790.766.761	567.815.350.310	183.975.416.451	-
Reksadana Pasar Uang	7.480.092.531	7.480.092.531	-	-
Penempatan Langsung	140.133.000.000	-	-	140.133.000.000
Tanah dan Bangunan	127.185.000.000	-	-	127.185.000.000
	<b>1.901.734.938.797</b>	<b>1.310.388.072.721</b>	<b>324.028.866.076</b>	<b>267.318.000.000</b>

<b>31 Desember 2020</b>				
<b>Investasi</b>	<b>Nilai tercatat</b>	<b>Tingkat 1</b>	<b>Nilai Wajar</b>	
			<b>Tingkat 2</b>	<b>Tingkat 3</b>
Deposito Berjangka	371.529.000.000	371.529.000.000	-	-
Surat Berharga Negara	330.097.479.119	179.863.686.260	150.233.792.859	-
Saham	96.616.611.000	96.616.611.000	-	-
Obligasi	772.861.527.264	589.924.596.950	182.936.930.314	-
Reksadana Pasar Uang	10.869.236.885	10.869.236.885	-	-
Penempatan Langsung	139.297.000.000	-	-	139.297.000.000
Tanah dan Bangunan	126.938.000.000	-	-	126.938.000.000
	<b>1.848.208.854.268</b>	<b>1.248.803.131.095</b>	<b>333.170.723.173</b>	<b>266.235.000.000</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**  
(dalam Rupiah)

---

**25. Dampak Pandemi Covid-19**

Dalam awal tahun 2020, telah terjadi pandemi COVID-19 (CoronaVirus Disease - 2019) yang dimulai di suatu kota di Negara Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia menjadi suatu pandemi secara cepat. Kondisi ini ternyata mengakibatkan adanya suatu ketidakpastian dalam perekonomian secara makro dan mikro, yang pada akhirnya mempengaruhi pertimbangan entitas dalam menyusun laporan keuangan.

Dana Pensiun telah mengambil kebijakan untuk mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap mengikuti saran dan himbauan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta staf karyawan bekerja di rumah (WFH) jika memungkinkan mengubah jadwal kerja, meminta staf karyawan yang terindikasi gejala COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri, mengadakan rapat virtual dengan cara telekonferensi.

Namun, Dana Pensiun masih mempelajari ketidakpastian sebagai dampak pandemi COVID-19 ini terhadap laporan keuangan 2022 selanjutnya, serta keberlanjutan usaha (going concern) secara jangka

**26. Penyelesaian laporan keuangan**

Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022.

---

# LAMPIRAN I

---

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

**A. Laporan Perkembangan Portofolio Investasi Dana Pensiun**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**  
(dalam rupiah)

<b>No</b>	<b>Jenis Investasi</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito on Call pada Bank	5.000.000.000	-
3	Deposito berjangka pada Bank	267.559.000.000	371.529.000.000
4	Sertifikat deposito pada Bank	-	-
5	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	529.944.645.005	330.097.479.119
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	72.642.434.500	96.616.611.000
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	751.790.766.761	772.861.527.264
9	Reksa Dana		
	a. Reksa dana pasar uang	-	-
	b. Reksa dana pendapatan tetap	-	-
	c. Reksa dana campuran	-	1.240.902.680
	d. Reksa dana saham	2.638.412.261	9.628.334.205
	e. Reksa dana terproteksi	-	-
	f. Reksa dana penjaminan	-	-
	g. Reksa dana indeks	4.841.680.270	-
	h. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas	-	-
	i. Reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	-	-
10	<i>Medium Term Notes</i> (MTN)	-	-
11	Efek beragun aset	-	-
12	Dana investasi real estat berbentuk KIK	-	-
13	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	-	-
14	<i>Repurchase Agreement</i> (REPO)	-	-
15	Penyertaan langsung di Indonesia	140.133.000.000	139.297.000.000
16	Tanah di Indonesia	-	-
17	Bangunan di Indonesia	-	-
18	Tanah dan Bangunan	127.185.000.000	126.938.000.000
19	Obligasi Daerah	-	-
20	Dana investasi infrastruktur berbentuk KIK	-	-
	<b>Total Investasi</b>	<b>1.901.734.938.797</b>	<b>1.848.208.854.268</b>

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

**B. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun**

**Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021**

(dalam Rupiah)

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi yang terealisasi					Hasil Investasi		Hasil Investasi Bersih (10) =(3)+(4)+(5) +(7)+(8)-(9)
		Bunga/bagi hasil (3)	Dividen (4)	Sewa (5)	Laba/Rugi Pelepasan (6)	Pendapatan Inv lainnya (7)	Yang Belum terealisasi (8)	Beban Investasi (9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tabungan pada Bank								-
2	Deposito on Call pada Bank	285.774.838							285.774.838
3	Deposito berjangka pada Bank	18.536.040.230							18.536.040.230
4	Sertifikat deposito pada Bank								-
5	Surat berharga yang diterbitkan BI								-
6	Surat Berharga Negara	32.935.090.394			2.637.711.653		(2.171.224.798)	132.293.316	33.269.283.933
7	Saham yang tercatat di BEI		1.407.991.272		(8.737.396.646)		(3.531.971.354)	270.270.415	(11.131.647.143)
8	Obligasi korporasi yang tercatat di BEI	67.602.516.667					8.929.239.497	258.015.549	76.273.740.615
9	Reksa Dana								-
	a. Reksa dana pasar uang								-
	b. Reksa dana pendapatan tetap								-
	c. Reksa dana campuran								-
	d. Reksa dana saham		31.800.000		(76.592.160)		410.855.646		366.063.486
	e. Reksa dana terproteksi								-
	f. Reksa dana penjaminan								-
	g. Reksa dana indeks								-
	h. Reksa dana berbentuk KIK Penyertaan Terbatas								-
	i. Reksa dana yang saham atau unit penertaannya diperdagangkan di BEI								-
10	Medium Term Notes (MTN)								-
11	Efek beragun aset								-
12	Dana investasi real estat berbentuk KIK								-
13	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di BEI								-
14	Repurchase Agreement (REPO)								-
15	Penyertaan langsung di Indonesia		4.837.935.821		240.500.000		1.107.000.000	241.691.800	5.943.744.021
16	Tanah								-
17	Bangunan								-
18	Tanah dan Bangunan			850.000.000			261.749.992	251.405.280	860.344.712

Dana Pensiun Pos Indonesia  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Portofolio Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi yang terealisasi					Hasil Investasi		Hasil Investasi Bersih
		Bunga/bagi hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Pendapatan Inv lainnya	Yang Belum terealisasi	Beban Investasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(3)+(4)+(5) +(7)+(8)-(9)
19	Obligasi Daerah								
20	Dana investasi infrastruktur berbentuk KIK								
	<b>Total Hasil</b>	<b>119.359.422.129</b>	<b>6.277.727.093</b>	<b>850.000.000</b>	<b>(5.935.777.153)</b>	<b>-</b>	<b>5.005.648.983</b>	<b>1.153.676.360</b>	<b>124.403.344.692</b>
	<b>Rata-rata Investasi</b>								
	$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$								1.870.011.961.460
	<b>ROI (Return on Investment) =</b>								
	<b>Total Hasil Investasi</b>								
	<b>Rata-rata Investasi</b>								6,65%

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

**C. Checklist Analisis Investasi**

**Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021**

(dalam Rupiah)

No	Pertanyaan	Ya*)	Tidak*)
1	Apakah Dana Pensiun telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko?	√	
2	Apakah kesesuaian investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah);	(--)	(--)
3	Apakah Investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi?	√	
	3.1. Apakah hasil investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi?	√	
	3.2. Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana pensiun yang ditempatkan untuk setiap jenis investasi sesuai dengan Arahan Investasi?	√	
	3.3. Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang pada satu pihak sesuai dengan Arahan Investasi?	√	
	3.4. Apakah Dana Pensiun tidak melanggar penempatan pada obyek investasi yang dilarang sebagaimana diatur Arahan Investasi ?	√	
	3.5. Apakah likuiditas minimum pada akhir periode telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi?	√	
	3.6. Apakah telah dilakukan pengkajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi?	√	
	3.7. Apakah Pengurus menggunakan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan, dan jasa lain dalam pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi?		√
4	Apakah alokasi hasil investasi ke rekening peserta sesuai dengan ketentuan? (khusus untuk PPIP)	(--)	(--)
5	Apakah pada saat penempatan seluruh investasi pada obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan efek beragun aset telah memiliki peringkat Investment Grade?	√	
6	Apakah seluruh investasi pada efek beragun aset dari KIK EBA dan unit penyertaan investasi real estate berbentuk KIK telah ditempatkan pada efek yang melalui penawaran umum?	(--)	(--)
7	Pada saat melakukan penempatan investasi pada kontrak opsi saham:		
	7.1. Apakah kontrak opsi saham tersebut ditempatkan pada opsi jual atas saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun?	(--)	(--)
	7.2. Apakah Dana Pensiun memiliki investasi saham paling rendah 10% dari total investasi?	(--)	(--)
8	Pada saat melakukan penempatan investasi pada reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas:		
	8.1. Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah	(--)	(--)
	8.2. Apakah tingkat resiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah atau rendah?	(--)	(--)
	8.3. Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai?	(--)	(--)
	8.4. Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasihat investasi?	(--)	(--)

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

No	Pertanyaan	Ya*)	Tidak*)
9	Pada saat melakukan penempatan investasi pada MTN dan REPO:	(--)	(--)
	9.1. Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp200 miliar?	(--)	(--)
	9.2. Apakah tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah atau rendah?	(--)	(--)
	9.3. Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai?	(--)	(--)
	9.4. Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasihat investasi?	(--)	(--)
10	Investasi pada penyertaan langsung	(--)	(--)
	10.1 Apakah memiliki penyertaan langsung pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan?	(--)	(--)
	10.2 Apakah memiliki penyertaan langsung di luar negeri?	(--)	(--)
11	Apakah pada kontrak derivatif dan REPO dilakukan dengan <i>counterparty</i> yang telah memiliki peringkat investment grade?	(--)	(--)
12	Apakah dasar penilaian investasi telah sesuai dengan ketentuan?	√	

Catatan:

- Butir 4 Dana Pensiun Pos Indonesia merupakan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti.
- Butir 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tidak ada penempatan pada investasi tersebut.

**D. Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak**  
**Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Tanggal Ketidaksesuaian*)	Nama Pihak	Investasi		
			Jenis	Nilai (Rp)	% dari total Investasi
1	(--)	(--)	1.	(--)	(--)
			2.	(--)	(--)
			3.	(--)	(--)
			dst.	(--)	(--)
2	(--)	(--)	1.	(--)	(--)
			2.	(--)	(--)
			3.	(--)	(--)
			dst.	(--)	(--)
3	(--)	(--)	1.	(--)	(--)
			2.	(--)	(--)
			3.	(--)	(--)
			dst.	(--)	(--)

**E. Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis**  
**Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021**  
 (dalam Rupiah)

No	Tanggal Ketidak Sesuai*)	Jenis Investasi (% dari total investasi)					
		Surat Berharga Negara **)	Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas	MTN	REPO	Penyertaan Langsung	Tanah dan atau Bangunan
1	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
2	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
3	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
4	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
5	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
dst	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)

**F. Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Khusus**  
**Per 31 Desember 2021**  
 (dalam Rupiah)

No	Jenis Investasi dengan Batasan Khusus	Jumlah (Rp)
1	Investasi pada pihak yang merugi	-
2	Penyertaan langsung di Indonesia	140.133.000.000
3	Tanah dan atau Bangunan	127.185.000.000
	Total Investasi dengan batasan khusus (a)	<b>267.318.000.000</b>
	Total Investasi Dana Pensiun (b)	<b>1.901.734.938.797</b>
	Presentasi investasi batasan khusus (a/b)	14,06%

Sesuai Arahan Investasi Nomor : KD. 021/DIRUT/0221 bahwa batasan kuantitatif Investasi Khusus dilarang melebihi 40% dari jumlah Investasi Dapenpos, sedangkan pada Tahun 2021 persentasi Investasi Dapenpos sebesar 14,06% masih di bawah ketentuan yang ditetapkan dalam Arahan Investasi.

**G. Laporan Paket Investasi (khusus DPLK)**  
**Per 31 Desember 2021**  
 (dalam Rupiah)

No	Jenis / Paket Investasi	Jumlah	% *)	Jumlah Peserta	Akumulasi Data Peserta
		Rp			Rp
1	Paket A				
	- Jenis Investasi a			(--)	(--)
	- Jenis Investasi b			(--)	(--)
	- Jenis Investasi dst.			(--)	(--)
	Total Paket A			(--)	(--)

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

No	Jenis / Paket Investasi	Jumlah	% *)	Jumlah Peserta	Akumulasi Data Peserta
		Rp			Rp
	- Jenis Investasi a			(--)	(--)
	- Jenis Investasi b			(--)	(--)
	- Jenis Investasi dst.			(--)	(--)
	Total Paket B			(--)	(--)
dst					
	Total			(--)	(--)

**H. Pengungkapan Penggunaan Penerima Titipan**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Nama Penerima Titipan	No. Kontrak	Tgl Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Dana yang dititipkan (Rp)	Jumlah Biaya yang dibebankan (Rp)
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	OPR/007/CST/2014	18/08/2014	1 (satu) tahun dan apabila waktu perjanjian berakhir maka setiap tanggal jatuh tempo jangka waktu perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama (automatic roll over)	SBN	529.944.645.005	132.293.316
		18/PKS/DAPENPOS/0514			Saham	72.642.434.500	270.270.415
					Obligasi	751.790.766.761	258.015.549

**I. Pengungkapan Manajer Investasi (Apabila Menggunakan Jasa Manajer Investasi)**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan	Tingkat Hasil Investasi Bersih	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
						(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	(--)	(--)	(--)	(--)	1.	(--)	(--)	(--)	(--)
					2.	(--)	(--)	(--)	(--)
					3. dst.	(--)	(--)	(--)	(--)
2	(--)	(--)	(--)	(--)	1.	(--)	(--)	(--)	(--)
					2.	(--)	(--)	(--)	(--)
					3. dst.	(--)	(--)	(--)	(--)
dst	(--)	(--)	(--)	(--)					
			Total			(--)	(--)	(--)	(--)

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

**J. Pengungkapan Investasi Tabungan pada Bank**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Nama Bank	Tanggal Awal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Masa Perjanjian	Nilai dalam Mata Uang Asing *)	Tingkat Suku Bunga/Nisbah/Imbal Hasil Lainnya
1.	Tabungan (per rekening)				(--)	(--)
	1. (--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	2. (--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	dst.	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	Total Tabungan	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)

**K. Pengungkapan Investasi Deposito *on Call* dan Deposito Berjangka pada Bank**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No.	Nama Bank	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal dalam Mata Uang Asing	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah
	Deposito On Call (Per Bilyet)						
	Deposito Bank BNI Posindo	29-12-2021	5.000.000.000		03-01-2022	5 hari	3,00%
	Deposito Berjangka (per Bilyet)						
1	Deposito BTN Syariah						
	Dep Bank BTN Syariah	08-12-2021	1.200.000.000		10-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank BTN Syariah	13-12-2021	2.870.000.000		13-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank BTN Syariah	16-12-2021	625.000.000		17-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank BTN Syariah	20-12-2021	5.000.000.000		20-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank BTN Syariah	29-12-2021	5.000.000.000		31-01-2022	1 bln	M0
	Total		14.695.000.000				
2	Deposito Bank Jabar						
	Dep Bank Jabar	09-12-2021	5.000.000.000		10-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank Jabar	10-12-2021	5.000.000.000		10-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank Jabar	16-12-2021	6.000.000.000		17-01-2022	1 bln	2,80%
	Dep Bank Jabar	16-12-2021	6.250.000.000		17-01-2022	1 bln	2,80%
	Dep Bank Jabar	16-12-2021	2.500.000.000		17-01-2022	1 bln	2,80%
	Dep Bank Jabar	30-11-2021	5.000.000.000		28-02-2022	1 bln	3,00%
	Total		29.750.000.000				

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

No.	Nama Bank	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal dalam Mata Uang Asing	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/ Nisbah
3	Deposito BRI						
	Dep Bank BRI	13-12-2021	3.000.000.000		13-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank BRI	13-12-2021	6.600.000.000		13-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank BRI	13-12-2021	3.260.000.000		17-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank BRI	15-12-2021	5.000.000.000		17-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank BRI	15-12-2021	2.900.000.000		17-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank BRI	20-12-2021	5.900.000.000		20-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank BRI	20-12-2021	5.000.000.000		20-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank BRI	28-12-2021	5.000.000.000		28-01-2022	1 bln	3,00%
	Dep Bank BRI	29-12-2021	2.800.000.000		31-01-2022	1 bln	3,00%
	Total		39.460.000.000				
4	Deposito Bank Mandiri						
	Dep Bank Mandiri	01/12/2021	7.850.000.000		03-01-2022	1 bln	4,00%
	Dep Bank Mandiri	03/12/2021	479.000.000		03-01-2022	1 bln	4,00%
	Dep Bank Mandiri	10/12/2021	4.400.000.000		10/01/2022	1 bln	3,50%
	Dep Bank Mandiri	13/12/2021	8.730.000.000		13/01/2022	1 bln	4,00%
	Dep Bank Mandiri	15-12-2021	4.800.000.000		17-01-2022	1 bln	4,00%
	Dep Bank Mandiri	20-12-2021	3.685.000.000		20-01-2022	1 bln	4,00%
	Dep Bank Mandiri	29/12/2021	360.000.000		31/01/2022	1 bln	4,00%
	Total		30.304.000.000				
5	Deposito Bank Muamalat						
	Dep Bank Muamalat	01-12-2021	5.000.000.000		03-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	01-12-2021	5.355.000.000		03-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	06-12-2021	700.000.000		06-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	06-12-2021	985.000.000		06-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	08-12-2021	1.450.000.000		10-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	13-12-2021	6.880.000.000		13-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	13-12-2021	2.000.000.000		13-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	20-12-2021	6.900.000.000		20-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	21-12-2021	5.725.000.000		21/01/2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	28/12/2021	5.000.000.000		28/01/2022	1 bln	M0
	Dep Bank Muamalat	29/12/2021	2.000.000.000		31/01/2022	1 bln	M0
	Total		41.995.000.000				
6	Deposito Bank BTPN Syariah						
	Dep Bank BTPN Syariah	01-12-2021	6.000.000.000		03-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank BTPN Syariah	13-12-2021	4.000.000.000		13-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank BTPN Syariah	13-12-2021	450.000.000		13-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank BTPN Syariah	20-12-2021	5.000.000.000		20-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank BTPN Syariah	22-12-2021	700.000.000		24-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank BTPN Syariah	29-12-2021	1.135.000.000		31-01-2022	1 bln	M0
	Total		17.285.000.000				

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

No.	Nama Bank	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal dalam Mata Uang Asing	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/ Nisbah
7	Deposito Bank Bukopin syariah						
	Dep Bank Nagari	02-12-2021	1.160.000.000		03-01-2022	1 bln	4,15%
	Dep Bank Nagari	13-12-2021	4.000.000.000		13-01-2022	1 bln	4,15%
	Dep Bank Nagari	13-12-2021	4.000.000.000		13-01-2022	1 bln	4,15%
	Dep Bank Nagari	13-12-2021	3.900.000.000		17-01-2022	1 bln	4,15%
	Dep Bank Nagari	20-12-2021	7.000.000.000		20-01-2022	1 bln	4,15%
	Dep Bank Nagari	21-12-2021	4.900.000.000		21-01-2022	1 bln	4,15%
	Dep Bank Nagari	22-12-2021	8.230.000.000		24-01-2022	1 bln	4,15%
	Dep Bank Nagari	23-12-2021	550.000.000		24-01-2022	1 bln	4,15%
	Dep Bank Nagari	27-02-2021	485.000.000		27-01-2022	1 bln	4,15%
	Dep Bank Nagari	14-12-2021	5.350.000.000		14-03-2022	1 bln	4,25%
	Total		39.575.000.000				
8	Deposito Bank Sahabat						
	Dep Bank Sahabat	01-12-2021	865.000.000		03-01-2022	1 bln	3,75%
	Dep Bank Sahabat	01-12-2021	6.750.000.000		03-01-2022	1 bln	4,00%
	Dep Bank Sahabat	08-12-2021	850.000.000		10-01-2022	1 bln	3,75%
	Dep Bank Sahabat	13-12-2021	4.000.000.000		13-01-2022	1 bln	3,75%
	Dep Bank Sahabat	15-12-2021	2.765.000.000		17-01-2022	1 bln	3,75%
	Dep Bank Sahabat	20-12-2021	5.000.000.000		20-01-2022	1 bln	3,75%
	Dep Bank Sahabat	20-12-2021	1.800.000.000		20-01-2022	1 bln	3,75%
	Dep Bank Sahabat	21-12-2021	5.000.000.000		21-01-2022	1 bln	3,75%
	Dep Bank Sahabat	24-12-2021	220.000.000		24-01-2022	1 bln	3,75%
	Dep Bank Sahabat	28-12-2021	5.000.000.000		28-01-2022	1 bln	3,75%
	Dep Bank Sahabat	29-12-2021	220.000.000		31-01-2022	1 bln	3,75%
	Total		32.470.000.000				
9	Deposito Bank Syariah Indonesia						
	Dep Bank Syariah Indones	14-12-2021	5.000.000.000		14-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Syariah Indones	15-12-2021	5.000.000.000		17-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Syariah Indones	20-12-2021	5.000.000.000		20-01-2022	1 bln	M0
	Dep Bank Syariah Indones	28-12-2021	6.195.000.000		28-01-2022	1 bln	M0
	Total		21.195.000.000				
10	Deposito Bank MNC Internasional						
	Dep Bank MNC Internasio	15-12-2021	830.000.000		17-01-2022	1 bln	3,50%
	Total		830.000.000				
	Total Deposito Berjangka		267.559.000.000				

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

**L. Pengungkapan Investasi Sertifikat Deposito pada Bank dan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Jenis Investasi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Nominal Rp	Nilai Tunai Rp	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Diskonto
1.	Setifikat Deposito (per bilyet)							
	1.	--)	--)	--)	--)	--)	--)	--)
	2.	--)	--)	--)	--)	--)	--)	--)
	dst.	--)	--)	--)	--)	--)	--)	--)
	Total Setifikat Deposito	--)	--)	--)	--)	--)	--)	--)
2.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia							
	1.	--)	--)	--)	--)	--)	--)	--)
	2.	--)	--)	--)	--)	--)	--)	--)
	dst.	--)	--)	--)	--)	--)	--)	--)
	Total Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank	--)	--)	--)	--)	--)	--)	--)

**M. Laporan Pengungkapan Investasi Surat Berharga Negara Per 31 Desember 2021**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.05/2016 dan 56/POJK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, bahwa minimum pemenuhan investasi SBN untuk Dana Pensiun per 31 Desember 2021 minimum sebesar 30% dari total investasi.

Sampai dengan 31 Desember 2021, penempatan Investasi pada Surat Berharga Negara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Investasi	Nilai Wajar	Presentase SBN (%)	Nilai Wajar (Komposisi SBN)	% SBN	% NWI
1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
a.	Surat Berharga Negara					
1	OBL NEGARA RI SERI IFR0007	20.292.251.366	100%	20.292.251.366	2,13	1,07
2	OBL NEGARA RI SERI FR0042	10.264.636.390	100%	10.264.636.390	1,08	0,54
3	OBL NEGARA RI SERI FR0071	14.926.737.890	100%	14.926.737.890	1,56	0,78
4	OBL NEGARA RI SERI FR0052	26.146.376.347	100%	26.146.376.347	2,74	1,37
5	OBL NEGARA RI SERI FR0068	39.202.919.792	100%	39.202.919.792	4,11	2,06
6	OBL NEGARA RI SERI FR0050	5.314.347.643	100%	5.314.347.643	0,56	0,28
	Jumlah dipindahkan	116.147.269.428		116.147.269.428	12,17	6,11

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

No	Jenis Investasi	Nilai Wajar	Presentase SBN (%)	Nilai Wajar (Komposisi SBN)	% SBN	% NWI
1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
	Jumlah pindahan	116.147.269.428		116.147.269.428	12,17	6,11
7	OBL NEGARA RI SERI FR0056	9.899.593.049	100%	9.899.593.049	1,04	0,52
8	OBL NEGARA RI SERI FR0070	9.953.882.974	100%	9.953.882.974	1,04	0,52
9	OBL NEGARA RI SERI FR0067	4.052.704.174	100%	4.052.704.174	0,42	0,21
10	OBL NEGARA RI SERI FR0073	27.930.592.343	100%	27.930.592.343	2,93	1,47
11	OBL NEGARA RI SERI PBS012	47.892.947.771	100%	47.892.947.771	5,02	2,52
12	OBL NEGARA RI SERI FR0058	44.899.993.600	100%	44.899.993.600	4,70	2,36
13	OBL NEGARA RI SERI FR0072	22.225.093.400	100%	22.225.093.400	2,33	1,17
14	OBL NEGARA RI SERI FR0074	20.985.257.658	100%	20.985.257.658	2,20	1,10
15	OBL NEGARA RI SERI FR0057	12.496.594.300	100%	12.496.594.300	1,31	0,66
16	OBL NEGARA RI SERI FR0087	50.495.771.500	100%	50.495.771.500	5,29	2,66
17	OBL NEGARA RI SERI PBS029	40.760.505.904	100%	40.760.505.904	4,27	2,14
18	OBL NEGARA RI SERI FR0088	40.100.000.000	100%	40.100.000.000	4,20	2,11
19	OBL NEGARA RI SERI FR0091	25.208.250.000	100%	25.208.250.000	2,64	1,33
20	OBL NEGARA RI SERI PBS004	56.896.188.904	100%	56.896.188.904	5,96	2,99
	<b>Sub Total SBN</b>	<b>529.944.645.005</b>		<b>529.944.645.005</b>	<b>100</b>	<b>27,87</b>
b.	Obligasi BUMN (Infrastruktur)					
1	PLN IX B TAHUN 2007	8.992.684.057	100%	8.992.684.057	0,94	0,47
2	PLN XII SERI B 2010	20.982.732.394	100%	20.982.732.394	2,20	1,10
3	BKLJT II WASKITA KARYA III/17 SR B	25.026.470.500	100%	25.026.470.500	2,62	1,32
4	BKLJT I SEMEN INDONESIA THP I/2017	14.320.153.260	100%	14.320.153.260	1,50	0,75
5	BKLJT II ADHI KARYA TH I/2017 SR A	30.203.570.100	100%	30.203.570.100	3,16	1,59
6	BKLJT II PLN THP I/2017 SR B	12.000.000.000	100%	12.000.000.000	1,26	0,63
7	BKLJT I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	15.466.514.550	100%	15.466.514.550	1,62	0,81
8	OBLIGASI I KERETA API INDONESIA THP I/2017	26.737.412.750	100%	26.737.412.750	2,80	1,41
9	BKLJT III WASKITA KARYA II/18 SR B	20.000.000.000	100%	20.000.000.000	2,10	1,05
10	BKLJT III PLN THP III/2019 SR B	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	0,52	0,26
11	BKLJT III WASKITA K THP IV 2019 SR A	10.023.703.300	100%	10.023.703.300	1,05	0,53
12	BKLJT III WASKITA K THP IV 2019 SR B	7.899.870.000	100%	7.899.870.000	0,83	0,42
13	BKLJT I SEMEN IND TH II 2019 SR A	21.439.454.400	100%	21.439.454.400	2,25	1,13
14	BKLJT II ADHI KARYA II 2019 SR B	20.296.183.400	100%	20.296.183.400	2,13	1,07
15	BKLJT III PLN THP IV/2019 SR B	20.000.000.000	100%	20.000.000.000	2,10	1,05
16	BKLJT II PTPP THP II 2019 SR B	10.003.605.800	100%	10.003.605.800	1,05	0,53
17	BKLJT II KERETA API INDONESIA /2019	20.243.804.790	100%	20.243.804.790	2,12	1,06
18	BKLJT III PLN THP VI/2020 SR C	40.000.000.000	100%	40.000.000.000	4,19	2,10
19	BKLJT III PLN THP VII/2020 SR B	20.000.000.000	100%	20.000.000.000	2,10	1,05
20	BKLJT III PLN THP VII/2020 SR C	20.000.000.000	100%	20.000.000.000	2,10	1,05
21	BKLJT II JASA MARGA I 2020 SR B	10.394.028.900	100%	10.394.028.900	1,09	0,55
22	BKLJT II JASA MARGA I 2020 SR C	10.311.011.300	100%	10.311.011.300	1,08	0,54
23	BKLJT III ADHI KARYA I/2020	10.185.043.800	100%	10.185.043.800	1,07	0,54
24	BKLJT III PTPP I TH 2021 SR A	15.065.975.700	100%	15.065.975.700	1,58	0,79
25	BKLJT I PTPP TH I 2021 SR A (SUKUK)	10.021.105.400	100%	10.021.105.400	1,05	0,53
	<b>Sub Total Obligasi</b>	<b>424.613.324.401</b>		<b>424.613.324.401</b>	<b>100</b>	<b>22,33</b>
	<b>Total SBN + Obligasi</b>	<b>954.557.969.406</b>		<b>954.557.969.406</b>	<b>100</b>	<b>50,19</b>
	<b>TOTAL NILAI WAJAR INVESTASI</b>			<b>1.901.734.938.797</b>		

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

**Laporan Pengungkapan Investasi Surat Berharga Negara**  
**Per 31 Desember 2021**

Surat Berharga Negara ( Amortized Cost dan AFS )

No	Nama Produk	Tanggal Perolehan	Biaya Perolehan	Nilai Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Pasar/ Nilai Wajar Amortized Cost (Rp)	Tingkat bunga Nisbah/imbah hasil lainnya
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	
<b>1</b>	<b>Surat Berharga Negara (SBN)/ Amortized Cost</b>						
1	OBL NEGARA RI SERI IFR0007	11-03-2010	19.734.420.000	20.000.000.000	15-01-2025	20.292.251.366	10,25%
2	OBL NEGARA RI SERI FR0042	30-12-2009	9.660.000.000	10.000.000.000	15-07-2027	10.264.636.390	10,25%
3	OBL NEGARA RI SERI FR0071	29-02-2016	14.894.000.000	15.000.000.000	15-03-2029	14.926.737.890	9,00%
4	OBL NEGARA RI SERI FR0052	26-09-2009	24.777.833.333	25.000.000.000	15-08-2030	26.146.376.347	10,50%
5	OBL NEGARA RI SERI FR0068	12-05-2020	39.515.500.000	40.000.000.000	15-03-2034	39.202.919.792	8,38%
6	OBL NEGARA RI SERI FR0050	14-01-2011	5.348.000.000	5.000.000.000	15-07-2038	5.314.347.643	10,50%
7	OBL NEGARA RI SERI FR0056	07-09-2018	9.850.000.000	10.000.000.000	15-09-2026	9.899.593.049	8,38%
8	OBL NEGARA RI SERI FR0070	07-09-2018	9.900.000.000	10.000.000.000	15-03-2024	9.953.882.974	8,38%
9	OBL NEGARA RI SERI FR0067	20-09-2018	4.047.810.000	4.173.000.000	15-02-2044	4.052.704.174	8,75%
	<b>Jumlah</b>		<b>137.727.563.333</b>	<b>139.173.000.000</b>	-	<b>140.053.449.625</b>	
	<b>Surat Berharga Negara (AFS)</b>						
1	OBL NEGARA RI SERI FR0073	13-10-2016	26.438.633.450	24.082.000.000	15-05-2031	27.930.592.343	8,750%
2	OBL NEGARA RI SERI PBS012	26-07-2018	44.505.197.480	40.580.000.000	15-11-2031	47.892.947.771	8,875%
3	OBL NEGARA RI SERI FR0058	27-05-2013	42.832.857.143	40.000.000.000	15-06-2032	44.899.993.600	8,250%
4	OBL NEGARA RI SERI FR0072	04-09-2018	20.570.833.333	20.000.000.000	15-05-2036	22.225.093.400	8,250%
5	OBL NEGARA RI SERI FR0074	31-10-2017	19.568.791.020	19.695.000.000	15-08-2032	20.985.257.658	7,500%
6	OBL NEGARA RI SERI FR0057	17-05-2019	10.825.000.000	10.000.000.000	15-05-2041	12.496.594.300	9,500%
7	OBL NEGARA RI SERI PBS029	15-07-2021	40.048.890.684	40.584.000.000	15-03-2034	40.760.505.904	6,375%
8	OBL NEGARA RI SERI FR0088	30-06-2021	39.715.000.000	40.000.000.000	15-06-2036	40.100.000.000	6,250%
9	OBL NEGARA RI SERI PBS004	19-07-2021	55.990.500.000	58.400.000.000	15-02-2037	56.896.188.904	6,100%
10	OBL NEGARA RI SERI FR0087	29-09-2021	50.615.000.000	50.000.000.000	15-03-2031	50.495.771.500	6,500%
11	OBL NEGARA RI SERI FR0091	30-09-2021	25.375.000.000	25.000.000.000	15-04-2032	25.208.250.000	6,375%
	<b>Jumlah</b>		<b>376.485.703.110</b>	<b>368.341.000.000</b>	-	<b>389.891.195.380</b>	
<b>2</b>	<b>SUKUK (per produk)</b> NIHIL						
<b>3</b>	<b>Surat Perbendaharaan Negara</b> (per produk) NIHIL						
	<b>Total Surat Berharga Negara</b>		<b>514.213.266.443</b>	<b>507.514.000.000</b>		<b>529.944.645.005</b>	

**N. Pengungkapan Investasi pada Saham Yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Nama Emiten	Nilai Perolehan		Harga Pasar
		Jumlah Lembar	Total	
1	ADHI	3.750.000	9.835.232.950	3.356.250.000
2	ASII	1.136.400	8.480.827.800	6.477.480.000
3	BBNI	550.000	4.614.695.060	3.712.500.000
4	BBRI	250.000	1.096.450.906	1.027.500.000
5	BMRI	600.000	4.727.483.672	4.215.000.000
6	INTP	442.500	10.378.564.636	5.354.250.000
7	LSIP	4.056.200	8.509.709.454	4.806.597.000
8	PTBA	1.797.500	7.849.918.499	4.871.225.000
	Jumlah dipindahkan	12.582.600	55.492.882.977	33.820.802.000

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

No	Nama Emiten	Nilai Perolehan		Harga Pasar
		Jumlah Lembar	Total	
	Jumlah pindahan	12.582.600	55.492.882.977	33.820.802.000
9	SMRA	4.012.500	7.063.002.105	3.350.437.500
10	TLKM	250.000	1.013.120.937	1.010.000.000
11	TINS	2.809.800	5.394.119.623	4.088.259.000
12	UNTR	322.800	10.276.943.338	7.150.020.000
13	UNVR	387.500	3.360.144.375	1.592.625.000
14	JSMR	1.171.800	7.169.515.879	4.558.302.000
15	BBTN	3.319.200	8.724.029.232	5.742.216.000
16	ICBP	262.500	3.058.605.000	2.283.750.000
17	LPKR	6.375.000	7.009.052.777	898.875.000
18	WIKA	5.531.400	16.297.915.131	6.112.197.000
19	ASRI	4.750.000	4.961.778.749	769.500.000
20	MAIN	1.225.300	3.386.369.953	820.951.000
21	WSKT	700.000	1.867.016.901	444.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>43.700.400</b>	<b>135.074.496.977</b>	<b>72.642.434.500</b>

**O. Pengungkapan Investasi pada Obligasi Korporasi Yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No.	Nama Obligasi	Perusahaan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp)	Perolehan		Pelaporan		Tingkat Suku Bunga
						Nilai (Rp)	Rating	Nilai Wajar / Amortized Cost	Rating	
<b>A</b>	<b>Obligasi ( Amortized Cost)</b>									
1	PLN IX B TAHUN 2007	PT PLN	01-11-2008	10-07-2022	9.000.000.000	9.000.000.000	IdA+	8.992.684.057	IdA+	10,90%
2	PLN XII SERI B 2010	PT PLN	08-07-2010	08-07-2022	21.000.000.000	21.000.000.000	idAAA	20.982.732.394	idAAA	10,40%
3	BKLJT II PLN THP I/2017 SR B	PT PLN	11-07-2017	11-07-2024	12.000.000.000	12.000.000.000	idAAA	12.000.000.000	idAAA	8,10%
4	BKLJT III PLN THP III/2019 SR B	PT PLN	19-02-2019	19-02-2024	5.000.000.000	5.000.000.000	idAAA	5.000.000.000	idAAA	9,10%
5	BKLJT III PLN THP IV/2019 SR B	PT PLN	01-08-2019	01-08-2026	20.000.000.000	20.000.000.000	idAAA	20.000.000.000	idAAA	8,50%
6	MANDIRI TASPEN I/2019 SR B	PT Mandiri Taspen	25-11-2019	26-11-2024	11.000.000.000	11.000.000.000	AA (idn)	11.000.000.000	AA (idn)	8,20%
7	BKLJT III PLN THP VI/2020 SR C	PT PLN	17-02-2020	18-02-2030	40.000.000.000	40.000.000.000	idAAA	40.000.000.000	idAAA	8,00%
8	BKLJT III PLN THP VII/2020 SR B	PT PLN	06-05-2020	06-05-2025	20.000.000.000	20.000.000.000	idAAA	20.000.000.000	idAAA	8,25%
9	BKLJT III PLN THP VII/2020 SR C	PT PLN	06-05-2020	06-05-2027	20.000.000.000	20.000.000.000	idAAA	20.000.000.000	idAAA	8,55%
10	BKLJT I ANGKASA PURA II THP II 2020 SR B	PT Angkasa Pura	12-08-2020	13-08-2025	20.000.000.000	20.000.000.000	idAAA	20.000.000.000	idAAA	8,50%
11	BKLJT VI SMF TH I 2021 SR B	PT SMF	07-07-2021	08-07-2026	6.000.000.000	6.000.000.000	idAAA	6.000.000.000	idAAA	6,40%
	<b>Jumlah</b>				<b>184.000.000.000</b>	<b>184.000.000.000</b>		<b>183.975.416.451</b>		
<b>B</b>	<b>Obligasi (AFS)</b>									
1	BKLJT I TELKOM THP I SR B/15	PT Telkom	22-06-2015	23-06-2025	7.000.000.000	7.000.000.000	idAAA	8.012.077.360	idAAA	10,25%
2	BKLJT II BTN THP I 2015 SR D	Bank BTN	07-07-2015	08-07-2025	3.000.000.000	3.000.000.000	idAA	3.431.778.330	idAA+	10,50%
3	BKLJT II WASKITA KARYA III/17 SR B	PT Waskita	21-02-2017	21-02-2022	25.000.000.000	25.000.000.000	idA-	25.026.470.500	idA-	9,00%
4	BKLJT I BANK MANDIRI I/2016 SR B	Bank Mandiri	28-02-2017	30-09-2023	2.000.000.000	1.977.000.000	idAAA	2.129.766.660	idAAA	8,50%
5	BKLJT II BRI THP II THN 2017 SR C	Bank BRI	11-04-2017	11-04-2022	10.000.000.000	10.000.000.000	idAAA	10.138.727.100	idAAA	8,30%
6	BKLJT I SEMEN IND THP I/2017	PT Semen Indonesia	19-06-2017	20-06-2022	14.000.000.000	14.000.000.000	idAA+	14.320.153.260	idAA+	8,60%
7	BKLJT II ADHI KARYA TH I/2017 SR A	PT Adhi Karya	21-06-2017	22-06-2022	30.000.000.000	30.000.000.000	idA-	30.203.570.100	idA-	9,25%
8	BKLJT III BTN TH I 2017 SR B	Bank BTN	12-07-2017	13-07-2022	10.000.000.000	10.000.000.000	idAA+	10.244.371.600	idAA+	8,50%
9	BKLJT III BTN TH I 2017 SR C	Bank BTN	13-07-2017	13-07-2024	10.000.000.000	10.000.000.000	idAA+	10.780.785.900	idAA+	8,70%
10	BKLJT I PUPUK TH I/2017 SR B	PT Pupuk	12-07-2017	12-07-2024	20.000.000.000	20.000.000.000	idAAA	21.642.834.200	AAA (Idn)	8,60%
11	BKLJT I SARANA MULTI THP II/2017 SR C	PT SMI	15-11-2017	15-11-2022	15.000.000.000	15.000.000.000	idAAA	15.466.514.550	idAAA	7,60%
12	KERETA API INDONESIA TH 2017 SR B	PT KAI	21-11-2017	21-11-2024	25.000.000.000	25.000.000.000	idAAA	26.737.412.750	idAAA	8,25%
13	BKLJT I BJB THP I/2017 SR B	Bank BJB	06-12-2017	06-12-2022	8.000.000.000	8.000.000.000	idAAA	8.217.616.240	idAAA	8,15%
14	BKLJT I BJB THP I/2017 SR C	Bank BJB	06-12-2017	06-12-2024	15.000.000.000	15.000.000.000	idAA-	15.892.161.600	idAA-	8,85%
15	BKLJT III WASKITA K TH II 2018 SR B	PT Waskita	23-02-2018	23-02-2023	20.000.000.000	20.000.000.000	idA-	20.000.000.000	idA-	8,25%
16	BKLJT III MEDCO ENERGI I/2018 SR B	PT Medco	29-03-2018	29-03-2023	5.000.000.000	5.000.000.000	idA+	5.122.526.750	idA+	9,15%
17	BKLJT III PNM II 2018 SR B	PT PNM	13-04-2018	13-04-2023	16.000.000.000	16.000.000.000	idA	16.652.402.720	idA	8,50%
18	BKLJT III WASKITA K THP IV 2019 SR A	PT Waskita	15-05-2019	16-05-2022	10.000.000.000	10.000.000.000	idA-	10.023.703.300	idA-	9,00%
19	BKLJT III WASKITA K THP IV 2019 SR B	PT Waskita	15-05-2019	16-05-2024	8.000.000.000	8.000.000.000	idA-	7.899.870.000	idA-	9,75%
20	BKLJT III PNM I 2019 SR B	PT PNM	27-05-2019	28-05-2024	20.000.000.000	20.000.000.000	idA	21.719.742.600	idA	9,85%
21	BKLJT I SEMEN IND TH II 2019 SR A	PT Semen Indonesia	27-05-2019	28-05-2024	20.000.000.000	20.000.000.000	idAA+	21.439.454.400	idAA+	9,00%
22	BKLJT II ADHI KARYA II 2019 SR B	PT Adhi Karya	25-06-2019	25-06-2024	20.000.000.000	20.000.000.000	idA-	20.296.183.400	idA-	9,75%
	<b>Jumlah dipindahkan</b>				<b>313.000.000.000</b>	<b>312.977.000.000</b>		<b>325.398.123.320</b>		

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

No.	Nama Obligasi	Perusahaan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp)	Perolehan		Pelaporan		Tingkat Suku Bunga
						Nilai (Rp)	Rating	Nilai Wajar / Amortized Cost	Rating	
B	Obligasi (AFS)									
	Jumlah pindahan				313.000.000.000	312.977.000.000		325.398.123.320		
23	BKLJT III BANK BTN TH II 2019 SR C	Bank BTN	28-06-2019	28-06-2024	30.000.000.000	30.000.000.000	idAA+	32.533.625.100	idAA+	9,00%
24	BKLJT I TIMAH THP II/2019 SR B	PT Timah	14-08-2019	15-08-2024	5.000.000.000	5.000.000.000	idA+	5.043.699.650	idA+	8,75%
25	BKLJT II PTPP THP II 2019 SR B	PT PP	26-11-2019	27-11-2024	10.000.000.000	10.000.000.000	idA+	10.003.605.800	idA+	8,50%
26	BKLJT II KERETA API IND/2019 SR B	PT KAI	12-12-2019	13-12-2026	19.000.000.000	19.000.000.000	idAAA	20.243.804.790	idAAA	8,20%
27	BKLJT III PNM III SR B THN 2020	PT PNM	29-04-2020	30-04-2025	20.000.000.000	20.000.000.000	idA	21.466.144.000	idA+	9,00%
28	BKLJT IV INDOMOBIL F IND I/2020 SR B	PT Indomobil	03-08-2020	04-08-2023	5.000.000.000	5.000.000.000	idA	5.136.886.100	idA	9,55%
29	BKLJT IV BTN I/2020 SR C	Bank BTN	18-08-2020	19-08-2025	2.000.000.000	2.000.000.000	idAA+	2.155.594.400	idAA+	8,40%
30	BKLJT II JASA MARGA THP I 2020 SR B	PT Jasa Marga	07-09-2020	08-09-2025	10.000.000.000	10.000.000.000	idAA-	10.394.028.900	idAA-	8,25%
31	BKLJT II JASA MARGA THP I 2020 SR C	PT Jasa Marga	07-09-2020	08-09-2027	10.000.000.000	10.000.000.000	idAA-	10.311.011.300	idAA-	8,60%
32	BKLJT II SULSELBAR II/20 SR A	Bank Sulselbar	17-11-2020	18-11-2023	9.000.000.000	9.000.000.000	idA+	9.062.386.830	idA+	8,00%
33	BKLJT II SULSELBAR II/20 SR B	Bank Sulselbar	17-11-2020	18-11-2025	25.000.000.000	25.000.000.000	idA+	24.912.485.000	idA+	8,75%
34	BKLJT III ADHI KARYA I/2020	PT Adhi Karya	17-11-2020	18-11-2023	10.000.000.000	10.000.000.000	idA-	10.185.043.800	idA-	9,75%
35	BKLJT III PNM IV TH 2020 SR C	PT PNM	03-12-2020	04-12-2025	20.000.000.000	20.000.000.000	idA+	21.293.779.800	idA+	8,75%
36	BKLJT III PNM V TH 2021 SR C	PT PNM	16-03-2021	17-03-2026	12.000.000.000	12.000.000.000	idA+	12.537.236.520	idA+	8,25%
37	BKLJT III PTPP I TH 2021 SR A	PT PP	01-07-2021	02-07-2024	15.000.000.000	15.000.000.000	idA	15.065.975.700	idA	8,50%
38	BKLJT i PTPP TH I 2021 SR A (SUKUK)	PT PP	01-07-2021	02-07-2024	10.000.000.000	10.000.000.000	idA	10.021.105.400	idA (Sy)	8,50%
39	BKLJT 1 PNM TH 2021 SR B (SUKUK)	PT PNM	07-07-2021	08-07-2024	18.000.000.000	18.000.000.000	idA+ (Sy)	18.324.705.780	idA+ (Sy)	7,00%
40	BKLJT III BANK BJB TH I TH 2021 SR B	Bank BJB	14-07-2021	15-07-2026	4.000.000.000	4.000.000.000	idA	3.726.108.120	idA	7,85%
	Jumlah				547.000.000.000	546.977.000.000		567.815.350.310		
	Total Obligasi (NPA + AFS)				731.000.000.000	730.977.000.000		751.790.766.761		

**P. Pengungkapan Investasi pada Reksa Dana**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Nama Produk	Nama Penerbit	Nilai Perolehan			Nilai Pasar		
			NAB	Unit	Total (Rp)	NAB	Unit	Total (Rp)
	<b>Reksa Dana yang terdiri dari :</b>							
	a. Reksa Dana Pasar Uang							
	'1. dst	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	b. Reksa Dana Pendapatan tetap							
	'1. dst	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	c. Reksa Dana Campuran (per produk)							
	d. Reksa Dana Saham							
	'1. Sam Indonesia Equity	PT Samuel	2.933,57 2.452,70	681.763,18 285.399,76 15.757,88	2.000.000.000 700.000.000 -	1.968,40 1.968,40	681.763,18 285.399,76 15.757,88	1.341.982.635 561.780.894 31.017.804
				982.920,82	2.700.000.000		967.162,94	1.934.781.334
	'2. Tram Consumption Plus	PT Trimegah	1.765,9400	396.389,46	700.000.000	1.775,1000	396.389,46	703.630.927
	dst				700.000.000			703.630.927
	e. Reksa Dana Terproteksi							
	1. dst	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	f. Reksa Dana dgn Penjaminan							
	'1. dst	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	g. Reksa Dana Indeks (per produk)							
	'1. Premier ETF Indonesia Financial (XIF)	PT Indopremier	675,47	1.500.000,00	1.013.209.076	526,7901	1.500.000,00	790.185.150
					1.013.209.076			790.185.150
	'2. Premier ETF IDX30 (XII)	PT Indopremier	551,0331 544,5500	1.000.000,00 1.000.000,00	551.033.113 544.550.042	527,6483 527,6483	1.000.000,00 1.000.000,00	527.648.300 527.648.300
				2.000.000,00	1.095.583.155		2.000.000,00	1.055.296.600
	'5. Premier ETF Sri Kehati (XISR)	PT Indopremier	376,1476 394,7106 361,6136	1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	564.221.370 394.710.644 180.806.810	379,9922 379,9922 379,9922	1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	569.988.300 379.992.200 189.996.100
				3.000.000,00	1.139.738.824		3.000.000,00	1.139.976.600

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

No	Nama Produk	Nama Penerbit	Nilai Perolehan			Nilai Pasar		
			NAB	Unit	Total (Rp)	NAB	Unit	Total (Rp)
	6. BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index (XBNI)	PT Indopremier	1.071,7588	300.000,00	321.527.638	1.031,2345	300.000,00	309.370.349
			1.061,0969	700.000,00	742.767.860	1.031,2345	700.000,00	721.864.148
			941,8681	300.000,00	282.560.442	1.031,2345	300.000,00	309.370.349
			832,4818	500.000,00	416.240.883	1.031,2345	500.000,00	515.617.074
			1.800.000,00		<b>1.763.096.823</b>		1.800.000,00	<b>1.856.221.920</b>
	dst							
	h. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (per produk)							
	'1.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	dst							
	i. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya di perdagangkan di Bursa Efek (per produk)							
	'1.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	dst							
	<b>Total Reksa Dana</b>				<b>8.411.627.877</b>			<b>7.480.092.531</b>

**Q. Pengungkapan Investasi pada Medium Term Notes**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Nama Perusahaan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp)	Perolehan		Pelaporan			Tingkat Suku Bunga
					Nilai (Rp)	Rating	Nilai Wajar (Rp)	Amortized Cost (Rp)	Rating	
1	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
2	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
3	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
4	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
5	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
dst.	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	<b>TOTAL MTN</b>				<b>(--)</b>	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>

**R. Pengungkapan Investasi pada Efek Beragun Aset**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Rating Perolehan	Nilai Pasar/Nilai Wajar (Rp)	Nilai Nominal (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Rating pada tanggal pelaporan
1	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
2	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
3	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
4	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
5	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
dst.	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	<b>Total Efek Beragun Aset</b>				<b>(--)</b>	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>

Dana Pensiun Pos Indonesia  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Portofolio Investasi

S. Pengungkapan Investasi Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif  
Per 31 Desember 2021  
(dalam Rupiah)

No	Nama Penerbit	Jumlah Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Rating Perolehan	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Nominal
						(Rp)
1	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
2	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
3	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
4	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
5	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
dst.	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
Total Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				(--)	(--)	(--)

No	Nama Penerbit	Jumlah Unit	Perolehan			Tanggal Pelaporan		
			Rating	NAB	Total (Rp)	Rating	NAB	Total (Rp)
1	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
2	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
3	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
4	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
5	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
dst.	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
Total Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				(--)	(--)	(--)	(--)	(--)

T. Pengungkapan Investasi pada Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek Yang Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia  
Per 31 Desember 2021  
(dalam Rupiah)

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu	Biaya Perolehan (Rp)	Nilai Saham saat Kontrak			Biaya Premi (Put Premium)	Harga Pasar (Rp)	Harga Jual Strike Price (Rp)
						Jumlah Lembar	Harga Pasar (Rp)	Total (Rp)			
1	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
2	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
3	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
4	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
5	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
dst.	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
TOTAL					(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)

U. Pengungkapan Investasi pada Penyertaan Langsung pada Saham di Dalam Negeri  
Per 31 Desember 2021  
(dalam Rupiah)

No	Nama Counterpart	Nama Efek	Nilai Nominal Efek (Rp)	Rating Efek pada saat Perolehan	Nilai REPO (Rp)	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu	Margin	Amortized Cost (Rp)	Rating Efek pada tanggal Pelaporan	Nilai Penjualan Kembali (Rp)
1	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
2	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
3	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
4	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
5	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
dst.	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

**V. Pengungkapan Investasi pada Penyertaan Langsung pada Saham di Dalam Negeri**  
**Per 31 Desember 2021**  
(dalam Rupiah)

No	Nama Perusahaan	Penempatan Awal				Nilai Perolehan per Tanggal Laporan			Nilai yang ditetapkan Penilai yang terdaftar di OJK (Rp) *)
		Tanggal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Total (Rp)	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Total (Rp)	
1	PT. DAPENSI DWIKARYA	09-01-1991/ 31-12-2021	123.133	99,98%	76.448.154.967	139.885	99,9956%	69.942.500.000	77.400.000.000
1	PT. DAPENSI TRIO USAHA	21-01-1992	40	100,00%	20.000.000	39.960	99,8501%	19.980.000.000	62.733.000.000
<b>Total Penyertaan Langsung pada Saham di Dalam Negeri</b>					<b>76.468.154.967</b>			<b>89.922.500.000</b>	<b>140.133.000.000</b>

Nilai wajar Penempatan Langsung Saham per 31 Desember 2021 pada masing-masing perusahaan tersebut di atas didasarkan pada penilaian per 31 Desember 2020 yang dilakukan oleh Penilai Independen KJPP Herman Meirizki & Rekan dengan laporan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Laporan	Tanggal Laporan
1	PT Dapensi Dwikarya	No. 00003/2.0120-01/BS/08/0364/1/I/2022	11 Januari 2022
2	PT Dapensi Trio Usaha	No. 00003/2.0120-01/BS/08/0364/1/II/2020	18 Februari 2020

- Telah dilakukan penggabungan (Merger) dari PT Dapenta Eka Karya ke PT Dapensi Dwikarya per 31 Desember 2021.
- Nilai wajar Penempatan Langsung Saham per 31 Desember 2021 PT Dapensi Dwikarya didasarkan pada penilaian per 30 Juni 2021 dan PT Dapensi Trio Usaha didasarkan pada penilaian per 31 Desember 2019 yang dilakukan oleh Penilai Independen KJPP Herman Meirizki & Rekan dengan laporan sebagai berikut :
- Penilaian saham terhadap PT Dapensi Dwikarya dan PT Dapensi Trio Usaha ini menggunakan suatu pendekatan penilaian, yaitu Pendekatan Pendapatan. Adapun metode yang digunakan adalah *Discounted Cash Flow*.
- Telah dilakukan pelepasan Saham Pefindo sebanyak 100 lembar (Berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn Nomor : 44 tanggal 23 Juni 2021 tentang Perjanjian Jual Beli Saham)
- Berdasarkan Risalah Rapat Pengurus bulan November 2021 ditetapkan untuk Penyertaan Langsung Saham (PLS) PT Dago Endah dilakukan reklas ke aset lain-lain dan dilakukan pencadangan/penyisihan atas PLS tersebut dengan pertimbangan instrument Investasi tersebut beberapa tahun terakhir tidak memberikan dividen karena membukukan rugi.

**Dana Pensiun Pos Indonesia  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Portofolio Investasi**

**W. Pengungkapan Investasi pada Penyertaan Langsung pada Saham di Luar Negeri  
Per 31 Desember 2021  
(dalam Rupiah)**

Investasi pada Penyertaan Langsung Saham di Luar Negeri Dihapus Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.

No	Nama Perusahaan	Penempatan Awal				Nilai Perolehan per Tanggal Laporan			Nilai Yang Ditetapkan Penilai Independen
		Tanggal	Jumlah Lembar	Presentase Kepemilikan	Total (Rp)	Jumlah Lembar	Presetase Kepemilikan	Total (Rp)	
1	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
2	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
3	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
4	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
5	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
6	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
	<b>Total PLS di Luar Negeri</b>	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)

**X. Pengungkapan Investasi atas Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan  
Per 31 Desember 2021  
(dalam Rupiah)**

No	Jenis Investasi	Kepemilikan	Status Hukum Tanah	Jangka Waktu Surat Tanah	Lindung Nilai (Asuransi)	Besar Uang	Lokasi	Luas	Tanggal Perolehan	Biaya Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Yang Ditetapkan Penilai Yang Terdaftar di OJK
										(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	<b>TANAH (per Sertifikat)</b>												
	1. Tanah	Dapenpos	SHGB	24/09/2027	1128010121011073-1128011121000311	16.530.000	JI PH Mustopa No 33A	5.500 m2	01-11-1995	2.392.656.000		2.392.656.000	78.980.000.000
	2. Tanah	Dapenpos	SHGB	24/09/2027	1128010121011084-1128011121000322	8.404.000	JI PH Mustopa No 35	2.120 m2	01-02-1996	2.422.550.000		2.422.550.000	32.690.400.000
	<b>Total Tanah</b>											<b>4.815.206.000</b>	<b>111.670.400.000</b>
2	<b>BANGUNAN (per lokasi)</b>												
	1. Bangunan	Dapenpos	SHGB	24/09/2027	1128010121011073-1128011121000311	16.530.000	JI PH Mustopa No 33A	4.719 m2	01-11-1995	6.745.701.939	6.550.264.411	195.437.528	12.041.000.000
	2. Bangunan	Dapenpos	SHGB	24/09/2027	1128010121011084-1128011121000322	8.404.000	JI PH Mustopa No 35	1.528 m2	01-02-1996	1.177.882.514	1.177.882.426	88	3.473.600.000
	<b>Total Bangunan</b>									<b>7.923.584.453</b>	<b>7.728.146.837</b>	<b>195.437.616</b>	<b>15.514.600.000</b>
3	<b>Tanah dan Bangunan (per Sertifikat)</b>												
	1.												
	<b>dst</b>												
	<b>Total Tanah &amp; Bangunan</b>									<b>12.738.790.453</b>	<b>7.728.146.837</b>	<b>5.010.643.616</b>	<b>127.185.000.000</b>

\*) Asuransi Tanah dan Bangunan Jl. PH H Mustafa No. 33A dan 35 menggunakan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur.

Nilai wajar Investasi pada Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2021 merupakan hasil valuasi dari appraisal KJPP Herman Meirizki & Rekan per 31 Desember 2021 Nomor : 00408/2.0120-00/PI/08/0374/1/XII/2021 dan Nomor : 00409/2.0120-00/PI/08/0374/1/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

**Dana Pensiun Pos Indonesia**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Portofolio Investasi**

---

**Y. Analisis Investasi Dana Pensiun**  
**Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2020**

No	Topik	Uraian
1	Pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan Investasi yang obyektif.	Penempatan Investasi telah ditempatkan di berbagai instrumen Investasi untuk meminimalisir risiko dan telah melalui kajian/analisa dalam pelaksanaannya.
2	Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun.	Tanggung Jawab Pengurus senantiasa dijalankan selaras dengan peraturan OJK yang berlaku.
3	Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi.	Ketentuan batasan Investasi sebagaimana tercantum dalam Arahan Investasi senantiasa dipatuhi.
4	Jumlah dan komposisi Portofolio Investasi untuk tiap-tiap paket investasi atau jenis Investasi yang ditawarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.	----
5	Jumlah dan karakteristik investasi pada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Dana Pensiun.	----
6	Pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun.	Pemilihan Portofolio Investasi senantiasa diupayakan dan dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun.

---

# LAMPIRAN II

---

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PIUTANG BERMASALAH - ASET LAIN-LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

**1. Piutang PT Jasa Banda Garta**

Piutang PT Jasa Banda Garta (PT JBG) sebesar Rp24.039.673.007 pada tanggal 31 Desember 2003 dilaporkan di Laporan Aset Bersih dan Neraca dalam akun Aset Lain-lain. Piutang ini merupakan nilai klaim Dapenpos kepada PT JBG yang timbul akibat kegagalan PT JBG memenuhi kewajiban mengembalikan aset tunai kepada Dapenpos berdasarkan:

- a. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Transaksi Saham Nomor: 6569/Dirut/2001 dan JBG/HO/039/XII/2001 tanggal 14 Desember 2001, addendum PKS Nomor: 2332/ Dirut/2002 dan JBG/HO/075/IV/2002 tanggal 18 April 2002, PKS Nomor: 5303/Dirut/2002 dan JBG/HO/155/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002, dan PKS Jual Beli Saham dengan Sistem Repo Nomor: 8188/Dirut/2002 dan JBG/HO/179/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 yang merupakan transaksi pengalihan 123.250.000 saham PT Dharma Samudra Fishing Industries, Tbk (PT DSFI) bernilai total Rp22.882.500.000 milik PT JBG kepada Dapenpos dengan janji akan dibeli kembali dalam waktu 6 bulan kemudian (23 Juni 2003) dengan harga total Rp25.882.500.000.
- b. Hasil Investasi sebesar Rp1.144.954.804 sesuai surat sanggup bayar dari PT JBG Nomor: 008/JBG/HO/I/2003 tanggal 27 Januari 2003.

Atas klaim tersebut, Pengurus Dapenpos telah melakukan berbagai upaya penagihan/ penyelamatan aset investasi tersebut dan telah menyerahkan penanganan proses hukum atas Wanpretasi PT JBG ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui surat Direktur Dapenpos Nomor: 60/Dirut/2004 tanggal 6 Januari 2004 dan ditindaklanjuti dengan penyerahan kuasa dari Direktur Utama Dapenpos kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: 329/Dirut/2004 tanggal 16 Januari 2004.

Dalam laporan keuangan tahun 2003, guna memenuhi penyajian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, Pengurus Dapenpos telah membentuk penyisihan atas *potential loss* yang timbul dari piutang ini sebesar nilai klaimnya, yaitu Rp24.039.673.007.

Dalam tahun 2004, upaya penyelesaian piutang PT JBG terus dilanjutkan oleh Pengurus Dapenpos, antara lain dengan membentuk tim asistensi untuk penyelesaian masalah piutang PT JBG dan menunjuk Konsultan Hukum Pasar Modal untuk mendampingi Kejati dalam rencana melakukan gugatan perdata kepada PT JBG.

Dalam tahun 2005, Dapenpos telah melakukan upaya penyelesaian masalah piutang PT JBG melalui Satuan Kerja Penyelesaian Pembayaran Kembali Investasi Dana Pensiun di PT JBG yang dibentuk oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).

Dalam tahun 2006, Dapenpos melalui surat tertanggal 9 Mei 2006 dan 2 Juni 2006 kepada apepam berusaha melakukan penyelesaian kasus PT JBG, namun sampai tanggal 31 Desember 2006 belum ada jawaban. Sedangkan tindak lanjut tim yang dibentuk ADPI masih belum berjalan, yaitu akan menghadap Kepala Biro Dana Pensiun Departemen Keuangan, namun sampai dengan 31 Desember 2006 belum diperoleh informasi lebih lanjut.

Selama tahun 2007 dalam beberapa kesempatan, meminta kepada institusi yang berwenang tentang penanganan kasus tersebut, namun itupun tidak diperoleh gambaran yang menggembirakan. Sebagai informasi PT JBG kini tidak tercatat lagi di Bapepam Lembaga Keuangan, serta oknum Direksi yang terlibat kini terus dicari oleh aparat berwenang karena masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Piutang tersebut menurut pihak Dapenpos sangat kecil kemungkinan tertagih.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PIUTANG BERMASALAH - ASET LAIN-LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Pada tahun 2008 Dapenpos masih menindaklanjuti kasus tersebut bersama Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan beberapa Dana Pensiun yang terkait dalam kasus PT JBG.

*Legal opinion* dan laporan tuntas pada PT JBG telah diselesaikan oleh Konsultan Hukum Safitri Motik dan *Partner's* pada tanggal 1 Desember 2008 dan telah diterima oleh Dapenpos pada bulan Februari 2009 yang selanjutnya telah dilaporkan ke PT Pos Indonesia (Persero) selaku Pendiri dengan Surat Nomor: 1338-Lap-36/Inv-30/2009 tanggal 2 Maret 2009 untuk dimintakan rekomendasi penanganannya lebih lanjut. Berdasarkan hasil pertemuan dengan ADPI pada tanggal 14 Oktober 2009, pihak Bapepam LK c.q Biro Dana Pensiun masih menunggu surat SP3 dari pihak Kejaksaan yang akan dijadikan dasar untuk membuat surat edaran kepada semua Dana Pensiun untuk menghapusbukukan piutang tersebut.

Pada tanggal 2 Maret 2010 dilakukan pertemuan dengan pihak ADPI, bersama dengan korban PT JBG lainnya, yang diwakili oleh petugas SPI/Legal Ibu Arni dan dari pertemuan tersebut pihak ADPI mengupayakan kepada Bapepam untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Pada tahun 2011 permasalahan PT JBG yang selama ini dimediasi oleh pihak ADPI, sampai saat ini belum ada kejelasan, meskipun status perusahaan PT JBG sudah tidak aktif dengan pencabutan ijin oleh Bapepam.

Sementara itu setelah tahun 2012 peran Bapepam telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mana pihak OJK menyatakan bahwa PT JBG sudah tidak beroperasi lagi karena telah dicabut izin usahanya oleh Bapepam *outstanding*. Pihak OJK tidak dapat menyelesaikannya, sehingga kasusnya dianggap sudah *closed*.

Pengurus telah menyampaikan secara resmi melalui surat Nomor: 3676-Sek-18/DInv-030/2014 tanggal 19 Juni 2014 kepada pihak OJK untuk meminta masukan dan pandangan atas penyelesaian kasus tersebut, namun sampai saat ini belum ada jawaban.

## **2. Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line**

Manajemen Dapenpos mereklasifikasi pencatatan obligasi Arpeni Pratama Ocean Line (APOL) Tahun 2008 Seri II senilai Rp10.000.000.000 dari kelompok aset investasi yang dipadukan dengan kewajiban manfaat pensiun ke kelompok aset lain-lain, sehubungan dengan adanya penurunan nilai obligasi tersebut dan gagal bayar kupon, terkait penurunan kinerja keuangan emiten APOL. Tanggal 1 April 2015 PT Bursa Efek Indonesia telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek saham dan obligasi APOL di seluruh pasar. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, APOL dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sehingga Perusahaan mencatat penurunan nilai obligasi APOL beserta piutang bunganya sebesar 100%.

## **3. Penyertaan Langsung Saham PT Dago Endah**

Berdasarkan Risalah Rapat Pengurus bulan November 2021 ditetapkan untuk Penyertaan Langsung Saham (PLS) PT Dago Endah dilakukan reklas ke aset lain-lain dan dilakukan pencadangan/penyisihan atas PLS tersebut dengan pertimbangan instrumen investasi tersebut beberapa tahun terakhir tidak memberikan dividen karena membukukan rugi.

---

# LAMPIRAN III

---

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

**Permasalahan Penyertaan Langsung Saham**

Kondisi permasalahan penyertaan langsung sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**I. PT Dapensi Trio Usaha**

**1. Persoalan Hukum Kekurangan Setoran Pospay**

Berdasarkan surat Komisariss Utama PT Dapensi Trio Usaha ("PT DTU") kepada Pemegang Saham tanggal 4 Maret 2014 Nomor: 11/KOM-DTU/2014/Rhs menyampaikan bahwa PT DTU telah mengalami kekurangan setoran pos pay dari 4 agen yang berakibat adanya potensi kerugian keuangan sementara sebesar Rp16.781.153.421. Kekurangan setoran tersebut dilakukan oleh 4 agen milik Ny. Lidya yaitu PT Sarana Medical Prisma, Agen Margasari, Agen Kurnia Perigi, Agen Cikokol Mujur. Modus operandi yang dilakukan dengan mengajukan *Top Up* Pospay melalui SMS yang dilakukan berulang-ulang kepada petugas *Back Office Application* (BOA) Pospay PT DTU dan petugas tersebut tanpa pengecekan terlebih dahulu ke rekening Bank PT DTU langsung melaksanakan permintaan SMS tersebut.

Upaya yang telah dilakukan untuk penyelesaian masalah tersebut :

- 1) Manajemen PT DTU dan pihak Ny. Lidya melakukan kesepakatan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan tanggal 17 Februari 2014 di hadapan Notaris Djoko Triwibowo, SH.MH,MKn.
- 2) Ny. Lidya melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut di atas, dan pihak manajemen PT DTU telah melakukan somasi tertulis kepada yang bersangkutan.
- 3) Berdasarkan surat kuasa Ny. Lidya tanggal 19 Februari 2014 telah menunjuk Pengacara E. Suherman Kartadinata & Associates Law Firm untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyatakan keberatan atas jumlah *top up* dimaksud dalam kesepakatan dan meminta untuk diadakan rekalkulasi yang melibatkan konsultan publik yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun rekalkulasi tersebut tidak mengesampingkan kesepakatan sebelumnya yang telah dibuat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1 tanggal 17 Februari 2014 dan jadwal pengembalian hutang serta implikasinya apabila tidak memenuhi kesepakatan tersebut.
- 4) Pada tanggal 24 Februari 2014 Komisariss Utama telah memerintahkan Sekretaris Komisariss untuk melakukan pemeriksaan atas terjadinya kelebihan transaksi *top up* buffer tersebut.
- 5) Pada tanggal 26 dan 28 Februari 2014, Komisariss memanggil Direksi untuk meminta penjelasan Direksi atas terjadinya permasalahan tersebut dan perkembangan lebih lanjut atas pertemuan dengan pengacara Ny. Lidya dalam pelaksanaan rekalkulasi ulang atas rekapitulasi transaksi *top up* tersebut serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan uang perusahaan.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan adalah :

- 1) Komisariss PT DTU telah memerintahkan Direksi PT DTU untuk menempuh jalur pidana atas tindak wanprestasi dan itikad kurang baik Ny. Lidya dengan melibatkan kepolisian dan pengacara yang berkompoten yang mempunyai akses ke Polda Jabar untuk menekan Ny. Lidya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.
- 2) Komisariss PT DTU meminta Direksi PT DTU untuk memanfaatkan jasa pihak ketiga lainnya untuk melakukan penagihan piutang sesuai yang telah diperjanjikan di depan Notaris.
- 3) Direksi PT DTU diminta mencariin formasi lainnya terkait aset-aset yang dimiliki NyLidya untuk dikuasai PT DTU dengan melibatkan kepolisian dan Pengacara.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

- 4) Berkoordinasi dengan pihak pengembang/developer untuk mengurus sertifikat a.n. Ny Lidya agar dapat dikuasai oleh PT DTU berdasarkan PPJB yang dimiliki.
- 5) Komisaris akan menunjuk KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk melakukan Audit Investigasi atas permasalahan dalam bisnis pospay tersebut dan untuk memperoleh keyakinan besarnya kerugian yang terjadi dalam bisnis pospay tersebut di atas.

Pengurus Dapenpos selaku pemegang saham mayoritas PT DTU telah menyampaikan beberapa arahan kepada Komisaris PT DTU melalui suratnya tanggal 28 Maret 2014 Nomor: 1916-Sek-19/Dinv-030/2014 yaitu:

- 1) Untuk segera dilakukan audit khusus oleh Auditor Independen atas kasus tersebut di atas, dengan menelusuri modus operandi peristiwa tersebut melalui pendekatan 5W1H.
- 2) Melakukan penyisihan kerugian sebesar kerugian yang telah diyakini (butir 8 surat Dewan Komisaris PT DTU kepada para pemegang saham tanggal 4 Maret 2014 Nomor: 11/Kom-DTU/2014/Rhs perihal Kelebihan Transaksi *Top Up Buffer* Pospay). Apabila dikemudian hari atas penyisihan kerugian tersebut dapat diselesaikan/dipulihkan dengan melakukan jurnal penyesuaian.
- 3) Terhadap pihak eksternal yang nyata-nyata telah menyebabkan kerugian maka perlu dilakukan gugatan pidana maupun perdata, kemudian pulaterhadap pihak internal yang telah menyebabkan kerugian maka perlu dilakukan proses punishment sesuai aturan kepegawaian yang berlaku serta dilaporkan kepada pihak berwajib.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Manajemen PT DTU menyikapi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) PT DTU telah menunjuk Kantor Law Firm Frans Paulus & Partner untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- 2) PT DTU telah berkordinasi dengan PPATK untuk mencoba mengetahui aliran uang terkait permasalahan tersebut, namun pihak PPATK tidak dapat menyampaikan informasi aliran uang tersebut secara langsung kepada PT DTU.
- 3) PT DTU telah bertemu kembali baik secara langsung dengan pihak Lidya maupun secara tidak langsung melalui pengacara yang telah ditunjuk oleh pihak Lidya.
- 4) PT DTU telah berkordinasi dengan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM R.I untuk memperoleh informasi mengenai Pendiri, Pengurus dan Pemegang Saham PT Sarana Medical Prisma.
- 5) PT DTU telah berkordinasi dengan pihak Ciputra Residence terkait dengan keberadaan aset jaminan.
- 6) PT DTU (diwakili oleh Frans Paulus S.H.,M.H.) pada tanggal 28 April 2014 telah melaporkan permasalahan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri.

Menunjuk surat Komisaris Utama PT DTU kepada kami tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 74/Kom-DTU/2014/Rhs perihal Laporan Perkembangan Penanganan Kasus Kelebihan Transaksi.

*Top Up Buffer* Pospay (fotokopi surat terlampir) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 11 Juli 2014 telah mulai dilakukan persidangan atas gugatan perdata dmk relaas panggilan sidang Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 296/PDT.G/2014/PN.TNG tanggal 26 Mei 2014.
- 2) Mabes Polri pada tanggal 20 Juli 2014 telah menanyakan ulang tentang kelengkapan data yang diperlukan, termasuk di antaranya hasil audit investigatif.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

- 3) Lawyer PT DTU pada tanggal 10 Agustus 2014 telah meminta dan mengingatkan kembali hasil audit investigatif yang dilakukan oleh KAP Noorsalim & Rekan yang telah dijanjikan selesai tanggal 9 Agustus 2014, namun belum dapat dipenuhi oleh KAP tersebut.
- 4) Draft laporan KAP pada tanggal 19 Agustus 2014 telah dibahas bersama antara Komisaris, Direksi, dan pihak KAP namun masih terdapat selisih antara kerugian dari KAP dengan pencatatan PT DTU dan selanjutnya dilakukan rekonsiliasi lebih lanjut dengan staf PT DTU.
- 5) Final Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati rencana akan diserahkan oleh KAP paling lambat pada minggu kedua bulan September 2014.
- 6) Menunjuk surat Dewan Komisaris PT DTU kepada para pemegang saham tertanggal 18 September 2014 nomor 85/KOM-DTU/2014/Rhs perihal Laporan Perkembangan Penanganan Kasus Kelebihan Transaksi *Top Up Buffer* Pospay dapat disampaikan bahwa :  
Pihak penyidik (Mabes Polri) baik secara tertulis maupun melalui telepon dan SMS telah meminta agar manajemen PT DTU segera mengirimkan laporan hasil audit khusus KAP mengenai kasus dimaksud. Pihak KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja (NNS) telah diminta untuk segera menyelesaikan hasil audit sebagaimana telah dijanjikan pada tanggal 20 Agustus 2014 namun proses pengolahan data masih belum selesai.
- 7) Finalisasi draft laporan hasil audit khusus oleh KAP dijadwalkan dilakukan pada tanggal 21 September 2014. Menyikapi hal tersebut kami telah meminta agar hasil audit khusus oleh KAP tersebut agar penyelesaiannya dapat disegerakan (surat kami kepada Dewan Komisaris PT DTU tanggal 26 September 2014 Nomor 21-UM-52/DInv-030/2014/Rhs).
- 8) Pihak lawyer telah diminta untuk membuat laporan tertulis secara berkala tentang tindak lanjut dan perkembangan atas penanganan kasus tersebut, baik dalam perspektif perdata maupun pidana.

Hasil Laporan Audit Khusus oleh KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja (NNS) tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 001-LA/NNS/X/2014 atas Modus kecurangan yang dilakukan 4 Agen Pospay yang mengakibatkan kerugian bagi PT Dapensi Trio Usaha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Poin-poin utama penyebab resiko terjadinya kesalahan dan kecurangan bisnis pospay di PT Dapensi Trio Usaha, yaitu:

- 1) Belum adanya SOP yang jelas sejak beroperasinya bisnis pospay;
- 2) Tidak diterapkannya SOP secara konsisten;
- 3) Pengisian *top up* ke koordinator agen dan agen tanpa melakukan pengecekan uang masuk pada rekening koran;
- 4) Melakukan transaksi langsung dengan agen tanpa melalui Koordinator Agen;
- 5) Melakukan rekonsiliasi antara data Top Up dengan data keuangan.

Sesuai hasil pemeriksaan KAP terhadap mutasi *Top Up*/deposit dengan penerimaan dana rekening koran untuk setiap agen terdapat total kerugian PT DTU adalah sebesar Rp16.534.360.813 yaitu yang diakibatkan oleh 4 agen sebesar Rp16.526.253.421 dan lainnya sebesar Rp8.107.392.

Pada tanggal 12 Desember 2014, Direksi telah membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Kasus Agen Pospay berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dapensi Trio Usaha No. SK.31/Dirut/1214 dengan susunan anggota sebagai berikut:

- Iman Soedirman (Ketua)
- Reggi M Rizki (Anggota)
- Jimmi Ramadhan K (Anggota)

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Pada tanggal 14 Januari 2015 Direksi PT Dapensi Trio Usaha mengajukan surat ke KAP Noor Salim, Nursehan, Sinarahardja untuk melakukan perubahan atas surat pengantar yang semula ditujukan ke Direksi PT DTU diubah menjadi ke Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri. Pada 14 Januari 2015 Satgas telah menyerahkan alat bukti tambahan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan Nomor Perdana As Telkomsel kepada Penyidik Mabes Polri Pada tanggal 19 Januari 2015 hasil revisi KAP atas surat pengantar Laporan Audit Investigasi telah diserahkan oleh Satuan Tugas (Satgas) ke Mabes Polri yang disaksikan oleh Lawyer (Sdr.Frans Paulus).

Laporan Komisaris tanggal 5 Februari 2015 berdasarkan Laporan Hasil KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja. Langkah-langkah upaya penyelesaian dari laporan KAP adalah :

- 1) Di dalam Struktur Organisasi Perusahaan sebaiknya dibentuk satu divisi yang khusus menangani bisnis pospay termasuk pembuatan Job Desk masing-masing pegawai/bagian yang harus dijabarkan secara jelas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya saling melakukan cross check apabila terdapat permasalahan timbul dapat segera diatasi.
- 2) Sebaiknya SOP segera dibuat/direvisi sebelum kompleksitas kegiatan tiap bagian semakin bertambah, karena dengan keberadaan SOP sangat penting sebagai acuan dasar dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan SOP harus dilaksanakan secara ketat dan dievaluasi setiap periodik untuk mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan.
- 3) Untuk meminimalisir risiko, sebaiknya perusahaan hanya berhubungan langsung dengan koordinator agen yang jumlahnya lebih sedikit yaitu + 20 Korgen dan disarankan permintaan *top up* dialihkan melalui kantor pos sehingga kerugian dapat diminimalisir.
- 4) Petugas Pospay harus melaksanakan tugas sesuai SOP, di mana permintaan *top up* sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah uangnya sudah masuk atau belum ke rekening bank perusahaan.
- 5) Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kontrak kerjasama sebaiknya ditinjau kembali, karena kontrak kerja merupakan bentuk legal dari kesepakatan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Tanpa adanya kontrak kerjasama bila terjadi wanprestasi maka pihak manajemen akan sulit melakukan tuntutan hukum.
- 6) Terdapat kelemahan dalam sistem pengadministrasian PKS di mana dari 23 Korgen yang aktif terdapat 9 korgen yang tidak terdapat PKS sehingga apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Korgen, maka pihak PT DTU akan sulit untuk melakukan tuntutan hukum karena tidak ada dasarnya.

Hal-hal yang telah dilakukan Direksi:

Telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dijatuhkan hukuman terhadap pegawai yang dianggap melakukan kelalaian yaitu:

- Iman Soedirman
- Sumanto
- Dadang Rijani
- Hadhiansyah
- Jimmi

Selain hukuman disiplin, kepada pegawai tersebut telah dilakukan pembebasan dari jabatannya dan saat ini ditempatkan sebagai staf yang menangani pemasalahan kasus tersebut.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Perusahaan hanya menerima *top up* dari koordinator agen yang jumlahnya lebih sedikit sehingga pengawaan transaksi *top up buffer* pospay dapat dikendalikan. Struktur Organisasi saat ini telah mewadahi Divisi yang khusus menangani bisnis pospay. SOP saat ini sudah dimulai sejak tanggal 14 Februari 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pospay Main Agen DTU.

Petugas pospay telah melaksanakan tugas sesuai SOP di mana setiap ada permintaan *top up* selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu ke rekening bank perusahaan. Fungsi Pengendalian Internal harus dioptimalkan dan secara periodik dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengantisipasi risiko yang terjadi akibat kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.

Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Desember 2015 Nomor 296/PDT6/2014/PN Tng yang mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh Sdri. Lidya mengenai Akta Pengakuan Hutang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dikabulkan sehingga pengakuan hutang sah demi hukum. Posisi permasalahan kasus pospay dari sisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sampai saat ini masih berada di Bareskrim Polri. Manajemen Perseroan telah meminta pihak lawyer untuk mempercepat pengalihan kasus Sdri Lidya dari kasus dalam ranah TPPU menjadi kasus dalam ranah Tindak Pidana Umum (Tipidum).

Manajemen Perseroan telah mengundang pihak lawyer untuk bertemu dalam rangka membahas proses pengalihan dari ranah TPPU ke ranah Tipidum namun pihak lawyer meminta imbalan kompensasi yang dinilai tidak masuk akal jumlahnya sehingga posisi permasalahan Pospay yang melibatkan Sdri. Lidya sampai dengan 31 Desember 2015 relatif belum ada kemajuan yang berarti. Menyikapi permasalahan ini maka manajemen Perseroan berencana untuk mengganti Lawyer yang akan membantu memproses kasus tersebut.

Penetapan total piutang non usaha sebesar Rp16.526.253.421 pada tahun 2014, didasarkan pada Laporan Auditor Independen Nomor: 001-LA/NNS/X/2014, tanggal 14 Oktober oleh KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja dengan judul laporan, "Laporan Akuntan Independen atas Audit Investigasi dengan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Modus Kecurangan Yang Dilakukan 4 Agen Pospay Yang Mengakibatkan Kerugian bagi PT Dapensi Trio Usaha atas Permintaan *Top Up Buffer* Pospay Yang Tidak Disetor ke Rekening Bank PT Dapensi Trio Usaha". Piutang tersebut terjadi karena kewajiban pembayaran oleh Ny. Lydia kepada PT DTU tidak dilaksanakan.

Yang bersangkutan berdasarkan Pasal 2 Akta Notaris tersebut berjanji untuk melakukan pembayaran hutangnya dengan jadwal angsuran sebagai berikut:

- 20 Februari 2014	500.153.421
- 20 Mei 2014	3.256.200.000
- 20 April 2014	3.256.200.000
- 20 Mei 2014	3.256.200.000
- 20 Juni 2014	3.256.200.000
- 20 Juli 2014	3.256.200.000
<b>Total</b>	<b>16.781.153.421</b>

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Untuk menjamin pelunasan hutang tersebut yang bersangkutan berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dari Notaris yang sama No. 2/2014 tanggal 17 Februari 2014 telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan No.07107/Mekarbakti, seluas 160 M<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 395/Mekarbakti/2011, terdaftar atas nama PT Ciputra Residence berkedudukan di Tangerang dengan Nomor Identifikasi Barang (NIB) 28.04.21.02.07565 terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Kelurahan Panongan, Jalan Perumahan Citra Raya Blok Y-17 No. 20 yang diperoleh Tn. Suyudi berdasarkan Penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Raya Tangerang No. 0133/CR-DL/P-PPJB/SGP01/SGM/HA/AH/HM/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013. Perusahaan melakukan taksasi atas jaminan tersebut dengan nilai estimasi sebesar Rp1.500.000.000.

Meninjau kekuatan hukum dari Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang belum terdapat perbaharuan sampai dengan pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2015 berakhir serta objek agunan yang tidak memenuhi kriteria sesuai sebagaimana diatur Pasal 1131 BW KUH Perdata bahwa benda yang dijamin haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Oleh sebab itu pada periode berjalan tahun 2015, perusahaan melakukan penyisihan piutang atas jaminan senilai Rp1.500.000.000.

Hasil dari penelusuran mundur yang dilakukan perusahaan pada tahun 2015, terdapat penambahan saldo piutang buffer Pospay yang belum dapat diidentifikasi sebesar Rp2.452.722.731, mengacu pada prinsip pencatatan konservatif perusahaan melakukan penyisihan piutang 100% atas selisih tersebut tetapi tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk melakukan tindak lanjut penelusuran dan penagihan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Desember 2015 Nomor 296/PDT6/2014/PN Tng yang mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh Sdri. Lidya mengenai Akta Pengakuan Hutang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dikabulkan sehingga pengakuan hutang sah demi hukum. Posisi permasalahan kasus pospay dari sisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sampai saat ini masih berada di Bareskrim Polri. Manajemen Perseroan telah meminta pihak lawyer untuk mempercepat pengalihan kasus Sdri Lidya dari kasus dalam ranah TPPU menjadi kasus dalam ranah Tindak Pidana Umum (Tipidum).

Terhadap putusan PN Tangerang No. 296/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 02 Desember 2015 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat (Lydia) tidak dapat diterima dikarenakan kekurangan pihak penggugat, maka pada tanggal 22 Desember 2015 Lydia bersama Suyudi kembali mengajukan gugatan yang didaftarkan ke PN Tangerang dengan No. perkara 803/Pdt.G/2015/PN.TNG. dengan pihak-pihak sebagai berikut:

Pengugat I : Suyudi  
Pengugat II : Lydia  
Melawan  
Tergugat I : PT DTU  
Tergugat II : Agus Komarudin (korgen yang membawahi agen-agen Lydia)  
Tergugat III : Jimmi R Kusuma  
Tergugat IV : Iman Soedhirman  
Tergugat V : Djoko Triwibowo (notaris)

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Untuk menghadapi gugatan tersebut PT DTU menunjuk kantor hukum ARM Law Firm untuk mewakili perusahaan di persidangan.

Sidang pertama untuk gugatan baru tersebut dimulai pada tanggal 23 Maret 2016 dan diputus oleh PN Tangerang pada tanggal 24 Mei 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim Ketua dan para Hakim Anggota, maka Hakim Ketua memutuskan:  
Mengadili:
  - a. Menolak Eksepsi (bantahan) dari Tergugat I (PT. Dapensi Trio Usaha) dan Tergugat V (Notaris Djoko Triwibowo).
  - b. Menolak seluruhnya gugatan dari para Penggugat I (Suyudi yang merupakan suami dari Lydia) dan Penggugat II (Lydia). Yang dalam gugatannya menyatakan bahwa terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat V pada saat penandatanganan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Penggugat berpendapat bahwa penandatanganan tersebut terjadi karena ada Paksaan dan Tekanan kepada Penggugat. Namun Hakim berpendapat bahwa Penggugat I (Suyudi) menandatangani Akta-akta tersebut dengan sukarela tanpa ada penolakan.
  - c. Bahwa gugatan Rekonpensi (gugatan balik) dari PT Dapensi Trio Usaha dalam Perkara ini tidak dapat diterima. PT Dapensi Trio Usaha memasukan gugatan Rekonpensi (gugatan balik) yang menyebutkan bahwa para Penggugat harus membayar hutang sebesar Rp16.781.153.421 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu Rupiah).
- 2) Bahwa dengan adanya putusan tersebut, maka:
  - a. Dengan ditolaknya gugatan Penggugat seluruhnya maka Akta Pengakuan Hutang No. 01 tanggal 17 Februari 2014 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 02 tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Djoko Triwibowo, S.H., M.H., M.kn. adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat.
  - b. Dengan tidak diterimanya gugatan Rekonpensi dari PT Dapensi Trio Usaha, maka menjadi tidak tegas karena Hakim tidak menyebutkan/tidak ada kalimat yang menyatakan menghukum Suyudi dan Lydia untuk mengembalikan uang PT Dapensi Trio Usaha sebesar Rp16.781.153.421 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu Rupiah),
  - c. Bahwa meskipun pada pasal 2 Akta Pengakuan Hutang yang sudah ditandatangani oleh Suyudi dan Lydia menyatakan bahwa mereka berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar hutangnya pada PT Dapensi Trio Usaha, namun dikarenakan tidak tercapai kata sepakat antara Suyudi dan Lydia dengan PT Dapensi Trio Usaha maka sesuai pasal 8 Akta Pengakuan Hutang bahwa para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menjalankan kewajiban Lydia dan Suyudi memerlukan Putusan/Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
- 3) Terhadap hasil Putusan ini, para Pihak diberi kesempatan 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Banding sejak diterimanya salinan Putusan dari Pengadilan.

Berdasarkan informasi dari panitera terhadap putusan perkara No. 803/Pdt.G/2015/PN.TNG, Suyudi dan Lydia mengajukan banding, namun hingga saat ini PT DTU belum menerima berkas memori banding dari Suyudi dan Lydia.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2204/DIRUT/1118, Direksi menugaskan kepada Manajer Legal Sdr. Reggi Mohamad Rizki, S.H. untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengajuan perkara perdata perihal Gugatan Wanprestasi melawan Suyudi dan Lydia.

- 4) Pada tanggal 23 Juni 2020, PT Dapensi Trio Usaha membuat Surat Gugatan Perdata perihal Wanprestasi yang dilakukan oleh Sdri Lydia dan Sdr Suyudi, terhadap Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 17 Februari 2014 dihadapan Notaris Djoko Triwobowo, S.H, M.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang.

Di dalam Akta tersebut Sdri Lydia mengaku mempunyai Hutang kepada PT Dapensi Trio Usaha sebesar Rp16.781.153.421 (*Enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*).

Namun hingga tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam Akta tersebut, Sdri Lydia tidak kunjung membayar/melunasi hutangnya, sehingga atas dasar tersebut PT Dapensi Trio Usaha mengajukan Gugatan Perdata perihal Wanprestasi.

Pada tanggal 24 Juni 2020, Gugatan PT Dapensi Trio Usaha didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tangerang, dengan Nomor Pendaftaran: PN.TNG-062020WE5.

Sidang pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Kelas I A Tangerang. Dikarenakan Para Tergugat tidak hadir, sidang diundur dan kepada Para Tergugat akan dilakukan pemanggilan kembali untuk hadir pada hari Senin, 03 Agustus 2020.

Sidang lanjutan tanggal 03 Agustus 2020 dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya. Sidang diundur hari Senin, 10 Agustus 2020 karena Kuasa Tergugat belum dilengkapi Surat Kuasa.

Sidang lanjutan tanggal 10 Agustus 2020 dihadiri Pengugat dan Kuasa Tergugat. Kuasa Tergugat menyerahkan Surat Kuasa dari Tergugat II.

Sidang lanjutan tanggal 24 Agustus 2020 dengan Agenda Mediasi Pertama dihadiri Pengugat dan Kuasa Tergugat. Diputuskan bahwa Principal yang tidak bisa hadir secara langsung untuk melakukan Mediasi agar membuat Surat Kuasa Mediasi.

Sidang lanjutan tanggal 31 Agustus 2020 dihadiri Pengugat dan Kuasa Tergugat dengan Agenda Mediasi Kedua. Adapun Pokok Bahasan Mediasi:

- Bahwa upaya mediasi antara Para Pihak yang berperkara belum dapat terlaksana dikarenakan Hakim Mediator sedang mendapat kemalangan yaitu ada kerabat yang meninggal dunia.
- Sidang Mediasi dijadwal ulang dan akan dilaksanakan pada Senin, 07 September 2020 Sidang lanjutan tanggal 07 September 2020 dengan Agenda Mediasi Ketiga dengan Pokok Bahasan Mediasi.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

- Penggugat (PT DTU) menyampaikan bahwa Tergugat I berutang sejak tahun 2014 yang dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang. Sejak saat itu hingga sekarang, tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk melunasi utangnya, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ini.
- Kuasa Para Tergugat menyampaikan bahwa Kliennya tidak merasa berutang kepada Penggugat.
- Hakim Mediator menyatakan bahwa Sidang Mediasi gagal dan menyerahkan kembali berkas Gugatan kepada Panitera.
- Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Senin, 14 September 2020 dengan Agenda Pembacaan Gugatan.

Sidang lanjutan tanggal 28 September 2020 dengan Agenda Pembacaan Gugatan dengan Pokok Bahasan Sidang:

- Para Pihak sepakat Surat Gugatan dianggap dibacakankembali berkas Gugatan kepada Panitera.
- Hakim Ketua menyusun Agenda Sidang Perkara Perdata No. 512/PDT.G/2020/PN .Tng sebagai berikut:

NO	TANGGAL SIDANG	AGENDA SIDANG
1	28 September 2020	Pembacaan Gugatan
2	12 Oktober 2020	Jawaban dari Para Tergugat
3	19 Oktober 2020	Replik dari Penggugat
4	26 Oktober 2020	Duplik dari Para Tergugat
5	02 November 2020	Pembuktian Surat 1 dari Penggugat sekaligus Para Tergugat
6	09 November 2020	Pembuktian Surat 2 dari Penggugat sekaligus Para Tergugat
7	16 November 2020	Pembuktian Saksi 1 dari Penggugat
8	23 November 2020	Pembuktian Saksi 2 dari Penggugat
9	30 November 2020	Pembuktian Saksi 1 dari Tergugat
10	07 Desember 2020	Pembuktian Saksi 2 dari Tergugat
11	14 Desember 2020	Bukti Susulan dari Para Pihak
12	21 Desember 2020	Kesimpulan
13	11 Januari 2021	Putusan

- Jadwal Agenda tersebut di atas adalah dalam situasi atau kondisi normal, apabila ada sesuatu hal yang menyebabkan sidang tidak bisa berjalan maka Jadwal/Agenda akan disesuaikan.
- Sidang lanjutan tanggal 12 Oktober 2020 dengan Agenda Penyerahan Eksepsi/Jawaban Para Tergugat. Pada Eksepsi/Jawaban Tergugat, Para Tergugat mencoba untuk menggiring kasus ini ke titik awal dengan mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:
  - Proses bergabungnya Agen-agen Lydia
  - Proses Deposit dan *Top Up*
  - Proses pengecekan saldo oleh internal PT DTU (Penggugat)
  - Proses Penandatanganan Akta Pengakuan Hutang dan Akta membebaskan Hak Tanggungan.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Sidang lanjutan tanggal 26 Oktober 2020 dengan Agenda Penyerahan Replik dari Penggugat. Dalam Replik, PT DTU tetap fokus terhadap inti dari gugatan yaitu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Lydia (Tergugat I).

Sidang lanjutan tanggal 09 November 2020 dengan Agenda Penyerahan Duplik dari Tergugat. Bahwa Dokumen Duplik Para Tergugat merupakan Pengulangan dari Jawaban Para Tergugat yang isinya kembali mencoba untuk menggiring kasus ini dari awal.

Sidang lanjutan tanggal 21 Desember 2020 dengan Agenda Pembuktian Surat/Dokumen dari Penggugat dan Para Tergugat.

PT DTU (Penggugat) memberikan Dokumen Pembuktian berupa:

- Daftar Rekapitulasi kerugian dan aliran transfer dana dari DTU kepada 4 Agen milik Lydia
- Akta Pengakuan Utang
- Akta Membebaskan Hak Tanggungan
- Foto-foto pada saat penandatanganan Akta-akta.

Para Tergugat memberikan Dokumen Pembuktian berupa:

- Bukti setor dari Agen-agen Lydia yang tidak bermasalah (Korelet Mujur, Peusar, dan Tiga Raksa) berjumlah 36 buah
- Bukti setor atas nama Agen Margasasi sebesar Rp20 juta sebanyak 1 (satu) buah
- Salinan Putusan Perkara Pospay No. 296 tahun 2014 sebanyak 1 (satu) buah.

Sidang lanjutan tanggal 04 Januari 2021 dengan Agenda Pembuktian Pertama Saksi dari Penggugat yaitu Saksi 1 Notaris Djoko Triwibowo. Dari keterangan Saksi tersebut, ada fakta yaitu pada saat penandatanganan Akta dimaksud, Lydia tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan dan penandatanganan yang dilakukan tengah malam di kediaman Lydia itu, justru atas permintaan Lydia.

Sampai saat ini, Kasus Gugatan Perdata perihal Wanprestasi terhadap Lydia dengan nomor PN.TNG-062020WE5 masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang.

Sampai Semester I Tahun 2021 ada informasi bahwa tergugat melakukan banding tetapi perusahaan belum mendapatkan copy atas pengajuan banding tersebut.

## **2. Kasus Perdata Sriyanto Darto**

Pada bulan Agustus 2019, Perusahaan mendapatkan Surat Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 atas gugatan yang dilayangkan oleh Sriyanto Daryo. Dalam Gugatan nomor 290/PDT.G/2019/PN Bdg tersebut, Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tergugat I : PT Dapensi Trio Usaha
- Tergugat II : Hariyanto, SE, MM.
- Tergugat III : Gatot Gandhi Sapoetra
- Tergugat IV : Lili Marini Sari, SH, SPN.
- Tergugat V : Deasi Witanti Kusumaningtyas, SH
- Tergugat VI : Weli Hendarti, SH.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Materi Gugatan dari Sriyanto Daryo adalah ingin membatalkan Akta Perjanjian Kerjasama, Akta Kuasa Menjual, Akta Pelepasan Hak dan Akta Jual Beli terhadap tanah dan Bangunan sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik No. 02538/Mekarrahayu terletak di Prop. Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec. Margaasih, Desa Mekarrahayu, Surat Ukur tgl 21-8-2002, No. 00410/Mekarrahayu/2002 seluas 203 m<sup>2</sup>, setempat dikenal dengan Jl. Permai II/ME 86, RT 002/RW 10 tertulis atas nama Sriyanto Daryo; dan
- 2) Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik No. 02541/Mekarrahayu terletak di Prop. Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec. Margaasih, Desa Mekarrahayu, Blok Jengkol, Surat Ukur tgl 21-5-2002, No. 00353/Mekarrahayu/2002 seluas 110 m<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Jl. Permai II/ME 86, RT 002/RW 10 tertulis atas nama Sriyanto Daryo.

Setelah melewati 28 kali sidang selama tahun 2019 dan 2020, maka pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 dilakukan Pembacaan Putusan dengan Amar Putusan:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

**Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III**

- Eksepsi Tergugat I
  - Bahwa Surat Gugatan dari Penggugat mengandung unsur unsur Obscur Libel (tidak jelas), dimana surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam perkara Nomor: 290/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 5 Agustus 2019 yang dijadikan dasar Gugatan tidak terang (*onduidelijk*), yaitu Penggugat dalam merumuskan Gugatannya tidak menguraikan kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi Gugatan. Sehingga alasan – alasan Gugatan (*Fundamentum Petendi*) menjadi tidak jelas, kabur.
  - Bahwa Penggugat tidak menyertakan apa yang menjadi Dasar Hukum dan Dasar Fakta dalam mendalilkan Gugatannya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu Posita yang lengkap.
  - Bahwa Surat Gugatan dari Penggugat mengandung unsur *Error in Persona*, dimana dalam posita Penggugat menyebutkan Bapak Kurnia Kartamuhari selaku Penjamin, namun oleh Penggugat tidak disertakan dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat juga dikategorikan sebagai *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) mengingat dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 38 tanggal 17 Desember 2004 antara Tergugat I dengan PT DWI AGUNG PERTIWI, kedudukan Kurnia Kartamuhari adalah sebagai Penjamin dari Penggugat, sehingga seharusnya ditarik dalam perkara ini.
- Eksepsi Tergugat III
  - Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat yang merujuk pada Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 38 tanggal 17 Desember 2004 menyebutkan Kurnia Kartamuhari sebagai Penjamin dari Penggugat, yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Kurnia Kartamuhari, namun tidak disertakan dalam Surat Gugatan ini. Sehingga Surat Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan kurang pihak.

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.956.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

**II. PT Dapensi Dwi Karya**

**1. Piutang Pegawai Koswara**

Piutang ini timbul karena kasus kerugian atas tindakan penyimpangan yang dilakukan mantan Direktur PT Dapensi Dwikarya. Langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Menunjuk hasil general audit atas laporan keuangan PT Dapensi Dwikarya tahun 2011 yang dilakukan oleh KAP Hasnil, M.Yasin & Rekan disebutkan bahwa besar kerugian dikoreksi dari Rp1.982.867.195,00 menjadi Rp1.911.628.250. Atas adanya kerugian perseroan tersebut sampai saat ini belum dapat dibuat Berita Acara Pemeriksaan mengingat yang bersangkutan menolak untuk memenuhi panggilan. Sehubungan saat ini yang bersangkutan telah bekerja kembali di PT Pos Indonesia (Persero) maka Pengurus Dapenpos melalui surat kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) ekspedisi I tanggal 6 Mei 2014 dan Ekspedisi II tanggal 13 Agustus 2014 nomor 02-Sek-19/DU-000/2014/Rhs telah melimpahkan permasalahan tersebut kepada manajemen PT Pos Indonesia (Persero) untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero). Sementara terkait permasalahan hukum yang bertalian, PT Dapensi Dwikarya telah melimpahkan kepada penasihat hukum untuk memproses masalah ini ke jalur hukum.
- b. Dengan adanya surat pelimpahan tersebut, manajemen PT Dapensi Dwikarya berharap pula agar hak-hak yang diterima oleh Koswara sehubungan Koswara akan mengakhiri masa aktifnya di PT Pos Indonesia dapat dikompensasi dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Koswara.
- c. Diupayakan pengumpulan naskah-naskah dan persiapan untuk penyelesaian masalah melalui jalur hukum sudah dapat diselesaikan oleh tim pengacara PT Dapensi Dwikarya pada bulan September 2014 dan selanjutnya kasus tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwajib (dhi. Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi) dan saat ini sedang dalam proses pemberkasan data.
- d. Kasus tersebut oleh Kantor Advokat F. Banu K, SH telah dilaporkan kepada aparat berwajib (dhi. Kejaksaan Negeri Bandung) dmk lampiran-lampiran tembusan surat Dewan Komisaris PT Dapensi Dwikarya kepada Direktur Utama PT Dapensi Dwikarya tanggal 20 September 2014 nomor 115/Dekom/2014 perihal Progres Report Penanganan Kasus Sdr. Koswara (tembusan surat diterima tanggal 3 Oktober 2014).
- e. Dokumen asli Surat Pernyataan bermaterai cukup yang dibuat oleh Sdr. Koswara (antara lain memuat pernyataan tanggungjawab untuk mengganti dan menyelesaikan sepenuhnya nilai kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Akuntan Publik) telah diserahkan kepada Manajemen Perseroan pada tanggal 2 Februari 2015 dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai barang bukti.
- f. Sdr. Koswara pada tanggal 25 Oktober 2015 telah menyetor uang sebesar Rp500.000.000 namun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 5 November 2015 telah menyita uang tersebut.

Pada tahun 2015 telah dilakukan Audit Investigasi oleh Tim dari BPKP Perwakilan Jawa Barat terhadap PT Dapensi Dwikarya mulai tanggal 22 Juni 2015 s.d. 20 Juli 2015.

Kasus kerugian perusahaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak berwajib dan telah mencapai putusan Pengadilan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 15 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Sdr Koswara terbukti bersalah dan divonis hukuman selama 2 (dua) tahun penjara serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp1.571.407.000 dikurangi dengan pengembalian sebesar Rp809.460.000 telah termasuk uang sebesar Rp500.000.000 yang disita Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, uang pesangon dan potongan gaji dari PT Dapensi Dwikarya, sehingga sisa sebesar Rp761.947.000.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

PT Dapensi Dwikarya masih mencatat saldo piutang Sdr Koswara sebesar Rp1.099.168.250. Pada tahun 2017 terdapat Piutang Bermasalah Sdr.Koswara sebesar Rp1.099.168.250 yang belum terselesaikan. Manajemen belum mengambil tindakan jalur perdata untuk permasalahan tersebut dan menunggu arahan selanjutnya dari pemegang saham. Kendatipun demikian, pada bulan Desember 2017 manajemen telah mengambil tindakan untuk melakukan penyisihan 100% atas piutang tersebut.

## **2. Proyek Pertokoan Pegadaian Cimahi**

Akun ini merupakan Proyek Konstruksi Pertokoan Pegadaian Merdeka Cimahi yang dihentikan kegiatannya akibat PT Tapak Sarana, yaitu pihak pengembang yang ditunjuk oleh Perum Pegadaian, tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan permasalahan bagi berbagai pihak, sesuai Surat Perjanjian Berakhirnya Kerja Sama tanggal 3 September 2007 yang mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama No. 215/SPK/PROP/DDK/II/2006, Surat Perintah Kerja No. 005/Dir/SPK/01/06, dan Perjanjian Kerja Pemborongan No. KPT.02.01.1.06 tanggal 30 Januari 2006.

Berdasarkan permasalahan di atas maka pihak perusahaan mencadangkan kerugian atas proyek Pegadaian Cimahi tersebut sebesar 10% sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 249/KD/DIRUT/XII/2010. Pencadangan tersebut baru dilakukan di tahun 2010, karena ada keyakinan manajemen untuk menyelesaikan proyek tersebut. Namun realisasinya sampai tahun 2015 belum ada penyelesaian.

### **a. Langkah-langkah yang telah ditempuh:**

- 1) Manajemen PT Dapensi Dwikarya telah berupaya untuk menghubungi Direktur PT Tapak Sarana namun yang bersangkutan sulit untuk dihubungi. Manajemen PT Dapensi Dwikarya telah mengajukan permohonan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan penghapusbukuan piutang sebesar Rp1.069.968.000 dengan pertimbangan PT Tapak Sarana telah dinyatakan pailit. Atas informasi pailit tersebut maka Pengurus Dapenpos pada RUPS tanggal 16 Juni 2014 telah meminta kepada Direksi perseroan untuk menyerahkan fotokopi/salinan putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwenang.
  - 2) Keberadaan Sdr. Dedi selaku Direktur Utama PT Tapak Sarana sampai saat ini masih dicari oleh Kantor Pegadaian bersama dengan Kantor Kejaksaan Negeri Bandung berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 2010 nomor 111/Pdt/2010/PT Bdg tentang mengabulkan gugatan pihak pegadaian kepada PT Tapak Sarana untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp2.805.991.200 dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT Tapak Sarana berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perum Pegadaian dengan PT Tapak Sarana.
  - 3) Dari Informasi yang diperoleh dari Manajer Hukum Kanwil Pegadaian diketahui bahwa sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menetapkan PT Tapak Sarana dinyatakan pailit.
  - 4) Sehubungan dengan hal tersebut manajemen PT Dapensi Dwikarya mengusulkan agar keberadaan piutang terkait Pegadaian Cimahi diijinkan untuk dihapusbukukan.
- b. Diperoleh informasi bahwa Sdr. Dedi selaku Direktur Utama PT Tapak Sarana telah meninggal dunia, sebagai peneguhan atas kebenaran informasi tersebut maka diperlukan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

c. Bahwa dengan telah keluarnya keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 111/Pdt/2010/PT BDG tentang mengabulkan gugatan Pihak Pegadaian kepada pihak PT Tapak Sarana untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp2.805.991.200 dan menyerahkan kembali Tanah dan Bangunannya atas wanprestasi yang dilakukan PT Tapak Sarana atas Perjanjian antara PT Pegadaian dengan PT Tapak Sarana. PT Tapak Sarana yang menjalin kerjasama pembangunan gedung pertokoan di Pegadaian Cimahi telah bubar dan sulit diketahui keberadaannya, baik Pengurus maupun Perusahaannya.

Penyisihan Piutang sebesar 100% telah dilakukan pada tahun 2012/2013. Permasalahan gedung pertokoan telah diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dapat di write off dari daftar permasalahan yang memerlukan penjelasan Manajemen Perusahaan.

### **3. Ventura Bersama Griya Mitra**

Proyek Perumahan Griya Mitra merupakan ventura bersama antara PT Dapensi Dwikarya dengan Koperasi Pegawai Pos Indonesia (KOPPOS) berdasarkan akta Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 6 Tanggal 27 November 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tatty Nurliana, S.H di Sumedang. Perjanjian Kerjasama Operasi ini telah mengalami perubahan yaitu berdasarkan akta Nomor: 16 tanggal 27 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Tatty Nurliana, S.H.

Kegiatan usaha dari proyek perumahan Griya Mitra sudah tidak ada lagi, untuk penanganan permasalahan yang belum diselesaikan, ditangani oleh tim Ad-Hoc dari PT Dapensi Dwikarya. Modal yang diberikan oleh perusahaan sebesar Rp875.810.500 belum dapat dikembalikan karena masih menunggu beberapa pembayaran piutang konsumen dan retensi bank.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2016 yang disusun oleh tim Ad-Hoc, nilai ekuitas Ventura Bersama Griya Mitra yang semula Rp875.810.500 turun menjadi sebesar Rp466.073.272.

PT Dapensi Dwikarya telah melakukan penyesuaian atas saldo aset lain-lain piutang Ventura Bersama Griya Mitra menjadi sebesar Rp466.073.272.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2017 yang disusun oleh tim Ad-Hoc, nilai ekuitas Ventura Bersama Griya Mitra yang semula Rp466.073.272 turun menjadi sebesar Rp5.301.187.

PT Dapensi Dwikarya telah melakukan penyesuaian atas saldo aset lain-lain piutang Ventura Bersama Griya Mitra dengan Nomor Berita Acara: 4023/KEU/DDK/XII/2017 sebesar Rp460.772.085.

Proses serah terima Perumahan Griya Mitra ke Pemda kabupaten Bandung di Semester II 2020 tinggal penyerahan seluruh berkas persyaratan kepada Dinas Pertamanan dan Pemukiman kabupaten Bandung untuk diajukan kepada Bupati Bandung setelah mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait lainnya di kabupaten Bandung.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Langkah-langkah yang telah dilakukan :

- a. Pertemuan terakhir Dinas PUPR Kabupaten Bandung meminta lahan di Perumahan yang telah disetujui oleh Warga untuk pembangunan Kantor UPT PUPR Kecamatan Cinunuk dengan telah dibuat Surat Pernyataan dari Rukun Warga 026 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi serta lampiran yang ditanda tangani oleh seluruh Ketua RT serta tokoh warga setempat.
- b. Perubahan site plan terakhir yang telah disetujui.  
Kondisi Pandemi Covid-19 secara tidak langsung menghambat proses serah terima Proyek Perumahan Griya Mitra yang ditargetkan diselesaikan pada tahun 2020.  
Proses Serah Terima Perumahan Griya Mitra menjadi target penyelesaian pada Semester I - tahun 2021 ini.

#### **4. Perumahan Graha Cipadung**

Proses penyerahan kepada pemerintah Kabupaten Bandung belum dapat diselesaikan mengingat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu perbaikan infrastruktur yang memerlukan biaya.

#### **5. Perumahan Taman Ciputri Lembang**

Perjanjian kerja sama dengan PT Quadra Cipta Saran dalam pengelolaan Perumahan Taman Ciputri Indah telah dilakukan Pemutusan bersama oleh kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakhiran kerjasama Proyek Perumahan Taman Ciputri indah tanggal 31 Desember 2013.

Dalam poin 12 Perjanjian Pengakhiran Kerjasama tersebut, disebutkan bahwa PIHAK PERTAMA (PT Quadra Cipta Sarana) bertanggung jawab sepenuhnya dan tidak melibatkan PIHAK KEDUA (PT Dapensi Dwikarya) dalam hal terjadi klaim dari pihak Perbankan, Konsumen, Masyarakat, Pemerintah Daerah atau pihak lain yang terikat baik secara administrasi ataupun Hukum.

Melihat kembali isi Perjanjian Pengakhiran Kerjasama diatas, telah diusulkan kepada Dewan Komisaris bahwa permasalahan kasus Perumahan Taman Ciputri Indah dapat di *Write Off* dari permasalahan yang memerlukan penjelasan Manajemen Perusahaan.

#### **6. Penjualan Tanah Sumedang**

Saldo Piutang sebesar Rp20.000.000 akan dibuatkan Berita Acara yang menjelaskan piutang dimaksud dikompensasikan dengan biaya fee kepada penghubung pembeli yang masih kewajiban Perusahaan.

Dengan dibuatnya berita Acara tersebut, permasalahan tanah Sumedang telah diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dapat di *Write Off* dari daftar permasalahan yang memerlukan penjelasan Manajemen Perusahaan.

#### **7. Sertifikat Tanah Sumedang**

Permasalahan panjar sebesar Rp215.271.750 yang telah dikeluarkan untuk pengurusan sertifikat tanah Sumedang di Notaris Tatty Nurliana, SH. sudah dilakukan sampai dengan membuat laporan ke Lembaga Notaris dan permintaan jaminan penyelesaian dari yang berangkutan (foto copy terlampir).

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Proses penyelesaian dilakukan dengan kemungkinan potensi biaya yang timbul atas proses penagihan.

Piutang panjar pengurusan sertifikat tanah Sumedang telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100 % pada tahun 2017.

**8. Penyelesaian Pertanggungan Panjar Pekerjaan Pembangunan Perumahan di Karawang a.n Sdr. Eman Rosiman**

Pembayaran piutang dari yang bersangkutan terakhir diterima pada bulan April 2019 sebesar Rp500.000, sementara sejak bulan Mei 2019 tidak ada lagi pembayaran.

Saldo Piutang Sdr Eman sd tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp78.930.749 dari piutang awal sebesar Rp153.217.100.

**9. Piutang Bisnis (yang telah berumur lebih dari 5 tahun)**

Penyisihan piutang atas transaksi bisnis yang berumur 5 tahun telah dilakukan 100% pada tahun 2017.

Tindak lanjut atas penyelesaiannya masih terus dilakukan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang relevan dengan piutang tersebut.

**10. Piutang PT Adam Jaya**

Dari hasil rekonsiliasi piutang tanggal 4 Juli 2019, PT Adam Jaya Berkilau Mandiri mengakui mempunyai utang kepada PT Dapensi Dwikarya sebesar Rp754.850.746.

Langkah-langkah penagihan telah dilakukan selama tahun 2020, namun belum ada perkembangan kepastian pembayaran dari pihak PT Adam Jaya.

Pada tahun 2021 Manajemen akan menempuh jalur hukum dengan menggunakan bantuan konsultan hukum

**III PT Dapenta Ekakarya**

**1. Permasalahan KPR Dapenpos (Ade Imanuddin)**

a. Berdasarkan catatan PT DEK total angsuran KPR yang telah disalahgunakan Sdr. Ade Imanuddin adalah sebesar Rp207.818.043.

b. PT DEK mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan KPR Dapenpos dikarenakan Sdr. Ade Imanuddin tidak diketahui keberadaannya hanya mendengar informasi yang bersangkutan di Jakarta.

c. Sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019 belum berhasil diselesaikan karena data dan informasi yang dimiliki sangat terbatas mengenai para pihak yang bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap panjar dan piutang yang masih terbuka tersebut oleh manajemen PT. DEK telah diusulkan kepada Komisaris untuk dihapuskan melalui surat nomor ; 81/DEK/0216 tanggal 19 Februari 2016.

**2. Panjar Kerja Tali Jalin**

a. PT DEK mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan Panjar Kerja Tali Jalin dikarenakan keberadaan Sdr. Agung Kuntarto dan istrinya Sdri. Yum Moerwati tidak diketahui keberadaannya.

b. Sdr. Agung Kuntarto dan istrinya Sdri. Yum Moerwati telah masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) sebagaimana tercantum dalam surat Polisi Daerah (POLDA) Jawa Barat Nomor : DPO/316/XII/2012/Dit Reskrim Um tanggal 28 Desember 2012.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

**Permasalahan PT Dapensi Abadi yang dialihkan ke PT Dapenta Ekakarya ( Merger )**

**1. Permasalahan piutang non usaha belum tertagih CV Pustaka Bani Quraisy sebesar Rp1.329.650.000.**

Piutang tersebut terdiri dari:

a. Pokok: Rp1.000.000.000 (bulan Mei 2004 sebesar Rp800.000.000, bulan September 2004 sebesar Rp200.000.000)

b. Bagi hasil sebesar Rp329.650.000

1) Langkah-langkah yang telah ditempuh:

- a) Pada tahun 2006 telah dilakukan penyisihan piutang non usaha sebesar Rp329.650.000 (untuk bagi hasil pendanaan),
- b) Pada tahun 2007 telah dilakukan penyisihan piutang non usaha sebesar Rp1.000.000.000 (untuk pokok penyertaan),
- c) Berdasarkan laporan dari pihak pengacara Agus Hotma Sihombing, SH, M.Hum diperoleh informasi bahwa keberadaan Sdr. Hadin Nuryadin selaku Direktur CV Bani Quraisy dinyatakan menghilang dari Bandung dan domisili orangtuanya berada di Garut serta CV Pustaka Bani Quraisy tidak memiliki kekayaan yang dapat disita.
- d) Mengajukan permohonan untuk persetujuan penghapusbukuan saldo piutang sebesar Rp1.329.650.000 kepada Dewan Komisaris melalui surat tanggal 16 Juli 2014 nomor 676/DA-SUP/0714 dengan pertimbangan:
- e) Manajemen perseroan mengalami kesulitan dalam menemukan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini serta memahami/ mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya terhadap keberadaan saldo piutang bertalian telah dilakukan penyisihan piutang.

2) Langkah Selanjutnya:

Menunggu izin penghapusan piutang dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham Perseroan dan atau Dewan Pengawas Dapenpos dan atau Pendiri Dapenpos.

**2. Permasalahan bisnis perdagangan bambu dan batu bolder.**

a. Terdapat piutang terbuka untuk transaksi penjualan bambu yang belum diselesaikan oleh pihak mitra sebesar Rp431.075.000. Waktu kejadian November 2013 sampai dengan Februari 2014

Kronologi Kejadian:

Dari transaksi kerjasama penjualan bambu kepada CV NR Prima Rizky (yang selanjutnya oleh yang bersangkutan disetor kepada PT Pembangunan Perumahan untuk proyek pembangunan pelabuhan Tanjung Priok Baru) diketahui bahwa terdapat beberapa transaksi yang sudah diselesaikan maupun belum diselesaikan sampai saat ini sebesar Rp431.075.000 dengan rincian sebagai berikut:

Transaksi penagihan		Transaksi Pelunasan		Sisa
Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Rp
25 Okt 2013	74.195.000	3 Des 2013	74.195.000	-
12-Nov-13	111.472.500	19 Des 2013	111.472.500	-
26-Nov-13	84.045.000	09 Januari 2014	60.045.000	24.000.000
02 Des 2013	79.135.000	23 Januari 2014	40.000.000	39.135.000
13 Des 2013	80.448.000	11 Maret 2014	10.000.000	70.448.000
30 Des 2013	94.875.000	16 April 2014	10.000.000	84.875.000

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Transaksi penagihan		Transaksi Pelunasan		Sisa
Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Rp
07-Jan-14	42.046.500	-	-	42.046.500
20-Jan-14	78.104.000	-	-	78.104.000
03-Feb-14	92.467.000	-	-	92.467.000
<b>Jumlah</b>	<b>736.788.000</b>		<b>305.712.500</b>	<b>431.075.500</b>

- CV NR Prima Rizky telah menyerahkan empat lembar cek, yaitu: Cek Bank Mandiri Syariah No. E 322477 tanggal --- bsu Rp100 juta. Cek Bank Mandiri Syariah No. E 322478 tanggal --- bsu Rp100 juta. Cek Bank Mandiri Syariah No. E 322479 tanggal --- bsu Rp100.000.000. Cek Bank Mandiri Syariah No. E 322480 tanggal --- bsu Rp132.000.000.
- Keempat lembar cek tersebut diketahui kosong (tidak ada dananya).

Langkah yang ditempuh:

Penyelesaian atas permasalahan tersebut saat ini diupayakan melalui Lawyer yang telah ditunjuk oleh manajemen dengan meminta pertanggungjawaban kepada pendiri CV NR Prima Rizky sebagai pribadi dengan pertimbangan Pihak CV NR Prima Rizky sudah ingkar janji atas kesanggupan untuk melunasi kewajiban yang ada selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juni 2014.

Mengingat umur piutang yang belum tertagih sebesar Rp431.075.500 tersebut sudah lebih dari 1 tahun dan belum dicadangkan sebagai kerugian, maka dengan besaran  $8/12 \times Rp431.075.500$  dilakukan pencadangan kerugian dan menjadi beban tahun buku 2014.

- b. Terdapat perjanjian utang piutang dengan PT Fajar Losari Indosanrego (Falindos) berkedudukan di Jakarta sebesar Rp1.091.018.650 yang belum diselesaikan oleh yang bersangkutan (dalam surat perjanjian utang piutang nomor: PKS.172/DA-DIR/0914 FALINDOS.001/DIR-A/IX/2014). Waktu kejadian 26 September 2014.

PT Falindos mengaku berutang kepada PT Dapensi Abadi sebesar Rp1.091.018.650 untuk keperluan:

- Pengembalian stok batu bolder yang ditolak oleh PT PP sebanyak 11.281,13m3 senilai Rp620.462.150,
- Pengembalian stok bambu yang ditolak PT PP sebanyak 16.709,26 batang senilai Rp192.156.500,
- Pembayaran karoseri delapan unit truk senilai Rp278.400.000.

Jangka waktu perjanjian selama 6 bulan (berakhir 25 Maret 2015) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama selama 6 bulan.

Jaminan atas transaksi tersebut berupa:

- Sebidang tanah seluas 1.655 m2 yang terletak di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang bersertifikat SHM No. 544 dengan surat ukur tertanggal 12 Mei 1998 nomor 3499/1998 atas nama Jumi Rahayu.J3764.
- Sebidang tanah Hak Milik Adat persil 76 Blok Gardu Kaduruk Girik Nomor C.1158 seluas 3.317,85 m2 yang terletak di Kec. Ujung Jaya, Kab. Sumedang yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Deddy Supriadi selaku PPAT di daerah Sumedang.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Nilai valuasi jaminan menurut KJPP Sugianto pertanggal 26 Januari 2013 Nomor 0126-BRI/CRN/TS/KJPPSGR.CLN/APP/VI/2013 sebesar Rp2.036.000.000.

Keberadaan Asli sertifikat, Akta Jual Beli dan Girik untuk kedua bidang tanah tersebut disimpan oleh Notaris Dirhamdan, SH di Jakarta.

- c. Terdapat perjanjian utang piutang dengan PT Cipta Caraka Persada (PT CCP) berkedudukan di Jakarta sebesar Rp469.000.000 yang belum diselesaikan oleh yang bersangkutan dengan surat perjanjian utang piutang nomor: PKS.173/DA-DIR/0914 CCP.063/DA/09-2014). Waktu kejadian 26 September 2014.
- PT CCP mengaku berutang kepada PT Dapensi Abadi sebesar Rp469.000.000 untuk keperluan pengembalian stok batu bolder yang ditolak oleh PT PP sebanyak 8.527.272 m<sup>3</sup> senilai Rp469.000.000.H3782.
  - Jangka waktu perjanjian selama 6 bulan (berakhir 25 Maret 2015) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama selama 6 bulan.

Jaminan atas transaksi tersebut berupa:

- Sebidang tanah seluas 1.655 m<sup>2</sup> yang terletak di Kec. Ujung Jaya, Kab. Sumedang bersertifikat SHM No. 544 dengan surat ukur tertanggal 12 Mei 1998 nomor 3499/1998 atas nama Jumi Rahayu.
- Sebidang tanah Hak Milik Adat persil 76 Blok Gardu Kaduruk Girik Nomor C.1158 seluas 3.317,85 m<sup>2</sup> yang terletak di Kec. Ujung Jaya, Kab. Sumedang yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Deddy Supriadi selaku PPAT di daerah Sumedang.
- Nilai valuasi jaminan menurut KJPP Sugianto pertanggal 26 Januari 2013 Nomor 0126-BRI/CRN/TS/KJPPSGR.CLN/APP/VI/2013 sebesar Rp2.036.000.000.
- Keberadaan Asli sertifikat, Akta Jual Beli dan Girik untuk kedua bidang tanah tersebut disimpan oleh Notaris Dirhamdan, SH di Jakarta.

Langkah yang ditempuh:

Sehubungan dengan permasalahan piutang perseroan kepada PT Falindos sebesar Rp1.091.018.650 dan kepada PT CCP sebesar Rp469.000.000, Dewan Komisaris telah mengusulkan kepada Pemegang Saham sesuai suratnya tanggal 5 Februari 2015 Nomor 4A/DK/DA 0215 agar dilakukan pencadangan kerugian sebesar 50% dari total piutang PT Falindos dan PT CCP.

Langkah selanjutnya atas semua kasus perdagangan bambu dan batu bolder tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 11 Maret 2015 Surat perjanjian utang piutang sudah dinotariskan dengan Akta Notaris Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H. No. 10 tentang Pengalihan Piutang dengan Pemberian Jaminan.

Dalam Akta Notaris tersebut, disebutkan bahwa PT Dapensi Abadi mengalihkan semua piutang CV NR Prima Rizky sebesar Rp431.075.000, PT Fajar Losari Indosanrego (Falindos) sebesar Rp1.091.018.650 dengan uang jasa selama 5 bulan terhitung Oktober 2014 sampai dengan Februari 2015 sebesar Rp164.908.335,22 dan PT Cipta Caraka Persada (PT CCP) sebesar Rp469.000 dengan uang jasa selama 5 bulan terhitung Oktober 2014 sampai dengan Februari 2015 sebesar Rp74.699.540,58 kepada PT Sarana Persada Group, dengan jaminan berupa sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 20.D.11 Girik nomor 989 blok Tanjungan, seluas 4.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Pulo Ampel Desa Kelurahan Banyuwangi. Keberadaan sertifikat tanah tersebut masih belum diketahui.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dimuat dalam Berita Acara RUPS: nomor 401/DA-DIR/0516 tanggal 13 Mei 2016 pada poin 6.6. tentang persetujuan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda:

- Menyetujui audit investigatif oleh auditor independen dan dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan oleh Komisaris terhadap mantan Direktur Perseroan terkait keberadaan piutang tak tertagih Perseroan kepada CV NR Prima Rizki, PT Cipta Caraka Prima dan PT Fajar Losari Indosanrego tidak jadi dilaksanakan dengan pertimbangan diberlakukannya kebijakan pembatasan simpulan hasil audit investigatif yang dapat disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik.
- Menugaskan manajemen Perseroan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum atas permasalahan panjang terbuka dan piutang tak tertagih Perseroan yang terjadi pada masa kepengurusan Perseroan oleh mantan Direktur Perseroan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

**3. Kecurangan pegawai atas nama Indra Cahyadi yang dilakukan pada bulan Mei 2014.**

Kronologi Kejadian:

Adanya kecurangan atas pembayaran tagihan obat-obatan dari PT Pos Indonesia untuk Area V dan KP II Bandung sebesar Rp79.287.224,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Indra Cahyadi, pegawai PT Dapensi Abadi.

Sdr. Indra Cahyadi telah membuat surat pernyataan tentang pengakuan yang bersangkutan menggunakan uang tersebut.

Pada tanggal 18 Oktober tahun 2014 yang bersangkutan telah mengembalikan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dan pada tanggal 6 Nopember 2014 telah melakukan pengembalian sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga total keseluruhan yang belum dikembalikan sebesar Rp65.487.224 (enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah).

Manajemen PT Dapensi Abadi sudah berusaha melakukan penagihan secara intensif, namun yang bersangkutan berjanji baru akan melunasi pada bulan Agustus 2015.

Berdasarkan minute of meeting KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja dengan Direktur dan Komisaris PT DA tanggal 4 Februari 2015 Nomor 0188/DA-DIR/0215, surat Komisaris PT DA Nomor 4A/DK/DA/0215 tanggal 5 Februari 2015 dan Surat Dirut Dapenpos selaku pemegang saham PT DA memberikan ijin prinsip persetujuan pencadangan kerugian atas piutang bermasalah untuk permasalahan kecurangan pegawai a.n. Indra Cahyadi sebesar 90% dari Rp65.487.224 atau sebesar Rp58.938.500, sedangkan sisanya sebesar Rp6.548.724 akan dibebankan kepada karyawan terkait dan akan diselesaikan pada tahun 2015.

Selama tahun 2015 Sdr Indra Cahyadi telah melakukan cicilan sebesar Rp2.783.000 sehingga saldo piutang menjadi sebesar Rp62.704.224, dan sisa piutang yang menjadi tanggungan Sdr. Indra Cahyadi sebesar Rp3.765.724.

Perusahaan masih melakukan penagihan secara intensif kepada sdr. Indra Cahyadi atas sisa piutangnya sebesar Rp3.765.742.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

**4. Transaksi penjualan gula PT Dapensi Abadi.**

Pada bulan Mei 2014 PT DA memberikan panjar kepada Sdr. Yanto (Supplier Gula) sebesar Rp50.000.000.

Pada bulan Juni 2014 Manajer Perdagangan PT Dapensi Abadi (Sdr. Irawan Setiawan) melakukan transaksi penjualan gula kelapa kepada Sdr. Deden Sumantri yang bertempat tinggal di Taman Kopo Bandung. Sdr. Deden telah memesan gula sebanyak 5 ton dengan total harga sebesar Rp50.000.000.

Atas pesanan Bp Deden tersebut PT DA memerintahkan Sdr. Yanto untuk mengirimkan gula kepada Sdr. Deden sebanyak 5 ton.

Atas transaksi penjualan gula tersebut di atas, belum dibukukan PT Dapensi Abadi.

Sdr. Deden telah memberikan cek Bank Jabar No CCA 081655 sebesar Rp41.800.000.

Sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di cek yang diberikan Sdr. Deden setelah dikonfirmasi ke pihak Bank Jabar ternyata cek tersebut tidak ada dananya/cek kosong.

PT Dapensi Abadi telah melakukan penagihan secara intensif kepada Sdr. Deden namun yang bersangkutan tidak dapat ditemukan di tempat tinggalnya yang berlokasi di Kopo sehingga piutang tersebut berpotensi menjadi kerugian perusahaan. PT DA telah melakukan rapat internal dengan karyawan terkait dan menghasilkan keputusan sebagian piutang tersebut menjadi beban tanggung renteng kepada Direksi sebesar Rp15 juta dan Sdr. Irawan Setiawan sebagai Manager Perdagangan PT Dapensi Abadi sebesar Rp7.500.000.

Pada akhir Desember 2014, panjar sebesar Rp50.000.000 tersebut direklasifikasi ke rekening piutang lain-lain.

Pada bulan Desember 2014 Direksi telah menyelesaikan tanggung jawabnya dengan menyetorkan ke rekening PT Dapensi Abadi sebesar Rp15.000.000, sehingga saldo piutang posisi akhir Desember 2014 sebesar Rp35.000.000 (Rp50.000.000 - Rp15.000.000).

Sdr. Irawan telah menyanggupi akan menyetorkan ke rekening PT DA sebesar Rp7.500.000 dengan cara mengangsur selama 12 bulan terhitung mulai bulan Februari 2014.

Berdasarkan minute of meeting KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja dengan Direktur dan Komisaris PT DA tanggal 4 Februari 2015 Nomor 0188/DA-DIR/0215, surat Komisaris PT Dapensi Abadi Nomor 4A/DK/DA/0215 tanggal 5 Februari 2015, dan Surat Dirut Dapenpos selaku pemegang saham PT DA memberikan ijin prinsip persetujuan pencadangan kerugian atas piutang bermasalah untuk permasalahan transaksi penjualan gula sebesar Rp27.500.000.

Selama tahun 2015 Sdr. Irawan telah melunasi utangnya kepada PT Dapensi Abadi sebesar Rp7.500.000, sehingga saldo piutang menjadi sebesar Rp27.500.000 dan telah disisihkan sebesar 100% oleh perusahaan.

Adanya itikad baik dari Direksi dan manajer perdagangan untuk melunasi apa yang jadi tanggungannya dan Sdr. Deden sudah tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya maka pencadangan piutang disarankan untuk dihapuskan.

**DANA PENSIUN POS INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
PENJELASAN PERMASALAHAN PENYERTAAN LANGSUNG SAHAM  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

---

**5. Penyaluran Proyek Kendaraan Bermotor**

Dalam proyek penyaluran kendaraan bermotor masih ada penerimaan PT. Dapensi Abadi yang belum dibayar oleh pihak Regional V Bandung sebesar Rp71.081.246 (telah ditagihkan melalui surat namun sampai saat ini belum dibayar dengan alasan akan dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu dengan pihak BNI).

**6. Kecurangan Pegawai atas nama Suniman yang dilakukan pada tahun 2016.**

Terdapat Sertifikat AJB (Akta Jual Beli) berupa tanah kosong atas nama orang tua pegawai yang telah dijaminkan kepada PT. Dapensi Abadi yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai (pencurian persediaan obat) sebesar Rp76.067.329 dan telah diangsur melalui pemotongan gaji sebesar Rp11.800.000 pada Tahun 2016 – 2017 dan telah diangsur melalui pesangon sebesar Rp3.264.177 sehingga sisa Rp61.003.152 yang masih diakui sebagai piutang pegawai. Dan saat ini Sertifikat AJB tersebut sudah dilengkapi dengan akta Kuasa Jual yang dibuat oleh Notaris.

**7. Permasalahan yang ditemukan pada semester I 2019**

Terdapat PPn keluaran yang belum dibayarkan atas penjualan Ruko Cibaduyut pada tahun 2017 sebesar Rp93.181.818 dan sudah dilakukan Koreksi Audit oleh KAP Heliantono & Rekan tahun 2017. Sampai saat ini masih belum dibayarkan karena keuangan manajemen PT. Dapensi Abadi tidak mencukupi untuk membayar kewajiban.